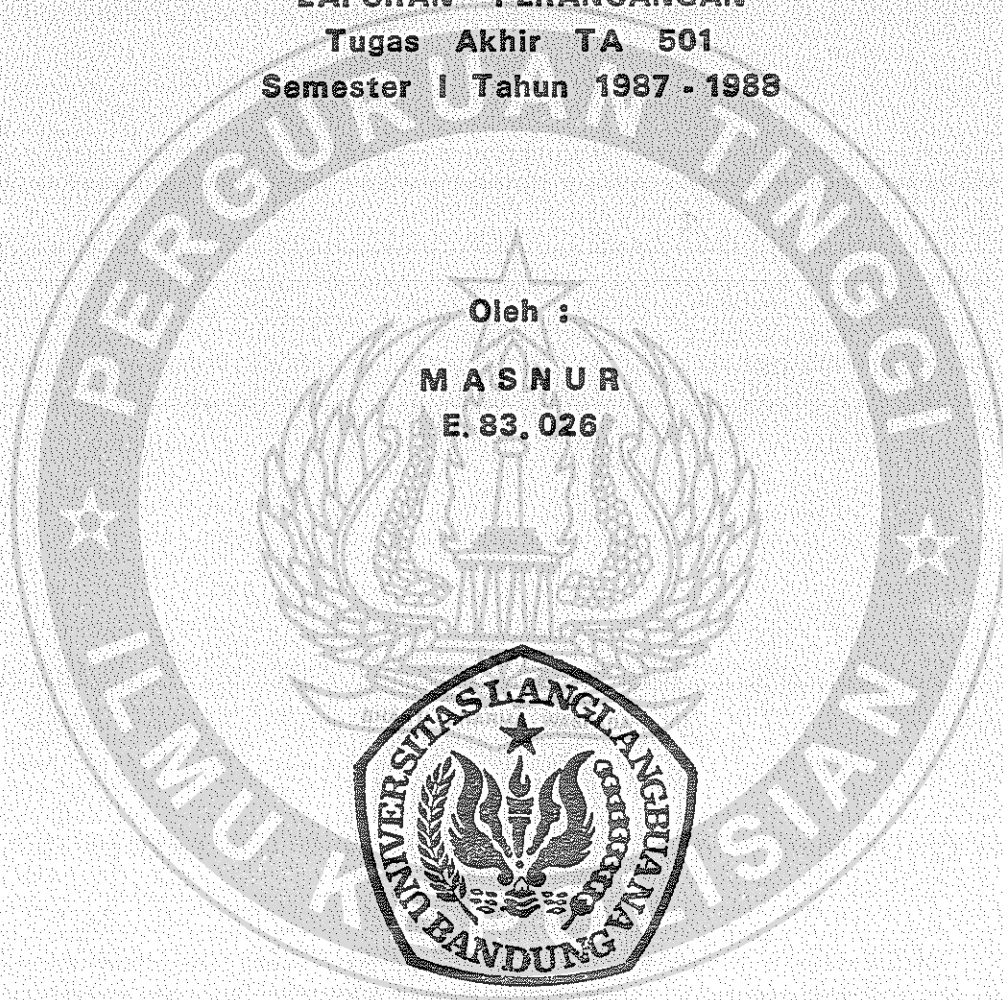


PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN DI JAKARTA

**LAPORAN PERANCANGAN
Tugas Akhir TA 501
Semester I Tahun 1987 - 1988**

Oleh :

**M A S N U R
E. 83.026**



**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR
1988**

Tugas Akhir TA 501
Semester I Tahun 1987 - 1988

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN DI JAKARTA

Laporan Perancangan merupakan sebagian
persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik Arsitektur

Oleh :

MASNUR
E. 83.026

Disetujui oleh :


Prof. Ir. Goenawan A.M. Arch.

Mentor Kepala


Ir. Sugeng Triyadi

Mentor

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR
1988

" Katakanlah : Aku hanya hendak mengajarkan kepadamu semua satu perkara saja yaitu hendaklah kamu semua berdiri dihadapan Allah, dua-dua orang atau seorang-seorang, kemudian berfikirilah kamu semua (gunakanlah akal fikirannya) "

(Surat (34) Sabaa Ayat 46)

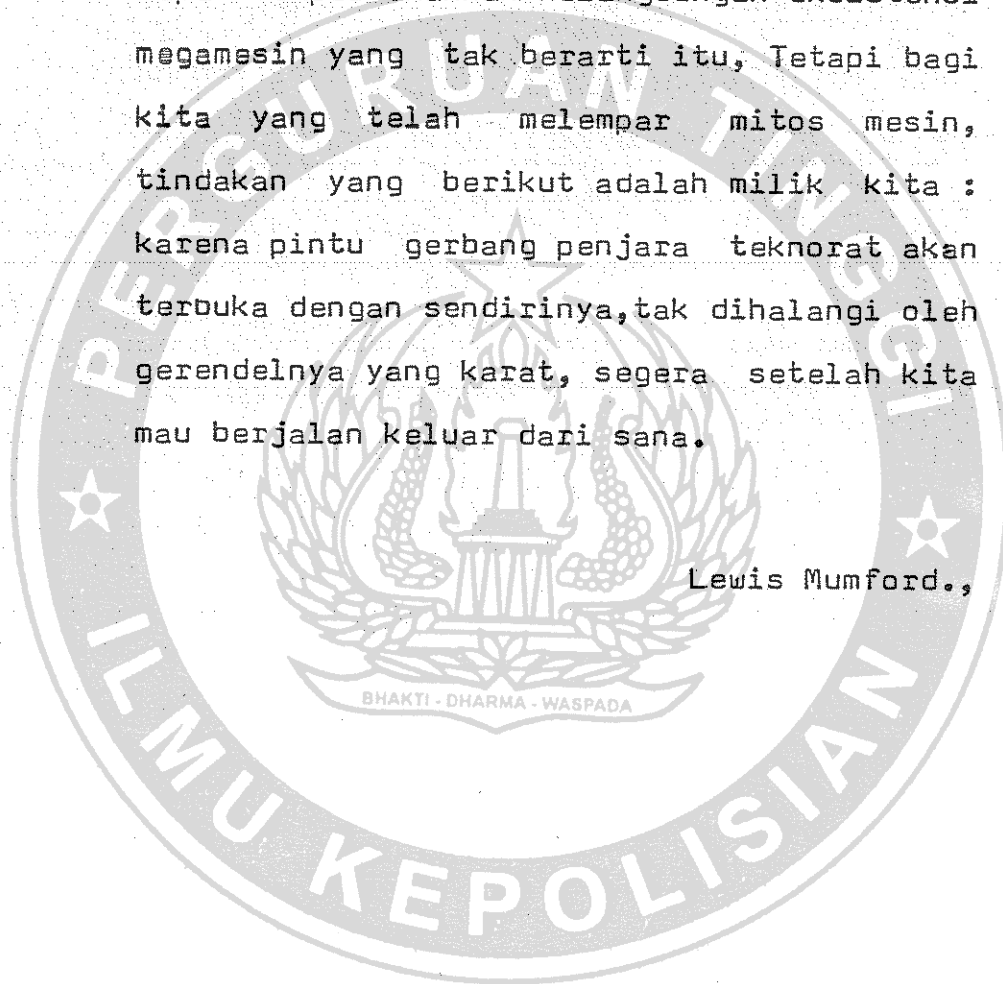




*Kupersembahkan untuk Ayah Bunda tercinta
serta Saudara - Saudaraku terkasih.*

Dalam artian yang telah diletakan masyarakat teknorat, maka tak ada harapan bagi manusia kecuali mengikuti, rencana yang sudah ada demi mempercepat kemajuan teknologi, meskipun unsur - unsur vital manusia diperkosa untuk dapat mempertahankan kelangsungan eksistensi megamesin yang tak berarti itu, Tetapi bagi kita yang telah melempar mitos mesin, tindakan yang berikut adalah milik kita : karena pintu gerbang penjara teknorat akan terbuka dengan sendirinya, tak dihalangi oleh gerendelnya yang karat, segera setelah kita mau berjalan keluar dari sana.

Lewis Mumford.,



KATA PENGANTAR

Laporan perancangan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Proyek Akhir TA-501 Semester I tahun 1988 - 1989, di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam laporan perancangan ini berisi uraian kompilasi data-data sebagai hasil suvey dan study - study kepustakaan serta analisa dan konsep pemikiran sebagai dasar perancangan, sehingga mewujudkan rancangan-rancangan pendahuluan dari Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- Bapak Prof.Ir.Goenawan Atmosoecipto. M.Arch.,
selaku Mentor Kepala.
- Bapak Ir.Sugeng Triyadi.,
selaku Mentor Pembimbing.
- Bapak Ir.Sidik Hananto.,
selaku Koordinator Proyek Akhir.
- Bapak Mayjen.Pol (pur) Drs. RH.Soebroto
Brotodiredjo SH.,
selaku Dewan Guru Besar PTIK - Jakarta dan
Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
- Ibu Letkol.Pol.Dra.Soeparti., : dari PTIK.
- Bapak Letkol.Pol.Faisal., : dari PTIK.
- Bapak Mayor Pol.Drs.Setijono., : dari PTIK.

- Seluruh staf pengajar dari Jurusan Teknik
Universitas Langlangbuana - Bandung.

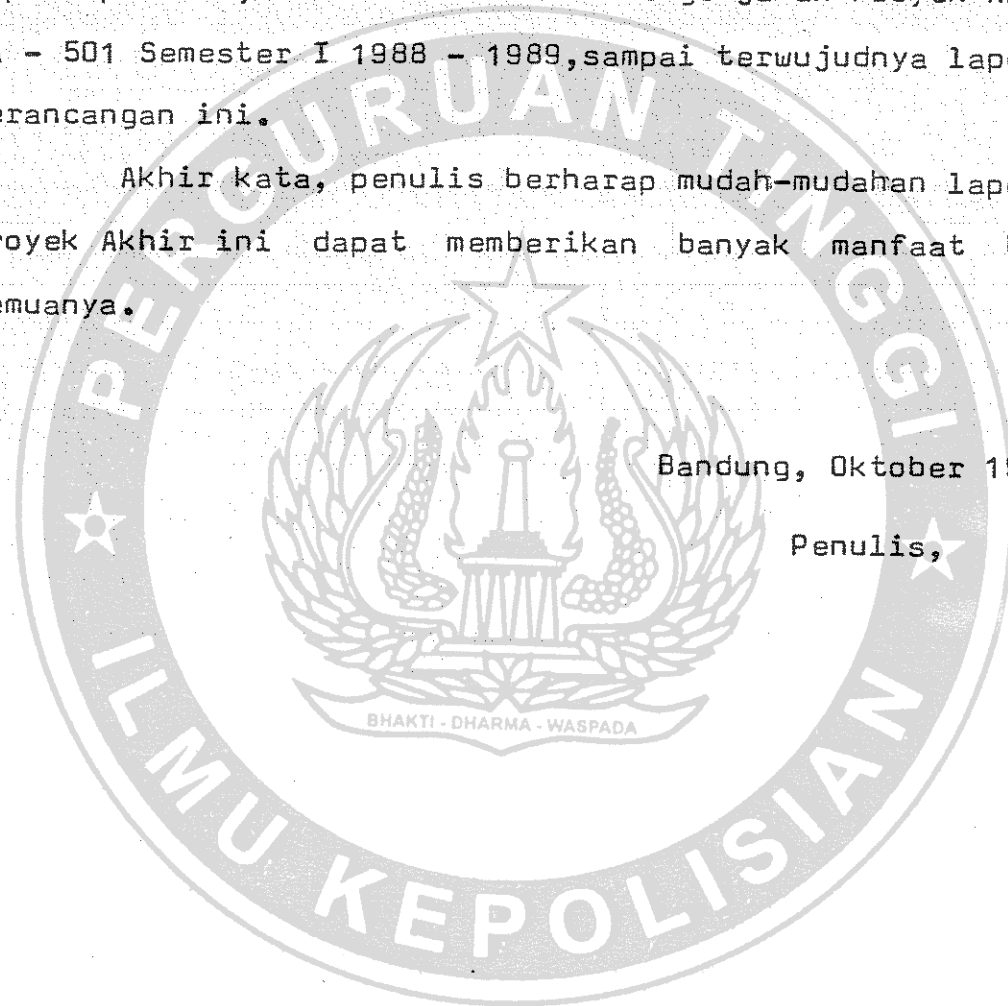
Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu
persatu disini.

Yang telah membantu, membimbing dan memberi pengarahan
kepada penulis, sebelum dan selama mengerjakan Proyek Akhir
TA - 501 Semester I 1988 - 1989, sampai terwujudnya laporan
perancangan ini.

Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan laporan
Proyek Akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi
semuanya.

Bandung, Oktober 1988.

Penulis,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	iii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. P e n g e r t i a n	1
1.2.1. Pendidikan Kepolisian	2
1.2.2. P r o f e s i o n a l	2
1.3. Tujuan Perencanaan	7
1.4. Deskripsi Proyek	8
1.5. Rumusan Permasalahan	9
1.6. Methoda Pendekatan	10
BAB. II. TINJAUAN UMUM MASALAH P.T.I.K.	11
2.1. Perguruan Tinggi	11
2.1.1. P e n g e r t i a n	11
2.1.2. Fungsi Perguruan Tinggi	11
2.1.3. Pola Perguruan Tinggi	11
2.2. Ilmu Kepolisian	19
2.2.1. P e n g e r t i a n	19
2.2.2. Peranan Ilmu Kepolisian	21
2.3. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	22
2.3.1. P e n g e r t i a n	22
2.3.2. Fungsi dan Tujuan	22
2.3.3. Sejarah dan Perkembangan PTIK .	24
2.3.4. Masalah Pendidikan PTIK	25
2.3.5. Gambaran Kecenderungan	29
BAB. III. TELAAH DAN KESIMPULAN SURVEY	35

3.1.	Teknik dan Methoda Survey	35
3.1.1.	Study Literatur	35
3.1.2.	Telaah Banding	35
3.1.3.	W a w a n c a r a	35
3.1.4.	Tinjauan Lokasi	36
3.2.	Data Survey	36
3.2.1.	Data Dari Literatur dan Survey Lapangan	36
3.2.2.	Data Yang Berhubungan Dengan Tapak	39
3.3.	A n a l i s a	41
3.3.1.	Analisa Tapak Dan Lingkungan ...	46
3.4.	Kesimpulan Survey	47
BAB. IV.	PROGRAM PERENCANAAN	48
4.1.	Program Pengembangan Non Fisik	48
4.1.1.	M a h a s i s w a	48
4.1.2.	Tenaga Pengajar	48
4.1.3.	Sistem Pendidikan	48
4.1.3.1.	Jenjang Pendidikan	49
4.1.3.2.	K u r i k u l u m	51
4.1.3.3.	Sistem Semester Dan Kredit	53
4.1.4.	Materi Pendidikan	55
4.1.5.	Methoda Pengajaran	57
4.1.6.	Organisasi Dan Pengelolaan	58
4.2.	Program Pengembangan Fisik	58
4.2.1.	Program Kegiatan Dan Ruang Yang	

	Dibutuhkan	59
4.2.2.	Populasi Kampus	62
4.2.2.1.	M a h a s i s w a	62
4.2.2.2.	Tenaga Pengajar Dan Administrasi	62
4.2.3.	Standar - standar Kebutuhan Ruang	62
4.2.4.	P e r h i t u n g a n	63
4.2.4.1.	L u a s	63
4.2.4.2.	Perincian Dan Luas Ruang	63
4.2.4.3.	P a r k i r	63
BAB. V.	IDEA DAN KONSEP	65
5.1.	I d e a	65
5.2.	K o n s e p	65
5.2.1.	Konsep Lingkungan	67
5.2.2.	Konsep Perancangan Tapak	72
5.2.3.	Konsep Bangunan	73
5.2.4.	Konsep Pengendalian Suara	77
BAB. VI.	HASIL PERANCANGAN FISIK	80
6.1.	Sistem Dalam Bangunan	80
6.1.1.	Sistem Pemipaan	80
6.1.2.	Sistem Listrik	80
6.1.3.	Sistem Penyediaan Air Bersih ..	81
6.1.4.	Sistem Pembuangan Air Kotor ...	84
6.1.5.	Sistem Pembuangan Air Hujan ...	85
6.1.6.	Sistem Komunikasi	85

6.1. 7. Sistem Penangkal Petir	85
6.1. 8. Sistem Pencegahan Kebakaran ..	87
6.1. 9. Sistem Pembuangan Sampah	92
6.1.10. Sistem Sirkulasi	94
6.2. Sistem Struktur Bangunan	96
6.3. Sistem Pelengkap Bangunan	98
6.3. 1. Sistem Pencahayaan	98
6.3. 2. Sistem Penghawaan	98
6.3. 3. Sistem Tata Suara	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN. I. Tabel Perincian Dan Luas Ruang.	
LAMPIRAN. II. Daftar Singkatan.	
LAMPIRAN. III. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Jakarta Selatan.	
LAMPIRAN. IV. Rencana Bagian Wilayah Kota Tahun 2005 (Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta Selatan).	
LAMPIRAN. V. S i n o p s i s.	
LAMPIRAN. VI. A b t r a k s i.	
LAMPIRAN. VII. Gambar - gambar Perancangan.	
LAMPIRAN. VIII. Photo - photo Maket.	

BAB. I. P E N D A H U L U A N.

1.1. Latar Belakang.

Tujuan khusus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat. Syarat mutlak untuk mencapai hal - hal tersebut ialah adanya ketertiban dan keamanan umum.

Oleh karena itu ketertiban dan keamanan umum bergantung kepada tingkah laku manusia, maka Pemerintah bersama - sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat meletakkan keharusan-keharusan dan larangan-larangan dalam peraturan-peraturan hukum kepada setiap orang yang ada diwilayah Negara Republik Indonesia.

Segala peraturan hukum Negara mempunyai sifat paksaan (dwang) dan oleh karenanya Negara menyediakan kekuasaannya untuk menjamin supaya setiap penduduk patuh kepada peraturan-peraturan hukum. Maka dari itu diadakan suatu alat Negara, suatu Hukum Tata-negara yaitu Polisi. Sebagai bangun Hukum Tata - negara Polisi tidak timbul dengan sendirinya akan tetapi tumbuh atas kehendak hukum untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka dari itu polisi memang bukan ciptaan pemerintah semata-mata melainkan ciptaan hukum dimana polisi merupakan suatu alat " Staat Machine " yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.

Sejalan dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi dan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) didalam kehidupan masyarakat Indonesia

maka akan bertambah pula jenis-jenis penyelewengan hukum yang dapat menghambat pembangunan nasional disegala bidang maka sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu polisi sebagai alat negara penegak hukum pelindung dan pengayom masyarakat senantiasa dihadapkan kepada berbagai masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan kemampuan problem solving yang tinggi.

Maka untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan suatu wadah (gedung) sebagai sarana aktifitas dalam proses belajar mengajar.

1.2. P e n g e r t i a n.

1.2.1. Pendidikan Kepolisian.

Pendidikan kepolisian dimaksudkan bagi pegawai kepolisian yang akan memulai menerima jabatannya harus memperoleh pengetahuan dan ketangkasan yang akan menjadi dasar dan senjata baginya dalam menunaikan tugas-tugasnya, karena polisi harus langsung berhadapan/ bergerak ditengah-tengah masyarakat dan polisi harus dapat pula bertindak perseorangan guna melindungi manusia dan menjaga atau menjamin kepastian hak milik, sehingga untuk dapat dicapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang kepolisian, latihan jasmani dan rohani sehingga akan terwujud watak yang bermutu tinggi dari pegawai-pegawai kepolisian.

1.2.2. P r o f e s i o n a l.

Menurut Keputusan Kapolri No. Pol.:
Kep/09/X/1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengemban

tugas-tugas yang memungkinkan PTIK berperan besar dalam kancah pengabdian Polri. Secara garis besar pengembangan tugas dan peranan PTIK tersebut meliputi :

1. Pengembangan pada jenis pendidikan tinggi dengan adanya Fakultas Ilmu Kepolisian (FIK).
2. PTIK mempunyai tugas dan peranan yang baru sebagai lembaga pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yaitu adanya Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK).
3. PTIK mempunyai Laboratorium Penelitian Kriminalistik dan Teknologi Kepolisian (LABLITISTEK), yang juga menjadi bagian dari PPITK.
4. Lembaga pengajaran bahasa juga merupakan bagian daripada PTIK, yang dapat digunakan bagi Polri secara keseluruhan
5. Perpustakaan PTIK sebagai perpustakaan Polri.

Disamping itu dengan mengacu pada salah satu dharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan penelitian dan sebagai perguruan tinggi sejak awal pertumbuhannya PTIK telah melakukan penelitian-penelitian dibidang kepolisian. Dimana kegiatan penelitian tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan tugas kepolisian di Indonesia, hingga kemudian dalam organisasi PTIK dibentuk badan yang khusus bertugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yaitu dalam lembaga yang bernama Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK).

Sesuai perkembangan diatas dapat ditemukan adanya perbedaan pokok antara penelitian pada masa sebelum PPITK

dan pada masa-masa PPITK. Pada masa sebelum PPITK peneliti an merupakan bagian dari fungsi pendidikan yaitu dengan melibatkan para mahasiswa dalam penelitian tersebut.

Sedangkan dalam masa PPITK penelitian menjadi tugas para ahli dan team peneliti yang telah disiapkan untuk tugas penelitian. Pada masa sebelum PPITK penelitian sedang dalam proses menuju bentuk lembaga yang nyata sedangkan masa PPITK adalah telah dilembagakan dalam suatu badan yang khusus bekerja untuk penelitian.

Kegiatan penelitian kepolisian di PTIK merupakan mata rantai proses pertumbuhan yang sambung menyambung dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Untuk memudahkan penelitian kepolisian di PTIK akan dibagi dalam dua tahap pokok yaitu penelitian sebelum PPITK dan penelitian setelah masa PPITK.

Sesuai dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas PTIK sejak tahun 1950 an telah mulai melaksanakannya meskipun sifat penelitiannya lebih condong kepada mission oriented yaitu melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu kepolisian dalam hal ini ilmu kepolisian yang hasilnya untuk dimanfaatkan menunjang lancarnya tugas-tugas kepolisian baik dibidang pembinaan maupun dibidang operasional.

Dari sumber kepustakaan dapat dibaca lembaran dari lampiran Tap MPRS No : II MPRS/1960, buku ketiga bidang mental/rohani dan penelitian. Dari sumber itu dapat dibaca bagaimana penelitian kepolisian pada waktu itu ditata, disamping penataan kegiatan-kegiatan penelitian yang lain

di Indonesia.

Menurut lampiran tersebut, penelitian kepolisian yang pada waktu itu disebut dengan Research Kepolisian dibagi dalam empat bidang yaitu: Bidang Scientific Research Social Research Humanities, dan Administrative Research. Tiap-tiap bidang terdiri dari dua macam sifat penelitian kepolisian yaitu : PTIK, Laboratorium Departemen Kepolisian Lembaga Research Departemen Kepolisian, dan Lembaga Bagian Rencana dan Research MBPN (Markas Besar Polisi Negara-sekarang Mabes Polri).

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PTIK semakin meningkat sejak terbentuknya sub bagian Research yang kemudian berubah menjadi Biro Penelitian dan pengembangan ; Departemen Penelitian dan pengembangan dimana selalu dilibatkan para mahasiswa PTIK.

Dalam perkembangan selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh PTIK tidak hanya melibatkan staf PTIK & para mahasiswanya saja akan tetapi kemudian berkembang pula dengan melakukan kerja sama dengan instansi -instansi lainnya yang hasilnya pun dimanfaatkan pula oleh pihak lain diluar Polri.

Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian adalah Badan Penelitian yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Badan ini mempunyai tugas pokok sesuai dengan namanya yaitu mengembangkan Ilmu & Teknologi Kepolisian (di Indonesia).

Pengertian pengembangan bagi PPITK adalah seperti

yang dirumuskan dalam Keputusan Pangab No.: Kep/11/P/III/1984, tentang pokok-pokok organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pengkajian, penelitian dan penerbitan bahan pustaka.

Oleh karena itu kegiatan - kegiatan yang selalu dilaksanakan adalah :

- a. Penelitian.
- b. Penulisan.
- c. Penterjemahan.
- d. Penyaduran.
- e. Penerbitan.
- f. Simposium.
- g. Seminar.
- h. Panel Diskusi.
- i. Dan pertemuan ilmiah lainnya.

PPITK sebagai Pusat Pengembangan Ilmu & Teknologi Kepolisian mengandung maksud pemusatan daripada cabang - cabang ilmu yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu kepolisian. Oleh karena itu Ilmu Kepolisian sebagai ilmu terapan maka pembedangan ini mengikuti pembedangan ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu :

- a. Bidang Ilmu-ilmu Sosial.
- b. Bidang Ilmu-ilmu Alamiah.
- c. Bidang Pengetahuan Budaya.
- d. Bidang Teknologi.
- e. Bidang Pendidikan Umum.

Selain lima bidang tersebut masih terdapat satu

Laboratorium Penelitian Kriminalistik dan Teknologi yang disingkat Lablitistek.

Tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan Umum, adalah terdiri dari ahli - ahli dalam pengetahuan yang dapat memperluas wawasan pemikir^{an} dan membantu perkembangan kepolisian yaitu cara melihat dan menanggapi kenyataan sikap, motivasi untuk membuat komitmen pada nilai antara Panca - Sila - Etika Kepolisian - Agama-agama.
- b. Bidang Pengetahuan Budaya, adalah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang Pengetahuan Keahlian seperti Ilmu Agama (Theologi), Filsafat, Pengetahuan Hukum.
- c. Bidang Ilmu-ilmu Sosial, adalah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang pengetahuan keahlian seperti Ilmu Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Politik, Manajemen Kepoli^{sian}, Administrasi.
- d. Bidang Ilmu-ilmu Alamiah, adalah terdiri dari ahli-ahli dalam bidang-bidang pengetahuan seperti Fisika Kimia, Biologi, Kriminalistik, Pemeriksaan Dokumen, Teknologi, Kedokteran Forensik, Psikiatri Kepolisian, Patologi Forensik, Balistik Forensik, Kimia Forensik.
- e. Bidang Teknologi Kepolisian, adalah terdiri dari ahli - ahli dalam bidang pengetahuan peralatan-peralatan untuk tugas-tugas kepolisian, Statistika, Kesenjataan Kepoli^{sian}, Komputer dan Informasi Kepolisian.

1.3. Tujuan Perencanaan.

Merancang Gedung Perguruan Tinggi Ilmu

Kepolisian (PTIK), untuk menampung kegiatan/ peningkatan dibidang pendidikan bagi pemangku-pemangku jabatan pimpinan kepolisian di Jakarta, dalam suatu blok wilayah kota Jakarta Selatan.

1.4. Deskripsi Proyek.

Nama Proyek : Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

L o k a s i : Jalan Tirtayasa Blok " 0 " Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan batas :

Barat Daya : Jalan Iskandar syah I.

Barat Laut : Jalan Tirtayasa Raya.

Timur Laut : Jalan Tirtayasa VII.

T i m u r : Jalan Prof. Joko Soetono SH.

Tenggara : Jalan Wijaya I.

Sifat Proyek : F i k t i f.

Pemilik : Mabes Polri.

Pendanaan : Mabes Polri.

Luas Bangunan : ± 8.000 M².

Luas Tapak : ± 7,7 HA.

Fasilitas yang direncanakan :

- Ruang Kerja Gubernur, Ruang Kerja Ses PTIK, Ruang Kerja Kesekretariatan, Ruang Kerja Staf, dan Ruang - ruang penunjang lainnya.
- Ruang Kuliah.
- Ruang Perpustakaan.
- Ruang Meeting.
- Laboratorium.

- Kantin.
- Ruang Koperasi.
- Mushola.
- Auditorium.
- Ruang Lembaga - lembaga Fungsionalisasi Kemahasiswaan.
- Ruang Parkir Khusus ; mobil pimpinan.
- Ruang Parkir Pegawai ; Mahasiswa & para tamu PTIK.
- Dll.

1.5. Rumusan Permasalahan.

- Masalah perkotaan mencakup :
 - Segi keselarasan dan efisiensi penataan massa - massa bangunan pada tapak.
 - Segi penataan sirkulasi dan penyediaan parkir pada tapak.
 - Perancangan yang memperhitungkan/menitik beratkan pada segi citra wajah kota Jakarta yang terungkap dari lingkungan lokasi dan ciri utama dari karakter bangunan - bangunan kepolisian.
 - Segi pengendalian bising (Noise) yang diakibatkan oleh lingkungan dan ruang-ruang tertentu.
- Masalah Perancangan Bangunan.
 - Segi penampilan yang representatif, berwibawa, terbuka dan kesan rasa aman/kokoh

- S i r k u l a s i.
 - Pencapaian antara massa-massa bangunan.
 - Faktor efisiensi dan efektif bangunan.
- Masalah struktur bangunan bertingkat dan integrasinya dengan sistem mekanikal,elektrikal,utilitas bangunan dan segi-segi kecepatan serta kemudahan sistem pelaksanaan pembangunannya.

1.6. Methoda Pendekatan.

- Studi mengenai karakteristik urban pusat kota Jakarta sebagai dasar perancangan yang pokok.
- Studi mengenai pola kegiatan dibidang pendidikan pada sekolah - sekolah kepolisian.



BAB. II. TINJAUAN UMUM MASALAH P.T.I.K.

2.1. Perguruan Tinggi.

2.1.1. P e n g e r t i a n.

Perguruan Tinggi ialah suatu lembaga ilmiah sedangkan kampus adalah sebagai masyarakat ilmiah.

2.1.2. Fungsi Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi bertujuan untuk mencetak sarjana-sarjana yang pancasilais dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang mempunyai keahlian tetapi penuh dengan rasa tanggung jawab.

Perguruan Tinggi juga merupakan suatu pelopor demokrasi dan pelopor dalam pembangunan, disamping fungsi - fungsi tersebut diatas juga perguruan tinggi sebagai agent of development and modernization dan sebagai agent of change, jadi perguruan tinggi adalah sarana pembaharuan yaitu pembaharuan dari nilai-nilai lama kepada nilai-nilai baru yang lebih positif.

2.1.3. Pola Perguruan Tinggi.

Dalam pola kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan tinggi telah digaris kan, agar sistem pendidikan tinggi

diarahkan antara lain untuk memungkin
kan ;

1. Pengembangan seluruh kemampuan
serta kepribadian manusia.
2. Mobilitas mahasiswa dari satu
pengalaman pendidikan ke yang lain
3. Diversifikasi dalam pendidikan dan
proses belajar.
4. Mobilisasi sumber -sumber masyara
kat yang bisa dimanfaatkan.
5. Demokratisasi dalam pendidikan dan
proses belajar.
6. Pertumbuhan kegairahan penelitian.

Untuk mencapai sasaran-sasaran diatas
dilakukan pembaharuan dalam sistem
perguruan tinggi dengan ;

1. Mengatur jenjang & jenis program
di perguruan tinggi yang multi
strata dan diperkaya, dan
2. Penggunaan sistem kredit semester
dengan pengaturan standar beban
belajar dan masa belajar.

Dimana program pendidikan pada suatu
perguruan tinggi adalah semua program
yang ditunjukkan untuk suatu tanda
tamat belajar atau ijazah yang dilak
sanakan oleh perguruan tinggi itu

yang mempersyaratkan tanda tamat belajar pendidikan menengah tingkat atas bagi anak didiknya.

Dimana program pendidikan tersebut dapat dibagi dalam program gelar dan non gelar. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang menekankan pada penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan atau seni.

Sedangkan program non - gelar adalah program yang memberi tekanan pada pembentukan keahlian profesional yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu teknologi atau seni dalam pekerjaan.

Sedangkan tujuan umum program gelar adalah memberi pengalaman belajar menuju suatu keahlian akademik dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Program gelar ini dapat berbentuk program sarjana atau jenjang S_1 , program Pasca Sarjana dan program Doktor atau jenjang S_2 dan S_3 .

Tujuan umum program non-gelar adalah

memberikan pengalaman belajar menuju pembentukan keahlian profesional dalam suatu ilmu pengetahuan seni dan teknologi. Program non-gelar ini dapat berbentuk program diploma, program spesialis dan program akta, yang pada dasarnya bersifat terminal.

Sedangkan program gelar mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut :

S₁ (sarjana), adalah jenjang pertama program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas. Mereka yang berhasil menyelesaikan program S₁ ini mendapat gelar sarjana dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

S₂ (pasca sarjana), adalah jenjang kedua program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 180 SKS dan maksimal 194 SKS dengan lamanya studi kumulatif antara 12 sampai 18 semester di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Dengan kata lain, program S₂ mempunyai beban studi minimal 36 SKS dan

maksimal 50 SKS termasuk tesis, dengan lama studi antara 4 sampai dengan 8 semester setelah S_1 .

Mereka yang berhasil menyelesaikan program S_2 ini mendapat gelar pasca sarjana atau Magister dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

S_3 (Doktor), adalah jenjang ketiga dan tertinggi program gelar yg mempunyai beban studi kumulatif minimal 228 SKS dan minimal 233 SKS dengan lama studi kumulatif antara 16 sampai 22 semester di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Dengan kata lain, program S_3 mempunyai beban studi minimal 48 SKS & maksimal 53 SKS termasuk disertasi dengan lama studi 4 sampai 8 semester setelah S_2 .

Mereka yang berhasil menyelesaikan program S_3 ini mendapat gelar Doktor dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

Program non-gelar jenis diploma sifatnya terminal dan mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut :

D I (Diploma I) atau SO_1 , adalah jenjang pertama program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 SKS

dan maksimal 50 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 semester sampai 4 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas D II (Diploma II) atau SO_2 adalah jenjang kedua program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.

D III (Diploma III) atau SO_3 adalah jenjang ketiga program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.

D IV (Diploma IV) adalah jenjang keempat program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Program non-gelar jenis spesialis mempunyai jenjang pendidikan sebagai

berikut :

Sp I (Spesialis I) yaitu jenjang yang kelima program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah pendidikan D-IV atau Sarjana (S_1).

Sp II (spesialis II) adalah jenjang keenam program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah pendidikan Sp I atau Pasca Sarjana (S_2).

Program akta memberikan kewenangan mengajar atau kewenangan mengajar tambahan yang lebih tinggi melalui pembentukan kompetensi profesional yang diperlukan. Program non - gelar jenis akta mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut :

A I (Akata I) mempunyai beban studi 20 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah memiliki tabungan 20 SKS bidang studi non kependidikan

tertentu, atau langsung diberikan kepada lulusan program D I kependidikan dengan kewenangan mengajar di Sekolah Dasar atau di Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

A II (Akta II) mempunyai beban studi 20 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah memiliki tabungan 60 SKS bidang studi non kependidikan tertentu, atau langsung diberikan kepada lulusan program D.II kependidikan dengan kewenangan mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

A III (Akta III) mempunyai beban studi 20 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah memiliki tabungan 90 SKS bidang studi non kependidikan dengan kewenangan mengajar di Sekolah menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah Tingkat Atas

A IV (Akta IV) mempunyai beban studi 20 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah memiliki tabungan 124 SKS bidang studi non

kependidikan tertentu, atau langsung diberikan kepada lulusan program S_1 kependidikan dengan kewenangan mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Atas. Akta V (Akta V) mempunyai beban studi 20 SKS dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah memiliki tabungan 160 SKS bidang studi non kependidikan tertentu, atau langsung diberikan kepada lulusan program S_2 kependidikan dengan kewenangan mengajar di Perguruan Tinggi.

Program Akta V bagi profesi non kependidikan ditujukan untuk memberikan kemampuan/kompetensi mengelola proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi; Sedang Akta V bagi profesi kependidikan ditujukan untuk memberikan penguasaan dan pengayaan dibidang studi non kependidikan yang akan diajarkan.

2.2. Ilmu Kepolisian.

2.2.1. Pengertian.

Pengertian dasar dari Ilmu Kepolisian adalah sebagai berikut :

- Menurut Brigjen.Pol.Drs.Moersaleh Msc.

Ilmu Kepolisian adalah suatu Applied Science yang

lapangan studinya berpusat pada pengetahuan tentang pengamanan masyarakat berintikan pengamanan jiwa, manusia, harta benda dan lembaga - lembaga didalam masyarakat.

- Menurut Mayjen.Pol.Drs.Subadi Sastrosudjono.

Ilmu Kepolisian adalah suatu ilmu yang mempelajari ikhwal kepolisian terutama segi-segi hakekat ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai fungsi dan sebagai organ, dengan tujuan menghasilkan pelaksanaan tugas polisi yang setinggi - tingginya.

- Menurut Mayjen.Pol.Drs.Mardiawan SH.

Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya terhadap gangguan manusia lain tentang harta benda, jiwa dan kehormatannya.

- Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Polri dalam lampiran makalah apresiasi bersamanya merumuskan bahwa :

Ilmu Kepolisian ilmu yang mempelajari perbuatan - perbuatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri atau warganya dari ancaman - ancaman terhadap jiwanya, miliknya, kehormatannya serta perbuatan - perbuatan penertiban umum. Kesemuanya untuk menegakan dan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa melupakan peranan bidang non - hukum.

- Menurut Prof.DR.Harsja W.Bachtiar.

Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang tidak hanya mencakup pengetahuan hukum kepolisian, serta hukum pidana dan hukum acara pidana; Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup ilmu manajemen kepolisian dan administrasi kepolisian; Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup pengetahuan sosiologi, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian; Ilmu Kepolisian tidak hanya mencakup kriminalistik dan kriminologi, melainkan juga mencakup berbagai bidang pengetahuan budaya, seperti pengetahuan sejarah dan filsafat kepolisian, serta pengetahuan teknologi, teknologi kepolisian adalah suatu bidang pengetahuan yang agak terabaikan dimasa lampau, padahal adalah amat penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang dengan perkataan lain, ilmu kepolisian, yang harus dijadikan sasaran perhatian PTIK merupakan bidang-bidang pengetahuan yang banyak ragamnya, meliputi ilmu-ilmu alamiah dan teknologi, ilmu-ilmu sosial maupun pengetahuan budaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa " Ilmu Kepolisian adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan timbal balik dengan berbagai disiplin ilmu eksakta dan non-eksakta ".

2.2.2. Peranan Ilmu Kepolisian.

Salah satu peranan ilmu kepolisian ialah untuk melindungi masyarakat dari ancaman - ancaman

terhadap jiwanya, miliknya, kehormatannya serta perbuatan-perbuatan penertiban umum, kesemuanya untuk menegakan dan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa melupakan peranan dibidang non - hukum.

2.3. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

2.3.1. P e n g e r t i a n.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah lembaga pendidikan tinggi Polri & Pusat Penelitian Ilmu dan Teknologi Kepolisian, sekaligus sebagai lembaga pendidikan ABRI setingkat sekolah pengembangan keahlian dan setingkat institut dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

2.3.2. Fungsi dan Tujuan.

Fungsi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah :

- a. Menyusun dan mengembangkan sistem pembinaan pendidikan PTIK sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan kebijaksanaan dari Kapolri dan Dewan Pendidikan / kurikulum Polri serta prosedur dalam Organisasi Polri.
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang ilmu dan teknologi kepolisian, baik untuk jalur gelar maupun non gelar yang meliputi ;
 1. Pendidikan dan pengajaran termasuk pembinaan mental kejuangan.
 2. Penelitian dan pengembangan.
 3. Pengabdian masyarakat.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- c. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian & pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian sebagai bahan masukan bagi kepentingan Mabes Polri.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan keustakaan baik bagi kepentingan lembaga maupun Mabes Polri.
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga guna mempertinggi kemampuan operasional pendidikan, pengkajian dan penelitian.
- f. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi/badan/instansi didalam dan diluar polri khususnya dengan Universitas pembina untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya serta dengan AKPOL untuk menjamin pendidikan ilmu kepolisian.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diembankan oleh Kapolri.

Tujuan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah, mendidik para perwira mahasiswa agar mereka memperoleh kemampuan dalam menanggapi masalah kepolisian dengan penggunaan pengetahuan ilmu kepolisian pada tingkat /tarap sarjana yang berpedomankan Pancasila.

Tujuan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran yang lebih khusus yaitu :

- a. Senantiasa berfikir dan bertindak sesuai dengan ideologi Negara Pancasila.
- b. Senantiasa menjunjung tinggi dan mempertahankan hukum Negara.

- c. Menguasai dasar-dasar pengetahuan ilmu kepolisian.
- d. Memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ilmu kepolisian dalam menanggapi masalah-masalah kepolisian yang biasa dihadapi oleh perwira - perwira Polri pada tingkat kapten dan Mayor Polisi.
- e. Mengetahui dasar - dasar perkembangan masyarakat dan kebudayaan serta kaitannya dengan ketertiban umum dan kejahatan.
- f. Memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti perkembangan pengetahuan ilmu kepolisian.
- g. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian yang sederhana.
- h. Berjiwa pejuang.

2.3.3. Sejarah dan Perkembangan PTIK.

Pendidikan perwira kepolisian telah ada sejak zaman penjajahan dan berkedudukan di Sukabumi. Tujuan pendidikan dan sistem serta macam pendidikannya bagi perwira kepolisian pada waktu itu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka maka kemajuan diberbagai bidang diikuti pula dengan bertambahnya corak kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Pada waktu itu timbul ide / gagasan bahwa kepolisian tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi macam-macam kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat, untuk itu timbullah suatu pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mendidik kader - kader pimpinan kepolisian yang mampu berpikir secara sistematis, methodis dan cakap dalam

mencari/mengungkap macam - macam kejahatan dengan berbagai pengetahuan yang modern, sehingga dapat menanggulangi segala bentuk kejahatan secara tuntas.

Tantangan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong (push factor) untuk mendirikan sekolah polisi yang mempunyai standar akademis, yang pada akhirnya gagasan tersebut terwujud dengan berdirinya Sekolah Bagian Tinggi di Metrojudan (Kedu).

Sekolah Bagian Tinggi didirikan dengan pengesahannya dari Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1946 berdasarkan Surat Keputusan No.Pol, : 12 / 19 / 22, yang pada akhirnya menjadi Akademi Polisi.

Setelah pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Akademi Polisi dipindahkan ke Jakarta dan mengalami perubahan nama menjadi " Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian " (PTIK).

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan salah Perguruan Tinggi Kedinasan yang pengawasan maupun pengelolannya ditangani langsung oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI).

2.3.4. Masalah Pendidikan P.T.I.K.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka peraturan Akademi Polisi yang lama tidak sesuai lagi, sehingga perlu diperbaharui.

Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No. : 47/PM/11/53 tanggal 6 Juni 1953 ditetapkan peraturan PTIK yang baru dimana pengaruh tersebut mempunyai pengaruh terhadap

status PTIK. Perubahan status tersebut, dituangkan dalam Surat Keputusan Yang Mulia Perdana Menteri No, :87/PM/II/54 tanggal 20 Agustus 1954 yang isinya :

1. Bagian Bakaloreat selama 3 (tiga) tahun.
2. Setelah Bakaloreat harus praktek dilapangan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Bagian Doktoral harus diikuti dalam perkuliahan selama 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1965 PTIK mengalami perubahan sistem pendidikan sebagai akibat dari Surat Keputusan Presiden RI No. : 155/1965, dimana pada waktu itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengadakan integrasi Akademi Angkatan Perang termasuk didalamnya bagian dari PTIK yang setarap dengan Akademi Ilmu Kepolisian (A.I.K.).

Perubahan sistem pendidikan PTIK menjadi sebagai berikut :

1. Bagian Bakaloreat PTIK tidak lagi menerima mahasiswa baru dari umum tetapi seterusnya hanya menyelenggarakan pendidikan pembulatan bakaloreat terhadap lulusan AAK / Akabri Bagian Kepolisian.
2. Bagian Doktoral menjadi lembaga pendidikan lanjutan perwira dengan methoda universiter.

Sebagai akibat dari perubahan tersebut maka bagian Doktoral (mahasiswa PTIK angkatan ke delapan) mulai menerapkan kewajiban untuk membuat skripsi (karya ilmiah), sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaannya.

Pada masa pendidikan Doktoral PTIK angkatan ke IX telah

dicoba penjurusan studi ilmu kepolisian yang meliputi :

1. Jurusan Administrasi Keamanan.
2. Jurusan Kriminologi / Kriminalistik.
3. Jurusan Hukum.

Penjurusan tersebut akhirnya dihapuskan pada waktu pendidikan Doktoral PTIK angkatan ke XIII, sehingga semua pendidikan Doktoral PTIK menjadi bersifat umum. Sehingga pada akhirnya tahun 1980 ditanda tangani Surat Keputusan Bersama :

Nomor : 014/DJ/Kep/80.

No.Pol. : Kep/02/III/80.

Antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan KAPOLRI. Keputusan Bersama tersebut mengenai masalah pembentukan panitia bersama dalam rangka pengembangan suatu program Pendidikan Tinggi bidang Ilmu Kepolisian, dimana panitia bersama tersebut menemukan hal - hal sebagai berikut :

1. Ilmu Kepolisian telah memenuhi syarat - syarat ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu :
 - a. Telah memiliki Special (Explicit) Field Of Study.
 - b. Telah dipelajari melalui Scientific Method.
 - c. Telah menghasilkan Scientific Truth.
 - d. Hasilnya telah tersusun sebagai suatu Scientific Sistem.

Oleh karena itu eksistensi Ilmu Kepolisian sebagai suatu disiplin ilmu atau suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tidak dapat diragukan lagi.

2. Sejak dari tahun 1929 Ilmu Kepolisian dengan sebutan

Police Science telah dijadikan program studi pada University Of Southern California - USA dengan pemberian gelar kesarjanaan bagi para lulusannya dan dewasa ini hampir setiap Universitas di Amerika Serikat telah memiliki program studi dalam bidang Ilmu Kepolisian dengan pemberian gelar kesarjanaan dengan nama - nama yang berbeda.

3. Di Indonesia program studi untuk bidang ilmu kepolisian telah ada dan telah dikembangkan sejak tahun 1946 oleh lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang sejak tahun 1950 terkenal dengan nama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (P.T.I.K.).

Dengan pemberian gelar sarjana (drs) Ilmu Kepolisian bagi para lulusannya.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1980, ditandatangani pula Surat Keputusan Bersama antar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan KAPOLRI yang isinya tentang pembinaan dan tanggung jawab bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Bersama :

Nomor : 0214/0/1980.

No.Pol. : Kep/12/VIII/80.

Sehingga dengan adanya bimbingan dan bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Universitas Indonesia sebagai universitas pembina dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, maka diharapkan bidang Ilmu Kepolisian akan tambah berkembang lagi.

II.3.5. Gambaran Kecenderungan.

Pengembangan pendidikan sejalan dengan perkembangan masalah-masalah Kepolisian menuntut peranan PTIK untuk lebih meningkat lagi.

Tuntutan demikian itu menghendaki langkah-langkah pemantapan dalam berbagai segi.

Secara sistematis langkah-langkah pemantapan di laksanakan baik dari segi formal maupun segi material. Segi formal mencakup masalah-masalah pengakuan status dan pembinaan akademis maupun pengakuan secara struktural bagi lembaga PTIK. Segi material mencakup kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bagi peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian, sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun tuntutan kepada Polisi dalam peranannya sebagai unsur Polri dan unsur ABRI.

Status dan pengakuan akademis dimantapkan dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia :
Nomor : 0214/0/1980

No. Pol : Kep/12/VII/1980 tentang pembinaan, pengembangan & tanggung jawab bidang akademis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut memuat 10 (sepuluh) butir ketetapan, diantaranya yang terpenting adalah tanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan aspek akademik dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PTIK di serahkan oleh Kepala Kepolisian RI kepada Menteri P&K.

Maka dalam rangka pelaksanaan keputusan ini antara lain ditunjuk Universitas Indonesia sebagai Universitas pembina Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Bertolak dari pemantapan formal tersebut diatas kemudian membuka ruang gerak bagi pemantapan segi material, karena dengan pengakuan status dan pembinaan akademik tersebut kemudian mulai disusun pola baru pendidikan di PTIK. Materi kurikulum, metoda dan pengajarannya diorientasikan bagi pemecahan masalah-masalah kepolisian yang semakin berkembang dalam masyarakat modern yang telah dicapai dalam tahap-tahap pembangunan sekarang ini, Polri dituntut untuk memiliki banyak bidang keahlian dalam pelaksanaan tugasnya. Keahlian-keahlian itu antara lain dibidang administrasi kepolisian, Hukum Kepolisian, Lalu Lintas, Kriminologi, Delinkuensi Anak dan keahlian-keahlian lain yang akan selalu terus berkembang. Keahlian-keahlian itu yang diwujudkan dalam materi akademik di PTIK dengan menggunakan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Pemantapan bobot ilmiah bagi sarjana Ilmu Kepolisian diwujudkan dalam peningkatan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh PTIK. Sarjana yang dihasilkan selama ini masih dalam jenjang Strata Satu (S_1) dan akan dilengkapi dengan peningkatan jenjang pada program Pasca Sarjana untuk Strata Dua (S_2) dan Strata Tiga (S_3). Begitu pula bobot ilmiah dimantapkan lagi dengan bobot semangat kejuangan yang diwujudkan didalam pengasuhan/penuntunan bagi tumbuhnya motivasi pada hasil didik agar tetap menjunjung

tinggi nilai-nilai masyarakat Indonesia atas dasar falsafah Pancasila. Serta sikap mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

Segi pementapan selanjutnya adalah dengan peranan yang dibebankan kepada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sebagai lembaga ilmiah untuk mengembangkan Ilmu dan Teknologi Kepolisian. Peranan ini didorong oleh kenyataan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, yang pada sisi lain dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan gangguan masyarakat. Maka PTIK ditingkatkan dalam fungsi dan perannya sebagai Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, yang ditetapkan dalam keputusan Pangab No.: Kep/11/P/III/1984, Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 31 Keputusan tersebut menyatakan bahwa: "PTIK adalah Badan Pelaksana pada Tingkat Mabes Polri yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan Keahlian Perwira Polri serta pengkajian, Penelitian, dan Penerbitan Pustaka dalam rangka pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian". Bunyi pasal tersebut memuat dua golongan tugas PTIK yaitu Pendidikan serta Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.

Penjabaran tugas tersebut di atas dirumuskan dalam lampiran "Z" dari Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/09/X/1984, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dalam keputusan ini tugas pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian diwadahi dalam lima bidang

pengembangan ilmu serta satu laboratorium Kriminalistik & Teknologi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penelitian Seminar dan pertemuan Ilmiah lainnya, penterjemahan penerbitan maupun penemuan-penemuan metoda dan teknologi Kepolisian. Hasilnya dimaksudkan untuk menunjang tugas-tugas Kepolisian terutama untuk pengembangan keahlian - keahlian dalam bidang Ilmu dan Teknologi Kepolisian. Sehingga untuk tujuan ini memungkinkan adanya program pendidikan non gelar disamping program pendidikan gelar.

Adanya kebutuhan untuk melaksanakan program pendidikan non gelar disamping pendidikan gelar ini dinyatakan dalam rumusan keputusan Pangab tersebut diatas pasal 31 ayat 2, yang berbunyi : " Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dibidang Ilmu dan Teknologi Kepolisian baik jalur gelar maupun non gelar...".

Demikianlah maka dengan keluarnya kep : 11/PANGAB/III/1984 tersebut serta Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/09/X/1984 sebagai penjabaran, merupakan jaminan terhadap ke mantapan kedudukan PTIK. Begitu pula Surat keputusan Bersama Kapolri dan Menteri P&K terdahulu telah menjamin mantapnya pengakuan akademis dan status PTIK. Dari kedua pementapan segi formal tersebut telah dimantapkan pula kegiatan - kegiatan yang terutama mencakup pendidikan serta peranannya dalam pengembangan baik ilmu maupun Teknologi Kepolisian.

Dipihak lain kerja sama dengan instansi-instansi & pihak-pihak dari dalam dan luar negeri telah dilaksanakan

dengan mantap, berencana karena telah jelas sasaran dan pembidangannya. Team ahli dari PTIK telah melakukan study perbandingan ke negara-negara Eropa dan Amerika. Begitu pula ceramah tamu (Guest Lecture) dalam bidang Forensik telah diundang untuk pengembangan Ilmu Forensik di Indonesia. Ahli Hukum Kepolisian dari negeri Belanda, Jerman dan Perancis ikut pula memberikan sumbangan dalam pengembangan Hukum Kepolisian di negara kita.

Dengan mengacu pada hasil study perbandingan dari berbagai negara maju metoda pengajaran dapat disempurnkan. Penggunaan metoda Pedagogie Active dengan bantuan audio visual telah diterapkan di PTIK atas bantuan ahli dari kepolisian Perancis. Prioritas juga diberikan kepada pengajaran bahasa asing untuk Perwira Mahasiswa PTIK dengan mendatangkan Doktor bidang bahasa Inggris dari Inggris.

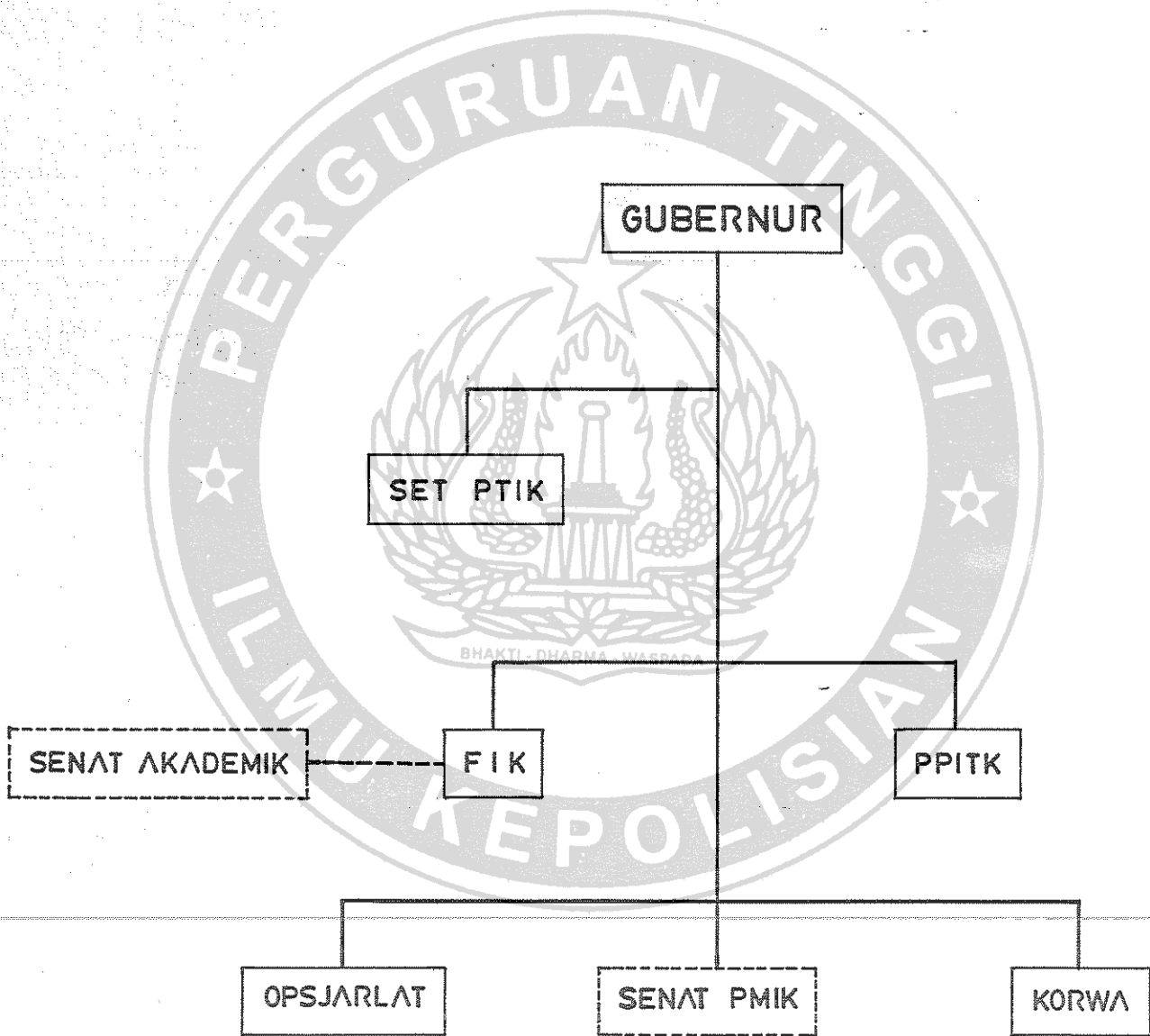
Partisipasi para ahli dan staf di PTIK dalam berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pihak lain baik di Indonesia maupun diluar negeri, telah ikut memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dari dimensi ilmu Kepolisian.

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan pemantapan secara material yang sekaligus akan mengisi pemantapan formal yang semuanya diorientasikan bagi kemanfaatan PTIK khususnya maupun Polri pada umumnya sebagai sumbangan Ilmu Kepolisian bagi kehidupan kemasyarakatan dan bernegara. Namun tahap pemantapan masih terus dilaksanakan guna

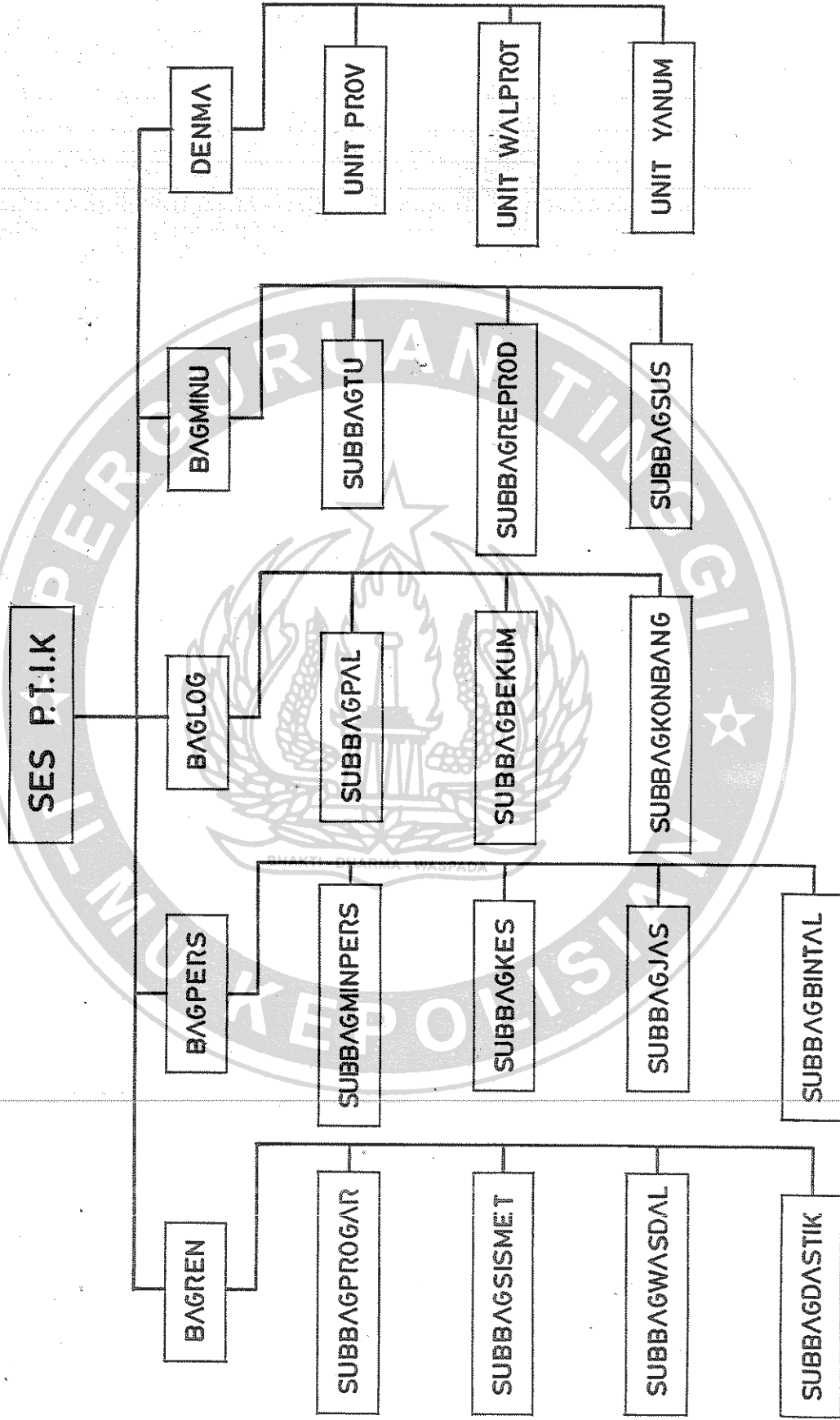
menjawab tantangan yang dihadapi Polri dalam masa menda
tang. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian masih harus menye
lesaikan pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga ke
ahlian dibidang pekerjaan teknis operasional, dibidang pe
kerjaan staf maupun untuk tenaga pengajar pendidikan ting
gi serta tenaga peneliti dibidang Ilmu dan Teknologi Kepo
lisian bagi usaha pemecahan masalah-masalah Kepolisian.



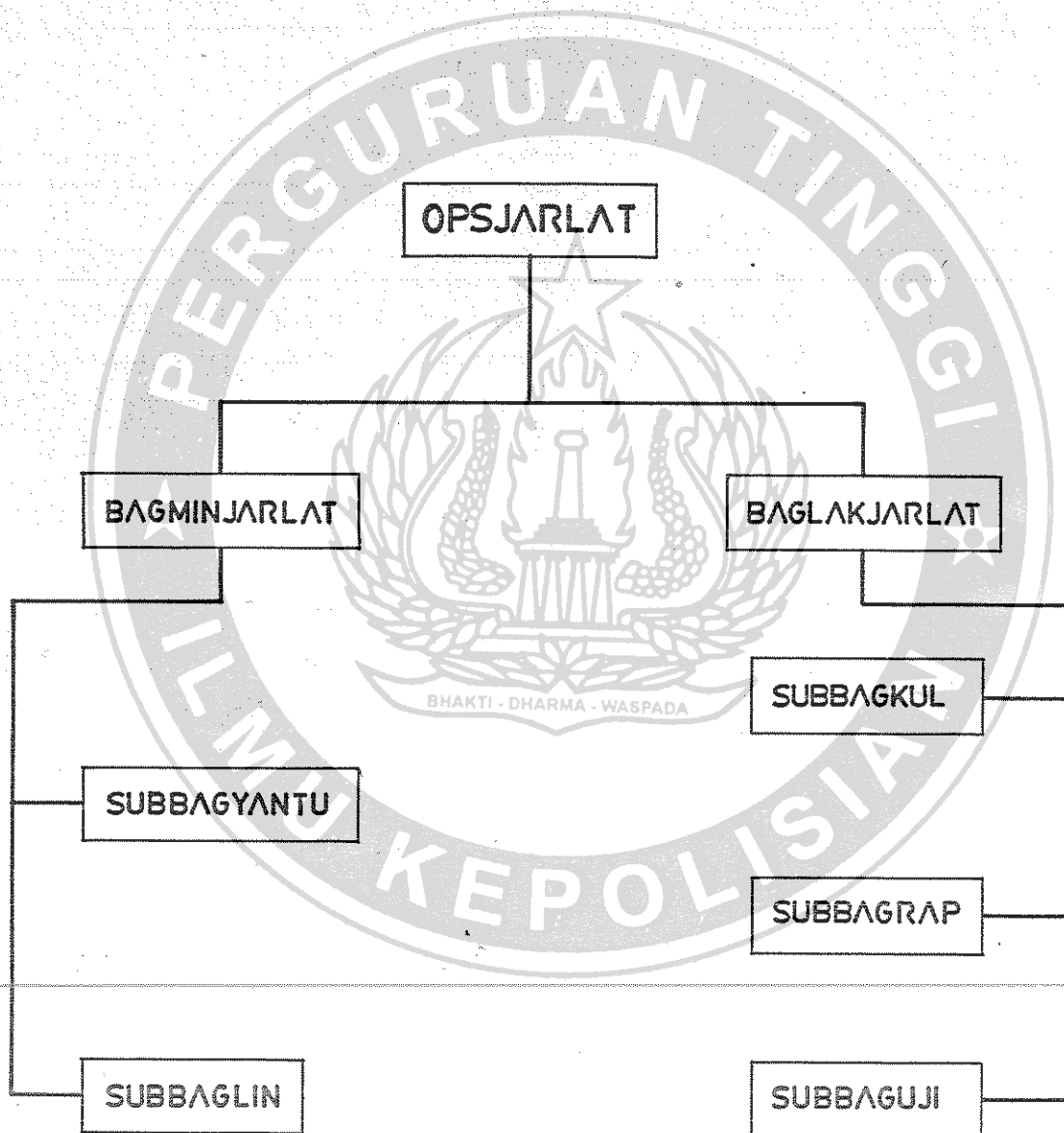
STRUKTUR ORGANISASI PTIK



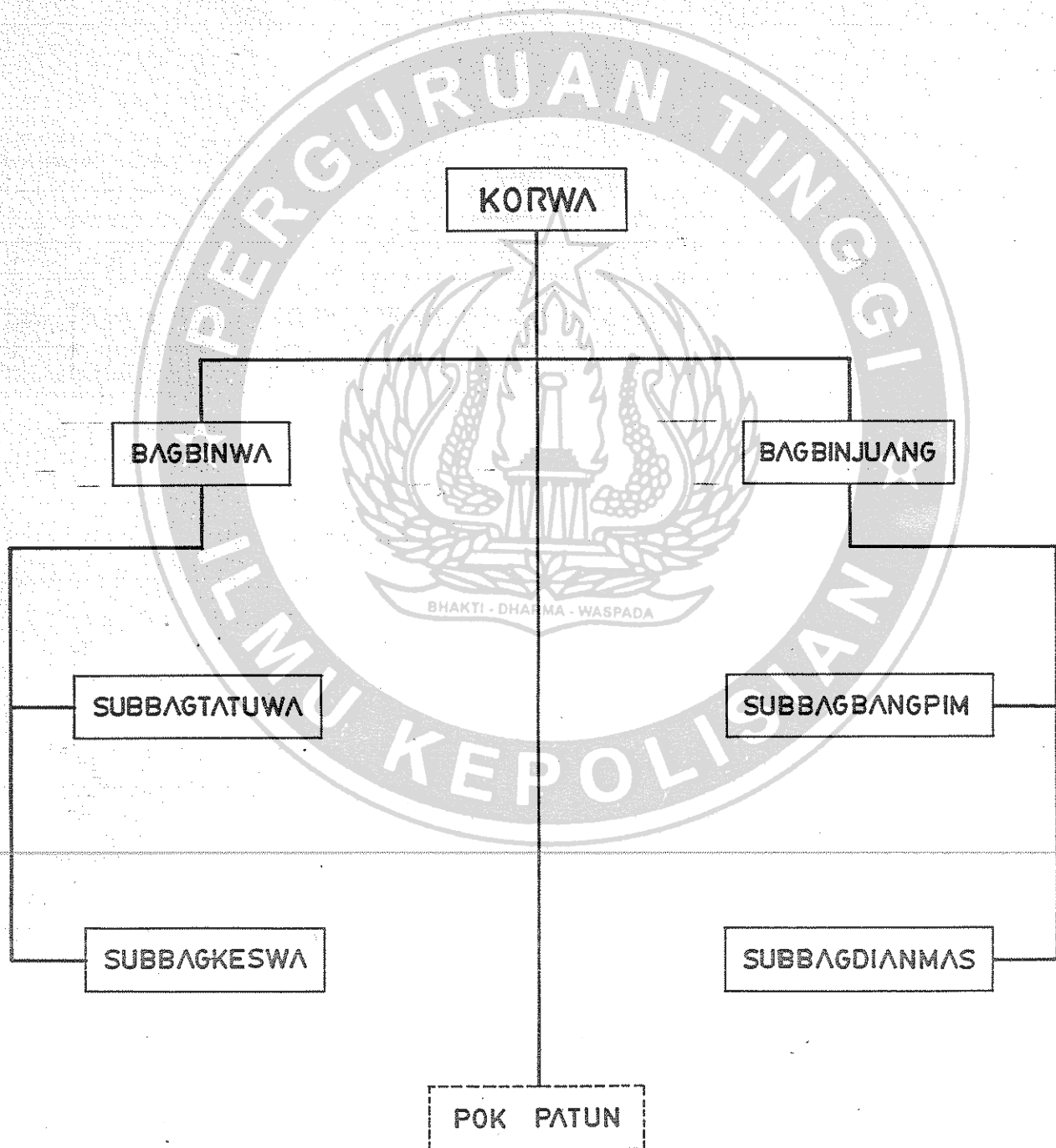
STRUKTUR ORGANISASI SET P.T.I.K.



STRUKTUR ORGANISASI OPSJARLAT



STRUKTUR ORGANISASI KORWA



BAB. III. TELAHAH DAN KESIMPULAN SURVEY.

3.1. Teknik dan Methoda Survey.

Maksud dan tujuan survai adalah untuk mengumpulkan data-data maupun fakta-fakta (baik yang bersifat kualitatif, maupun yang kuantitatif), yang berkaitan dengan masalah perencanaan Perguruan Tinggi, khususnya perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Sebelum melakukan survey, terlebih dahulu dipersiapkan hal-hal yang dapat mendukung kegiatan survey, yaitu dengan melakukan study perpustakaan mengenai permasalahan yang memengaruhi perencanaan kampus (Campus Planing). berdasarkan hasil penilikan/study pustaka, maka ditentukan sasaran survey dan methoda survey yang akan dilakukan.

3.1.1. Study Literatur.

Study Literatur/pustaka dimaksudkan untuk dapat mendukung kegiatan survey sehingga akan diketahui permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi perencanaan bangunan PTIK.

3.1.2. Telaah Banding.

Dimaksudkan untuk dapat mengetahui ciri -ciri khas suatu gubahan bentuk bangunan kepolisian sehingga akan dapat mendukung perencanaan secara visual bangunan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

3.1.3. Wawancara.

Dilakukan dengan fihak-fihak pemakai dan pengelola bangunan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dimana akan dapat diketahui hambatan-hambatan, ketentuan-ketentuan

maupun fungsi-fungsi yang sebenarnya dari suatu massa atau ruang yang ada.

3.1.4. Tinjauan Lokasi.

Dilakukan dengan pengamatan secara visual dan merekam keadaan lokasi tapak dan sekitarnya dengan photo.

3.2. Data Survey.

Dimana dilakukan pengumpulan data-data yang bersifat umum dan data-data khusus untuk membuat perencanaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

3.2.1. Data dari Literatur dan Survey Lapangan.

Menurut Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/09/X/1984, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengemban tugas - tugas yang memungkinkan PTIK berperan besar dalam kanvas pengabdian Polri. Secara garis besar pengembangan tugas & peranan PTIK tersebut meliputi :

1. Pengembangan pada jenis pendidikan tinggi dengan adanya Fakultas Ilmu Kepolisian (FIK).
2. PTIK mempunyai tugas dan peranan yang baru sebagai lembaga pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yaitu adanya Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK).
3. PTIK mempunyai Laboratorium Penelitian Kriminalistik & Teknologi Kepolisian (LABLITISTEK), yang juga menjadi bagian dari PPITK.
4. Lembaga pengajaran bahasa juga merupakan bagian dari pada PTIK, yang dapat digunakan bagi Polri secara

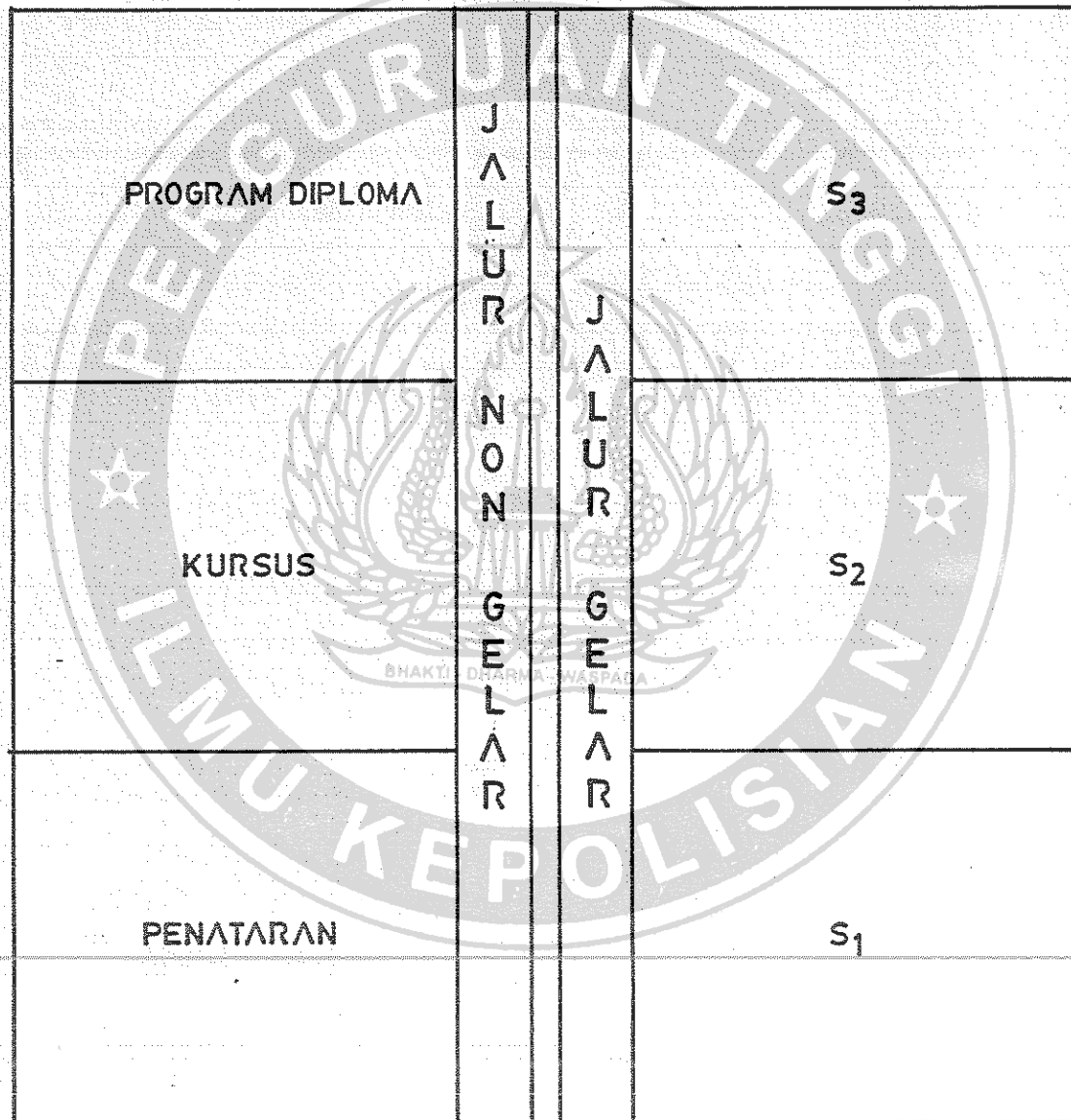
keseluruhan.

5. Perpustakaan PTIK sebagai perpustakaan Polri.

Dalam struktur organisasi baru, pendidikan di PTIK lebih mengembang lagi. Disamping program gelar akan di selenggarakan program non gelar. Dalam program gelar ter dapat jalur S_1 , S_2 , dan S_3 . Sedangkan dalam program non gelar terdapat bermacam-macam kursus, penataran dan program diploma (gambar 1).



gambar. 1



3.2.2. Data yang Berhubungan Dengan Tapak.

- Keadaan Topografi.

Pada dasarnya wilayah DKI Jakarta dikategori kan sebagai daerah datar. Ketinggian tanah dari pantai sampai kebanjir kanal hanya berkisar antara 0 - 10 meter diatas muka laut di ukur dari titik 0 Tanjung Priok.

Sedangkan dibanjir kanal sampai batas paling selatan dari wilayah DKI berkisar antara 5 - 50 meter diatas muka laut.

- I k l i m.

Wilayah kecamatan Kebayoran Baru memiliki Ik lim tripis dengan dua sifat musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dalam satu tahun. Musim kemarau berkisar antara bulan april sam pai september, sedangkan musim penghujan ber kisar antara bulan september sampai dengan april.

Tekanan udara rata-rata 1.009,6 milibar de ngan kelembaban rata-rata 77,5 %.

Prosentase penyinaran matahari normal adalah 61,45 % dengan tingkat penguapan rata - rata 2,0 milimeter.

- Curah Hujan.

Curah hujan normal (normal reinfall) untuk wilayah kecamatan Kebayoran Baru adalah 1.696,0 mm/tahun.

Sedangkan curah hujan nyata (actual rainfall) adalah 1.749,6 mm, dengan perbedaan tahunan rata-rata + 53,6.

- Jenis Tanah.

Klasifikasi Global.

Secara keseluruhan Kecamatan Kebayoran Baru memiliki fisiografi (bentuk) wilayah berupa dataran kipas vulkan.

Jenis tanah merupakan asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang bertekstur halus dari bahan induk " tuf vulkan inter medier " dengan drainase sedang.

Klasifikasi Semi Detail.

Asosiasi latosol kemerahan dengan laterit air tanah bertekstur halus yang terbuat dari induk Tuf Andesit.

- G e o l o g i.

Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru dibagian barat (sekitar sungai Grogol) secara geologi terdiri atas alluvium sungai dengan komponen penyusun berupa :

Bongkahan batu andesit basalt lepas, dengan kekuatan tinggi, daya dukung kecil hingga sedang.

- H i d r o l o g i.

Kecamatan Kebayoran Baru dilalui kontour muka fieszomatrik untuk kelompok akifier yang

terdapat pada kedalaman antara 20 - 40 meter dengan tinggi muka piezometrik sama dengan muka air laut rata-rata.

Sedangkan untuk muka air tanah, wilayah kecamatan Kebayoran Baru dilalui oleh garis kesamaan kedalaman muka air tanah, yaitu 7,5 meter sampai 10 meter.

- Data Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Jakarta Selatan (1985 - 2005).

Lihat Lampiran. .

- Data Rencana Bagian Wilayah Kota Tahun 2005 (kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan)

Lihat Lampiran. .

3.3. A n a l i s a.

Tujuan dari analisa hasil survey adalah untuk persiapan dalam penyusunan program perencanaan.

Teknik analisa yang dipakai bertitik tolak pada " Lima Langkah " dalam programming, dengan memperhatikan Empat Faktor sebagai pertimbangan.

Kelima langkah dalam programming tersebut adalah sbb :

- Tentukan goal/tujuan.
- Kumpulkan dan analisa fakta-fakta.
- Gali dan uji konsep-konsep.
- Tetapkan kebutuhan-kebutuhan.
- Nyatakan permasalahannya.

Empat faktor sebagai pertimbangan, adalah :

- F u n g s i.

- B e n t u k .
- E k o n o m i .
- W a k t u .

	FUNGSI	BENTUK	EKONOMI	WAKTU
T U J U A N	<ul style="list-style-type: none"> - Menyimpan & merawat arsip - arsip PTIK. - Pusat sum ber informa si yang me nunjang pro ses belajar mengajar. - Melayani ke butuhan se luruh Perwi ra Mahasis wa dan staf PTIK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai de ngan fungsi dan kegiat an didalam bangunan Ge dung Utama. - Selaras de ngan pola bentuk di sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaat kan dana yang ter sedia se bagi bia ya awal secara op timal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan da pat beradap tasi dengan lingkungan- nya untuk saat seka rang dan masa yang akan datang - Merupakan - bangunan permanen. - Proyeksi waktu sam pai tahun 2000.

<ul style="list-style-type: none"> - Struktur or ganisasi Ge dung Utama (menentukan hubungan ru 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan- yang ada di sekitar ta pak. - Lokasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana yang tersedia - merupakan- anggaran - dari Mabes 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan- bangunan un tuk jangka panjang.
--	---	---	---

	FUNGSI	BENTUK	EKONOMI	WAKTU
F A K T A	<p>ruang).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan da lam Gedung Utama (me nentukan hu bungan ru ang). - Jumlah pema kai. - Tersedianya sarana uti litas. 	<p>kondisi ta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola sirku lasi dalam kampus. 	Polri.	
K O N S E P	<ul style="list-style-type: none"> - Mendekatkan Gedung Uta ma dengan pemakai. - Sentral ke giatan (ad ministrasi, pengelolaan dan pengem- bangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai land mark buil ding dan pu sat orienta si dalam kampus PTIK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendali an biaya awal de ngan pemi lihan sis tem struk tur dan bahan yang sesuai/ te pat. - Biaya ope rasional & 	<ul style="list-style-type: none"> - Fleksibili- tas bangun an dengan pemanfaatan semaksimal- mungkin.

	FUNGSI	BENTUK	EKONOMI	WAKTU
K O N S E P			perawatan- sekecil - mungkin (pemecahan dalam disa in secara efisien).	

K E B U T U H A N	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang-ruang yang sesuai dengan kebutuhan serta kelengkapan sarana yang dapat menunjang kegiatan secara efisien dan efektif. - Pengelompokan ruang berdasarkan fungsi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem struktur dan penggunaan bahan yang sesuai dengan fungsi. - Penyesuaian dengan pola dilingkungan sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya awal yang memadai untuk dana pembangunan. - Biaya rutin untuk dana operasional & perawatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan sistem struktur secara tepat sehingga memudahkan & mempercepat waktu pelaksanaan, juga pemilihan bahan.
---	---	---	--	---

	FUNGSI	BENTUK	EKONOMI	WAKTU
	Kegiatan : * Administra si. * Pelayanan. * Pengelola an. * Rengembang an. * Penelitian.			

P E R M A S A L A H A N	- Koordinasi - fungsi yang berbeda-beda tetapi sa ling berkait an.	- Perbedaan an tara pola ben tuk dan massa bangunan yang ada disekitar site, dengan pola bentuk rancangan di sain.	- Kemungkin an terjadi inflansi. - Kebijaksa naan ter hadap pe ngendali biaya a wal serta pengaruh nya pada bentuk & pelaksana an disain	- Kaitan anta ra penampil an dengan perubahan / perkembang an pada sa at sekarang dan masa yang akan datang.
--	---	--	---	---

3.3.1. Analisa Tapak dan Lingkungan.

Analisa tapak bertujuan menggali potensi - potensi yang ada untuk kemudian dikembangkan dalam disain, serta mengetahui segala kekurangan yang ada. Analisa yang dilakukan secara seksama dan terperinci, akan memudahkan proses sintesa yang berupa pendekatan perancangan (konsep) menuju perwujudan disain yang optimal. Analisa tapak yang dilakukan meliputi :

- Keadaan topografi.
- Kontekstual lingkungan.
- Pencapaian (Aksesibilitas).
- Orientasi matahari.
- Orientasi angin.
- Peraturan bangunan setempat.
- Kebisingan suara (noise).
- Sarana dan prasarana yang ada.
- Serta faktor - faktor lainnya baik fisik maupun non-fisik.

Sedangkan analisa lingkungan bertujuan untuk menggambarkan lingkungan sekitar tapak maupun diluar perbatasan tapak yang dipengaruhi oleh skala proyek, yang meliputi :

- Tata guna yang ada dan yang diproyeksikan.
- Tata wilayah.
- Lingkungan fisik didaerah sekitarnya.
- Lingkungan sosial didaerah sekitarnya.
- Dan kondisi-kondisi lain yang mungkin akan menimbulkan suatu dampak pada proyek.

3.4. Kesimpulan Survey.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan baik pengamatan dilapangan (keadaan tapak dan lingkungan sekitarnya),maupun study kepustakaan tentang berbagai masalah dalam perencanaan kampus ; maka dapat diambil kesimpulan yang sekaligus merupakan gambaran permasalahan dalam perencanaan kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (dalam hal ini adalah Gedung Utama), yaitu :

1. Yang menyangkut ketentuan dalam perencanaan sebuah Gedung Utama,khususnya untuk sebuah kampus.
 - Masalah pengelompokan fungsi dan kegiatan di dalam Gedung Utama,yang mempengaruhi kelenturan (fleksibilitas) ruang dan sistem struktur bangunan.
2. Kaitan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK), dengan Gedung Utama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
 - Masalah pencapaian untuk orang (staf dan para tamu) kendaraan maupun barang kedalam bangunan Gedung Utama mengingat lokasi tapak untuk gedung utama, serta pola sirkulasi didalam site PTIK.
 - Masalah keselarasan dengan bangunan disekitarnya,karena pola pembentukan massa bangunan dilingkungan sekitarnya sudah demikian jelas dan kuat.
 - Masalah kondisi tapak yang spesifik (dilingkari oleh jalan raya) sehingga perlu pemecahan yang khusus pula, terutama dari segi pencapaian dan orientasi bangunan.

BAB. IV. PROGRAM PERENCANAAN.

4.1. Program Pengembangan Non Fisik.

4.1.1. M a h a s i s w a.

Sesuai dengan program pendidikan yang ada maupun program pengembangan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, maka akan didapat program - program sbb :

- Program Gelar.

- Strata 1 (S₁).
- Strata 2 (S₂).
- Strata 3 (S₃).

- Program Non Gelar.

- D i p l o m a.
- K u r s u s dan
- P e n a t a r a n.

Sedangkan para Perwira Mahasiswa (PAMA) yang ada dilingkungan PTIK sekarang ini adalah sekitar 200 Orang.

4.1.2. Tenaga Pengajar.

Jumlah tenaga pengajar yang ada di lingkungan PTIK pada saat ini diperkirakan sekitar 46 Orang. Dengan klasifikasi jabatan sebagai berikut :

- Guru Besar : 4 Orang.
- Guru Besar Sementara : 5 Orang.
- Lektor Kepala : 22 Orang.
- L e k t o r : 12 Orang.
- Lektor Madya : 1 Orang.
- Instruktur Utama : 2 Orang.

4.1.3. Sistem Pendidikan.

4.1.3.1. Jenjang Pendidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka proses pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di atur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/1979 tentang jenjang program pendidikan Tinggi dan program Akta Pengajaran dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka pendidikan tinggi dibidang Ilmu Kepolisian dibagi dalam dua jalur yaitu :

- a. Jalur Gelar, terdiri dari tiga jenjang yaitu :
 1. Sarjana (Program S - 1).
 2. Pasca Sarjana (Program S - 2).
 3. Doktor (Program S - 3).
- b. Jalur Non Gelar, terdiri dari program diploma, Akta dan sejenisnya (dalam perencanaan).
- c. PTIK berkewajiban menyelenggarakan Program S_1 yang terdapat dalam jalur gelar dan hanya dapat menyelenggarakan program-program :
 1. S_2 dan S_3 yang terdapat dalam jalur Gelar.
 2. Jalur Non Gelar.

Apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan minimal penyelenggaraan program-program tersebut.

- d. Tujuan khusus program-program jalur gelar.

Disamping tujuan umum dan tujuan pokok seperti tersebut dalam butir 1 a dan b, program-program jalur gelar mempunyai tujuan-tujuan tambahan sebagai berikut :

1. Program Sarjana (S_1).

Program pendidikan sarjana adalah program yang

bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang :

- a. Mampu mengenali, mengamati dan melakukan pendekatan dan penataran permasalahan dengan Ilmu Kepolisian.
- b. Mempunyai bekal dasar ilmu pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya.
- c. Memiliki dasar pengetahuan umum yang cukup untuk dapat memperkuat pandangannya.

2. Program Pasca Sarjana (S₂).

Program pendidikan pasca sarjana adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang :

- a. Mampu mengenali, mengamati, melakukan pendekatan & penataran serta mencari pemecahan masalah-masalah dalam ilmu kepolisian dibidang pengkhususannya.
- b. Mempunyai kemampuan dan keahlian yang cukup di bidang ilmunya untuk menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi pengajar pada perguruan tinggi.
- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan penelitian terbatas, untuk mengembangkan bidang ilmunya.
- d. Mempunyai pandangan yang cukup luas berdasarkan latar belakang pengetahuannya mengenai bidang-bidang ilmu lainnya.

3. Program Doktor (S₃).

Program pendidikan Doktor adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang :

- a. Mempunyai pengetahuan yang mendalam dan me

nguasai ilmu kepolisian dibidang pengkhususannya.

b. Mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang ilmunya untuk menjabat sebagai pengajar pada perguruan tinggi atau memegang jabatan-jabatan lainnya sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya dan tingkat pendidikannya.

c. Mampu mengembangkan perbendaharaan ilmu pengetahuannya dalam bidangnya, melalui penelitian-penelitian mandiri yang mendalam dan cukup luas ruang lingkupnya.

4.1.3.2. Kurikulum.

Struktur Kurikulum Program S₁ disusun berdasarkan strategi dasar pendidikan Polri, yaitu kurikulum yang mendukung jenjang spesialisasi keahlian maupun taraf pendidikan lanjutan perwira.

Paket Kurikulum Program S₁ PTIK adalah sebagai berikut: *)

I. SEMESTER I :

1. Mata Kuliah Wajib :

No.	Mata-Kuliah.	Waktu/jam
1.	Manajemen Kepolisian	(36-72)
2.	Kriminalistik	(36-72)
3.	Kriminologi	(36-72)
4.	Statistika	(36-72)
5.	Metodologi dan Penelitian	(36-72)
6.	Manajemen Informasi Kepolisian	(36-72)
7.	Bahasa Inggris	(36-72)

*) Paket Kurikulum tahun ajaran 1985-1986.

2. Mata Kuliah Pilihan :

No. Mata - Kuliah	Waktu/jam
1. Pembuktian dan Prosedur Peradilan.	(36-72)
2. Pathologi Forensik.	(36-72)
3. Psikologi Forensik.	(36-72)
4. Pengamanan Industri.	(36-72)
5. Pengamanan Industri.	(36-72)
6. Pemeriksaan Dokumen.	(36-72)
7. Hukum Pidana Ekonomi.	(36-72)
8. Manajemen Personil Kepolisian.	(36-72)
9. Manajemen Lalu - Lintas.	(36-72)
10. Sosiologi Hukum.	(36-72)
11. Perencanaan dan Anggaran Kepolisian.	(36-72)
12. Kimia Forensik.	(36-72)

II. SEMESTER II :

I. Mata Kuliah Wajib :

No. Mata - Kuliah	Waktu/jam
1. Falsafah dan Etika Kepolisian.	(36-72)
2. Perbandingan Sistem Kepolisian.	(36-72)
3. Anthropologi Hukum.	(36-72)
4. Hukum Kepolisian.	(36-72)
5. Polisi dan Masyarakat.	(36-72)
6. Manajemen Operasi Kepolisian.	(36-72)
7. Bahasa Inggris.	(36-72)

2. Mata Kuliah Pilihan :

No. Mata - Kuliah	Waktu/jam
1. Manajemen Logistik	(36-72)

2. Hubungan Antar Kolektifitas. (36-72)
3. Sosiologi Agama. (36-72)
4. Penangkapan, pemeriksaan & Penyitaan. (36-72)
5. Kebakaran/pembakaran. (36-72)
6. B a l i s t i k. (36-72)
7. Pengendalian Deliquensi Anak. (36-72)
8. S t a t i s t i k a. (36-72)
9. Intelijen Korupsi. (36-72)
10. Ilmu Komputer. (36-72)
11. Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. (36-72)
12. Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian. (36-72)
13. Intelijen Ekonomi. (36-72)
14. Pendekatan Kesisteman. (36-72)

III. KEGIATAN WAJIB SEMESTER I DAN II.

1. Seminar Ilmu Kepolisian.
2. Penulisan Skripsi.
3. Bela Diri dan Menembak.
4. Latihan Posko.
5. Widya Wisata.

4.1.3.3. Sistem Semester dan Kredit.

Pengertian.

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban study mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan diukur/dinyatakan dalam satuan waktu.
- b. Semester adalah masa belajar terkecil untuk

menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam lembaga pendidikan. Satu Semester terdiri dari : 18 minggu kerja.

c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah angka yang menyatakan waktu kegiatan belajar mengajar dalam 1 (satu) semester.

d. Satuan-satuan Kredit Semester (SKS) terdiri dari 3 (tiga) jam belajar setiap minggu untuk satu mata kuliah.

1 (satu) jam belajar ini terdiri atas :

1). 1 (satu) jam tatap muka dengan pengajar di ruang kuliah.

2). 2 (dua) jam belajar sendiri (mempelajari-bahan pustaka).

e. Tiap mata kuliah di PTIK dinilai dengan 2 (dua) SKS, sehingga untuk tiap mata kuliah Perwira mahasiswa dituntut belajar selama 6 (enam) jam seminggu; berarti 108 (seratus delapan) jam untuk 1 (satu) Semester.

Selama jangka waktu 1 (satu) Semester, Perwira Mahasiswa mengumpulkan 18 (delapan belas) SKS atau minimal 16 (enam belas) SKS dengan catatan mata kuliah wajib seluruhnya telah memperoleh angka kredit. Angka kredit diperoleh apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam mata kuliah yang bersangkutan.

4.1.4. Materi Pendidikan.

Penggolongan mata kuliah yang diberikan di PTIK , dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok mata kuliah yaitu :

- a. Kelompok mata kuliah wajib, yakni mata kuliah yang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh Perwira Mahasiswa.
- b. Kelompok mata kuliah pilihan, yakni mata kuliah yang ditawarkan untuk dipilih oleh para Perwira Mahasiswa berdasarkan keinginan sendiri.

Mata kuliah wajib diberikan karena dianggap wajib diketahui oleh sekalian perwira Polri lulusan PTIK, didalam melakukan pekerjaan kepolisian pada jabatan tertentu. Mata kuliah pilihan diberikan untuk memanfaatkan kemungkinan :

- a. Memperdalam pengetahuan keahlian.
- b. Memperdalam cakrawala pengetahuan bagi Perwira Mahasiswa.
- c. Mempelajari suatu bidang pengetahuan keahlian tambahan.
- d. Mengusahakan penguasaan suatu bahasa asing tambahan.
- e. Mempelajari matematika dan/atau statistika, atau
- f. Mempelajari ilmu pendidikan dan cara-cara mengajar.

Mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh Perwira mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen Kepolisian.
- b. Kriminalistik.
- c. Kriminologi.
- d. Statistika I.
- e. Metodologi Penelitian.
- f. Manajemen Informasi Kepolisian.

- g. Bahasa Inggris.
- h. Falsafah dan Etika Kepolisian.
- i. Perbandingan Sistem Kepolisian.
- j. Anthropologi Hukum.
- k. Hukum Kepolisian.
- l. Polisi dan Masyarakat.
- m. Manajemen Operasi Kepolisian.
- n. Penulisan Skripsi.
- o. Seminar Kepolisian.
- p. Latihan Bela Diri dan Menembak.

Paket mata kuliah disusun untuk masa 1 (satu) tahun, sesuai dengan lama jangka waktu pendidikan, dan dibagi menjadi 2 (dua) semester.

Kegiatan Pra kuliah diberikan sebagai kursus penyegaran bagi Perwira Mahasiswa yang baru akan memulai pendidikan di PTIK, selama 1 (satu) bulan meliputi pengetahuan- pengetahuan :

- a. Pengantar Ilmu Hukum selama : 27 jam pelajaran.
- b. Pengantar Ilmu Kepolisian selama : 27 jam Pelajaran.
- c. Pengantar Ilmu Pengetahuan selama : 27 jam pelajaran.
- d. Mengarang dan Berpidato selama : 27 jam pelajaran.
- e. Pengantar Administrasi Kepolisian. selama : 27 jam pelajaran.

Tujuan daripada kegiatan Pra Kuliah adalah :

- a. Memberikan garis awal yang sama kepada setiap Perwira Mahasiswa.
- b. Memberikan kesempatan kepada Perwira Mahasiswa untuk

masuk kedalam suasana belajar yang intensif mandiri.

- c. Mempersiapkan para mahasiswa untuk menghadapi kuliah - kuliah selanjutnya.

4.1.5. Methoda Pengajaran.

Kegiatan-kegiatan pendidikan mengutamakan usaha menggerakkan mahasiswa untuk senantiasa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pengkajian yang diharapkan dapat menambah kemampuan mereka masing-masing sebagai calon sarjana dalam bidang ilmu kepolisian.

Para tenaga pengajar diharapkan menggugah perhatian mahasiswa, memberi petunjuk kepada mereka dalam usaha belajar, dan senantiasa merangsang kegiatan-kegiatan belajar ini agar masa belajar di PTIK yang sebenarnya sangat terbatas dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa dengan memperoleh hasil-hasil belajar yang sebanyak-banyaknya.

Usaha-usaha itu dilakukan dengan jalan :

1. Menanamkan nilai-nilai dan aturan yang harus dijadikan pedoman bertindak.
2. Membangkitkan rasa ingin tahu terhadap masalah-masalah kepolisian yang belum diketahui, membangkitkan minat belajar mereka.
3. Memperkenalkan kenyataan-kenyataan empirik berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian di Indonesia.
4. Memperkenalkan teori-teori ilmiah dalam ilmu kepolisian.
5. Memperkenalkan kenyataan-kenyataan empirik berkenaan dengan kepolisian diberbagai negara asing sebagai bahan pembanding.

6. Membahas kasus-kasus pilihan dalam lapangan kepolisian.
7. Membiasakan mahasiswa berpikir, berbicara dan menulis secara teratur.
8. Membiasakan mahasiswa memelihara kesehatan jasmani dan keterampilan gerak mereka.
9. Membiasakan mahasiswa bertukar pikiran menurut cara-cara yang lazim dikalangan ahli pengetahuan.

4.1.6. Organisasi dan Pengelolaan.

Pengembangan pendidikan sejalan dengan perkembangan masalah kepolisian menuntut peranan PTIK untuk lebih meningkat lagi. Tuntutan demikian menghendaki langkah-langkah pemantapan dalam berbagai segi oleh PTIK. PTIK adalah Badan Pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan keahlian Perwira Polri serta pengkajian, penelitian dan penerbitan pustaka dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian dimana tugas pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian diwadahi dalam lima bidang pengembangan ilmu serta satu laboratorium Kriminalistik dan Teknologi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penelitian seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, penterjemahan penerbitan maupun penemuan - penemuan metoda dan teknologi kepolisian. Hasilnya dimaksudkan untuk menunjang tugas-tugas kepolisian terutama untuk pengembangan keahlian - keahlian dalam bidang ilmu dan teknologi kepolisian. Sehingga diadakan pendidikan gelar dan non-gelar di PTIK.

4.2. Program Pengembangan Fisik.

4.2.1. Program Kegiatan dan Ruang yang Dibutuhkan.

- Lingkup dan Tugas.

GUBERNUR PTIK.

Gub PTIK adalah pembantu dan pelaksana Kapolri dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan pengembangan keahlian perwira serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

SET PTIK.

Set PTIK adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada PTIK yang bertugas membantu Gub PTIK dalam memimpin pelaksanaan tugas PTIK khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan lembaga, koordinasi dan pengawasan staf serta pelayanan dalam lingkungan PTIK.

FAKULTAS ILMU KEPOLISIAN.

FIK adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana pada PTIK yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan keahlian perwira Polri, baik dalam jalur gelar maupun non gelar.

PPITK.

PPITK adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana pada PTIK yang bertugas menyelenggarakan pengkajian, penelitian, penterjemahan dan penerbitan bahan pustaka dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian di

Indonesia baik untuk kepentingan ilmu maupun sebagai bahan masukan bagi polri.

O P S J A R L A T.

Opsjarlat adalah unsur pelaksana pada PTIK yang bertugas melaksanakan pengajaran dan latihan baik untuk program pendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.

K O R W A.

Korwa adalah unsur pelaksana pada PTIK yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan sikap kejuangan dan ketrampilan bagi perwira mahasiswa sebagai kebulatan dari tujuan pendidikan PTIK.

Dari lingkup dan tugas tersebut dapat ditentukan/dilihat seluruh kegiatan PTIK yang harus ditampung didalam bangunan.

- Ruang yang Dibutuhkan.

- * R.Gubernur PTIK.
- * R.Ses PTIK.
- * R.Bagren.
- * R.Bagpers.
- * R.Bagminu.
- * R.Baglog.
- * R.Denma.
- * R.Dekan FIK.
- * R.Wadekan Fik.
- * R.Set FIK.

- * R.Bag Rendaldik.
- * R.Bag Mindik.
- * R.Bag Evadasi.
- * R.Bag Pustaka.
- * R.Faljuang.
- * R.Depkummas.
- * R.Depjemen.
- * R.Depforensik.
- * R.Depops.
- * R.Lemjarsa.
- * R.Gadik.
- * R.Ka PPITK.
- * R.Waka PPITK.
- * R.Set PPITK.
- * R.Bag Minbang.
- * R.Bag Pujama.
- * R.Biddikum. HARMA - WASPADA
- * R.Bidsos.
- * R.Bidlam.
- * R.Bidbud.
- * R.Bidtecpol.
- * R.Lablitistek.
- * R.Pok Ahli.
- * R.Team Peneliti.
- * R.Ka Opsjarlat.
- * R.Bag Minjarlat.
- * R.Bag Lakjarlat.

- * R.Ka Korwa.
- * R.Bag Minwa.
- * R.Bag Binjuang.
- * R.Pok Patun.

4.2.2. Populasi Kampus.

4.2.2.1. Mahasiswa.

Diperkirakan jumlah Perwira Mahasiswa yang akan dilayani pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ialah sebanyak \pm 200 Orang.

4.2.2.2. Tenaga Pengajar dan Administrasi.

Jumlah tenaga pengajar yang ada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saat ini adalah sebanyak 46 Orang tenaga dosen.

Sedangkan jumlah tenaga administrasi yang ada dilingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ialah sebanyak 473 Orang, dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2005 ialah sebanyak \pm 550 Orang (berdasarkan hasil survey masih terdapat beberapa bagian dari suatu kompartemen yang belum memiliki tenaga pengelolanya).

4.2.3. Standar - Standar Kebutuhan Ruang.

Ialah merupakan suatu pemilihan standar ruang tertentu yang terdapat di PTIK berdasarkan Literatur.

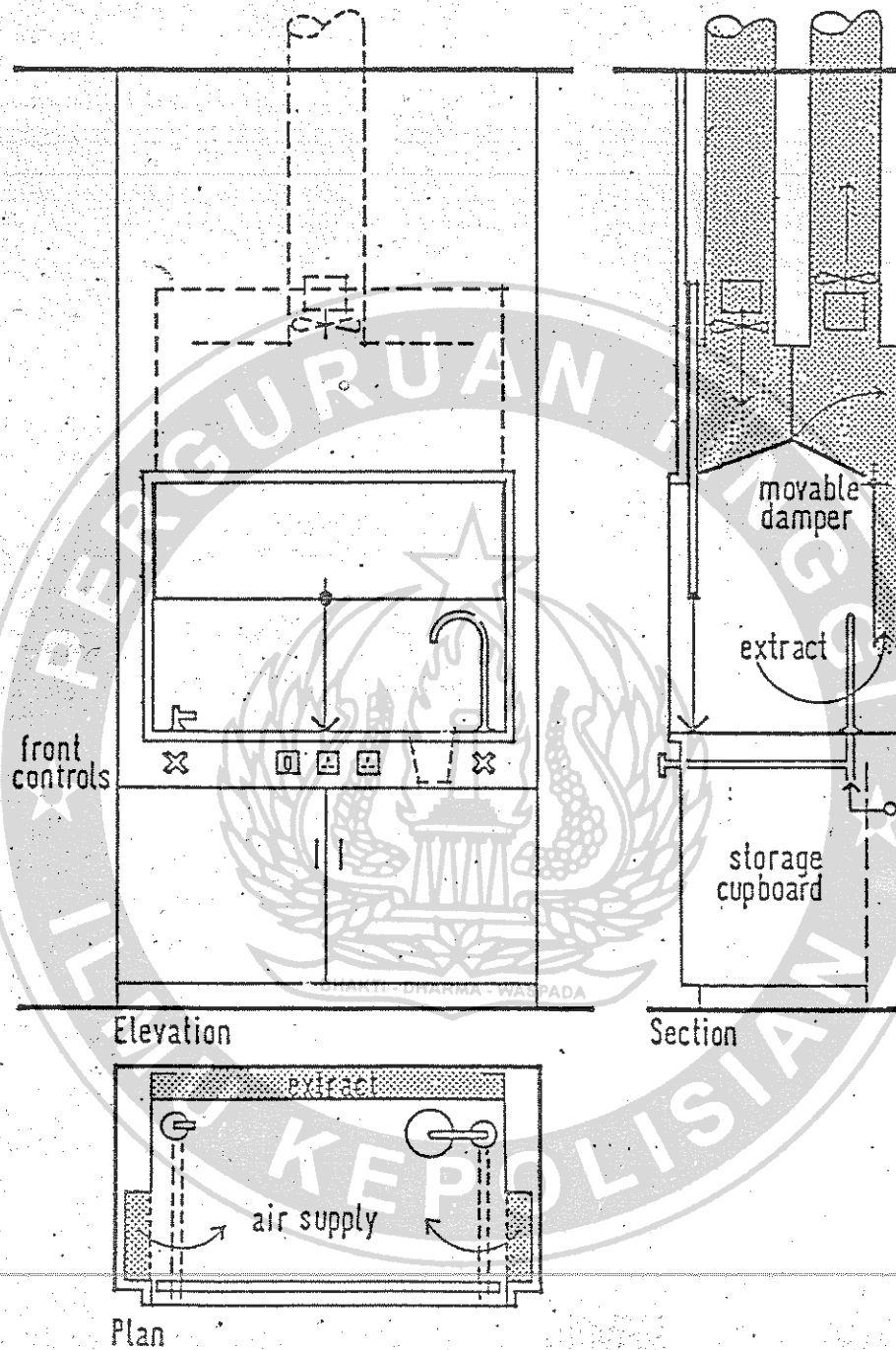


Fig. 3.25 The basic requirements of a laboratory fume cupboard. Each fume cupboard must be separately ventilated. (Reprinted from 'The Design of Polytechnic Institute Buildings', by permission of Unesco. © Unesco 1972)

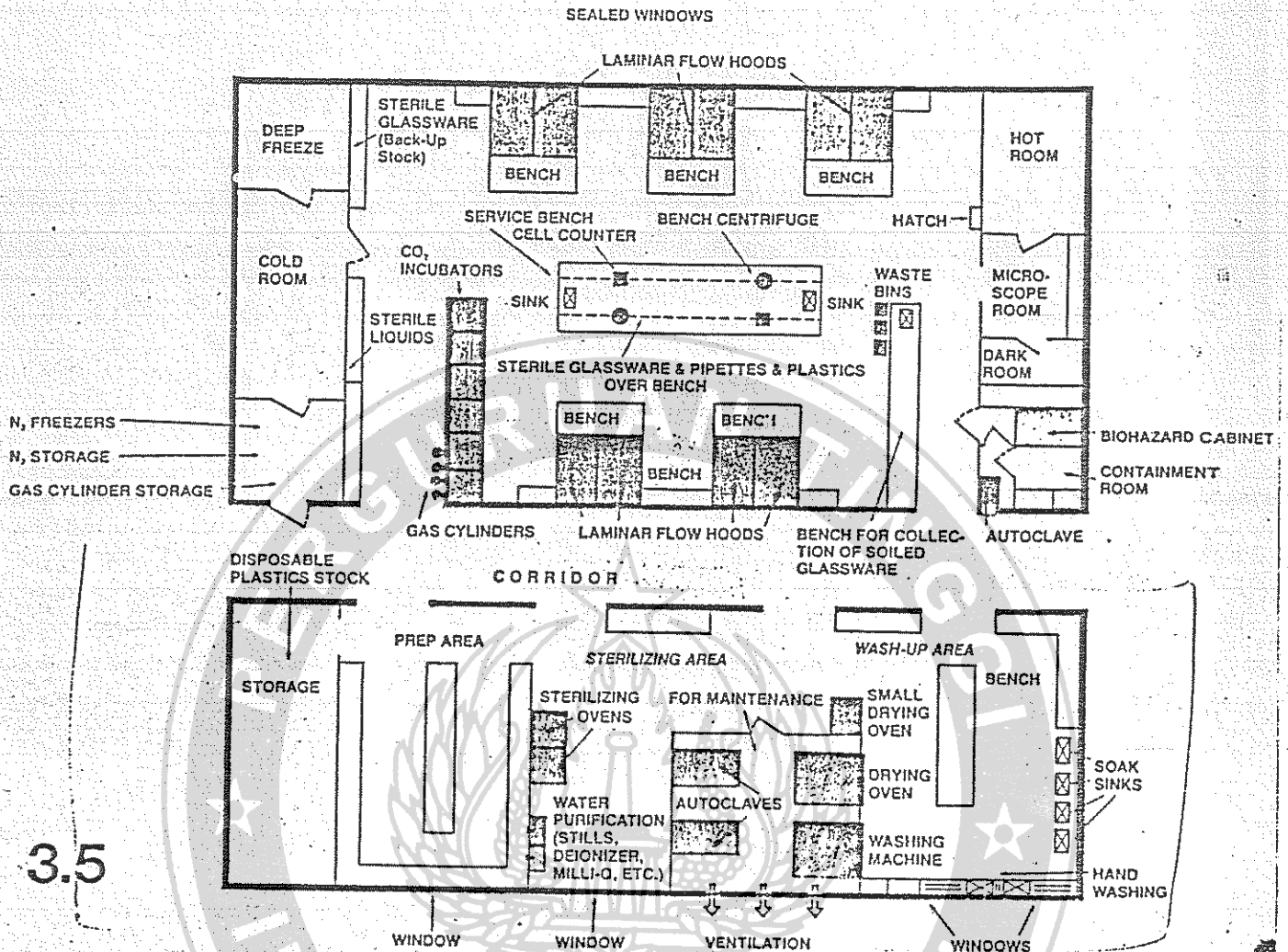


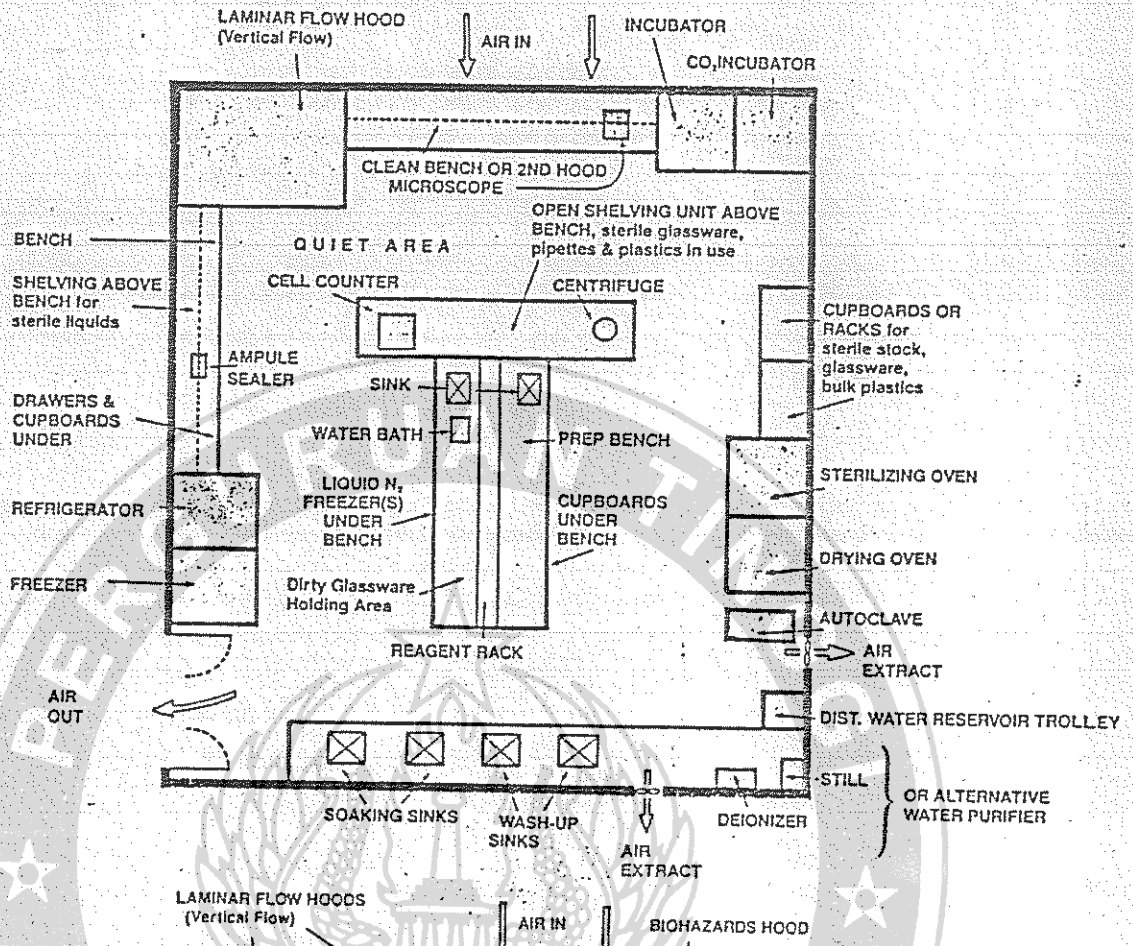
Fig. 3.3. Suggested layout for simple, self-contained tissue culture laboratory for use by two or three persons. Shaded areas represent movable equipment.

Fig. 3.4. Tissue culture laboratory suitable for five or six persons with washing-up and preparation facility located elsewhere. Shaded areas represent movable equipment.

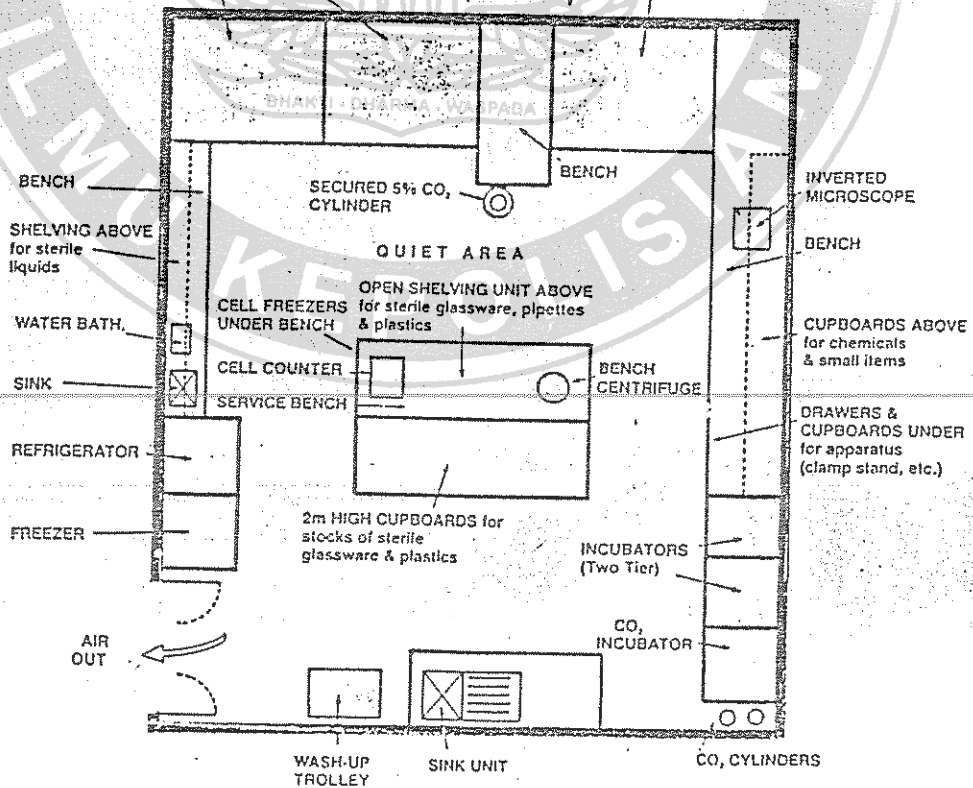
Fig. 3.5. Large scale tissue culture laboratory with adjacent washing up, sterilization, and preparation area. Suitable for 20 to 30 persons. Shaded areas represent equipment as distinct from furniture.

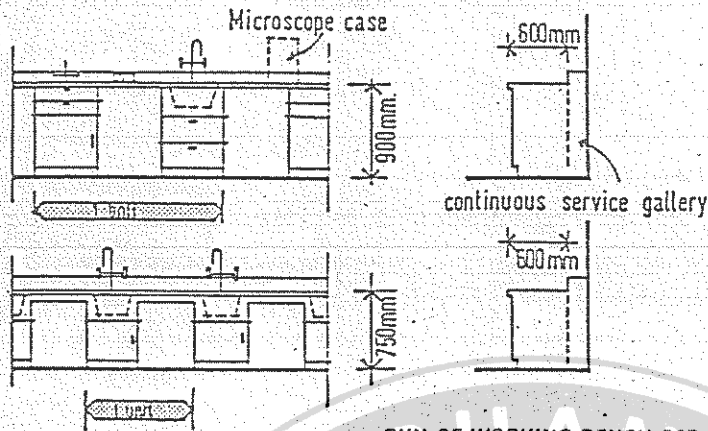
PUANING : BIODIKAN + LEMBU

3.3



3.4

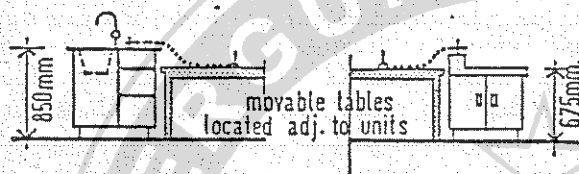




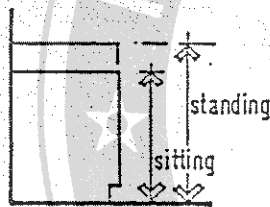
An example of Laboratory benching with storage space included

An alternative to above giving a greater number of places

RUN OF WORKING BENCH PER. STUDENT (SEE TABLE 3.15)

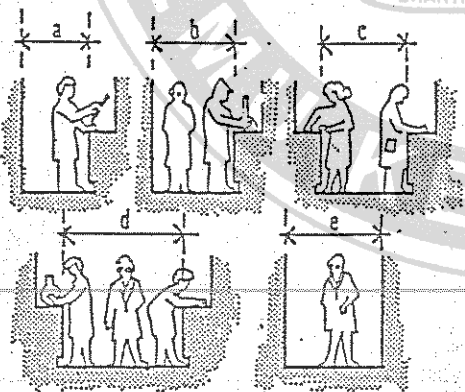


Good degree of flexibility can be gained by using statically located services units in conjunction with movable tables



TYPE	bench height	seat height	min. kneeh' width	min. vert. distance between floor & underbench
Sitting only	700	425	575	650 mm
Sitting and standing-women	850	625	575	800 mm
Sitting and standing-men	900	675	575	850 mm

BHAKTI · DHARMA · WASPADA



Working spaces between benches :

- a. One worker no thro' traffic | 1050 mm.
- b. One worker plus passage way | 1200
- c. Two workers no through traffic | 1350
- d. Two workers plus passage way | 1800
- e. Gangway only no working spaces | 1425

Fig. 3.22 Dimensional data relating to laboratories—working benches
(Reprinted from 'The Design of Polytechnic Institute Buildings', by permission of Unesco. © Unesco 1972)

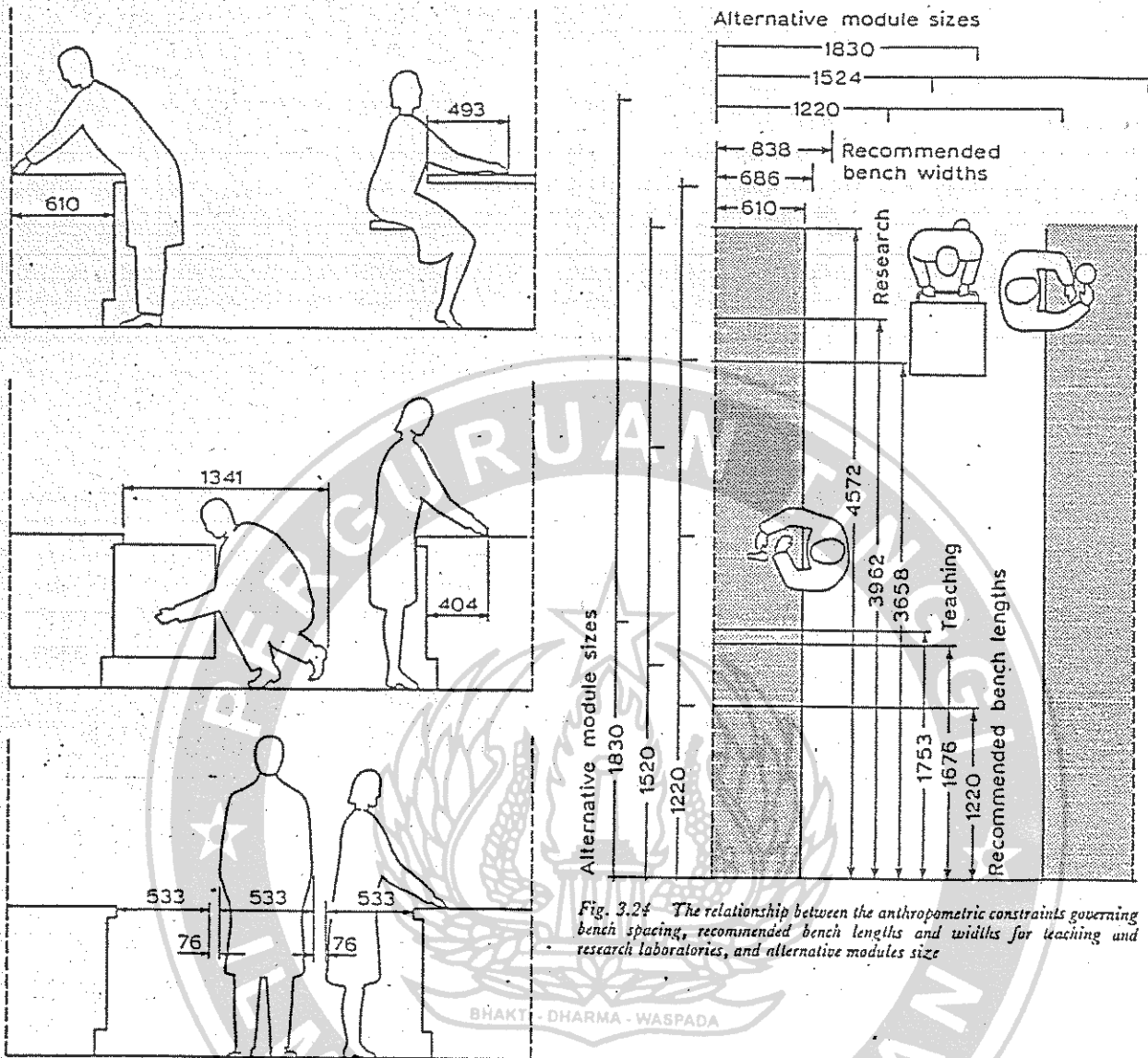
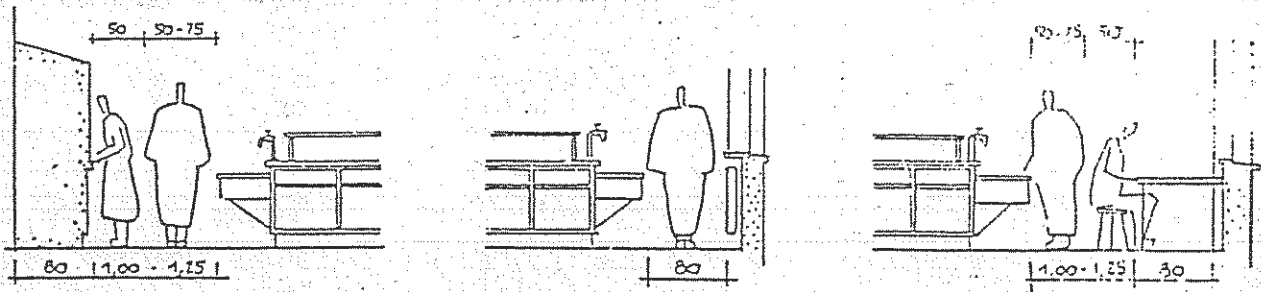


Fig. 3.23 The anthropometric constraints governing the spacing between benches

Fig. 3.24 The relationship between the anthropometric constraints governing bench spacing, recommended bench lengths and widths for teaching and research laboratories, and alternative modules size

Table 3.9 RECOMMENDED BENCH LENGTHS

Scientists		Bench length in feet to give levels of satisfaction between 90 and 99%									
		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Discipline class	High	13.4	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	16.0	17.2	18.5
	Medium	11.4	11.6	11.9	12.1	12.4	12.8	13.5	14.1	14.7	15.4
	Low	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.8	10.4	11.1	11.8	12.4
Assistants		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Discipline class ^o	High	9.3	9.5	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.3	-
	Medium	9.5	9.9	10.3	10.8	11.3	11.7	12.2	12.8	13.9	15.1
	Low	10.1	10.4	10.8	11.1	11.5	11.9	12.2	13.1	16.0	18.5



Figs. 4-6. Width of gangways.

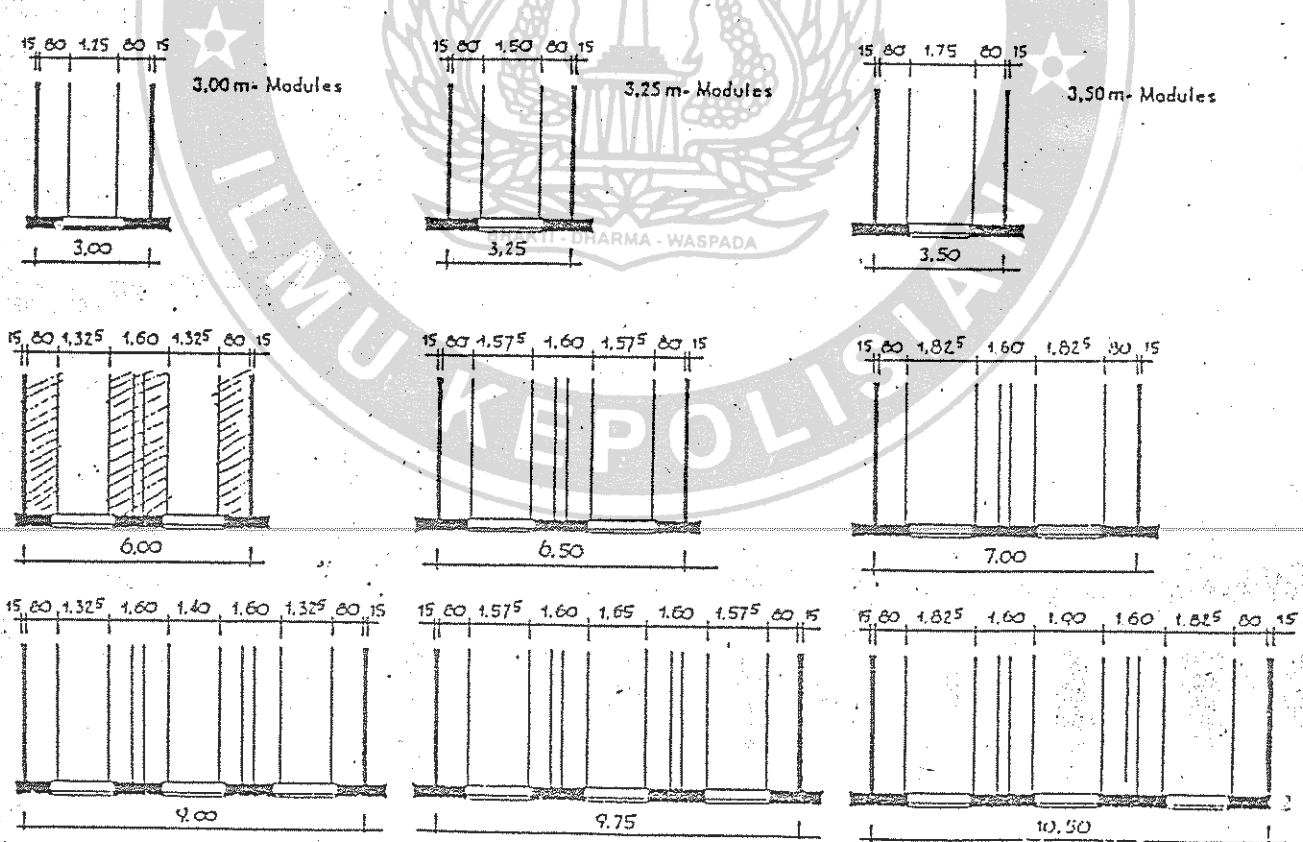
depends on the layout of the benches, disposition of the working areas and the amount of through traffic which may be expected.

A. MODULAR MEASUREMENTS

The bench size and width of gangway determines the size of the module (and the fenestration) on which the building will be designed. Recommended modules for rooms with normal equipment are 3 m; 3.25 m; 3.50 m (see Figs. 7-15). These measurements comply with *DIN 4173* according to which all building measurements should be divisible by 12.5 or 25 cm. Thus the size of the room can be determined by the number of modules, the module being the smallest room unit and larger rooms multiples of this unit. The internal width of rooms is determined by the

number of modules less one half the thickness of both partition walls.

The choice of module depends on the required width of the gangway between benches. In laboratories with few workers a 3 m module is adequate; but in teaching laboratories with long benches and many students to a bench, the resulting increase in traffic in the gangway necessitates a module of 3.25 or 3.50 m if movement is not to be restricted and it must always be remembered that the gangway may assume special importance as an escape route in an emergency. The choice of module may also be governed by economic considerations, for example a room with three windows and a 3.50 module is 1.50 m larger than a similar room with a module of 3 m without providing much additional space for furniture.



Figs. 7-15. Modular measurements—rooms, windows, gangways. Scale 1:200.

Smaller modules can be seen (for example 2.90 m) at the State Chemical Research Institute, Munich (p. 191), or 2.80 m in the central laboratory of Merck A.G. (p. 193) but as a rule such laboratories only accommodate a small staff.

If between double benches a single service table is to be installed the module will be 5.25 m (see Figs. 16, 17). Special rooms or laboratories without the normal furniture can also be designed on the modular system and if two windows are incorporated in one module the size of the room can be varied from $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ modules, etc. (see Fig. 17). The size of the room can also be varied by moving the partition walls between the window mullions in which case the width of the window and the pier becomes the deciding factor in determining the size of the room. In the

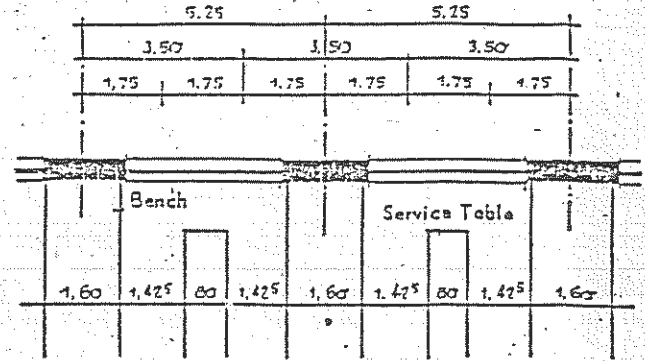


Fig. 16. Modular measurements—benches and service tables.

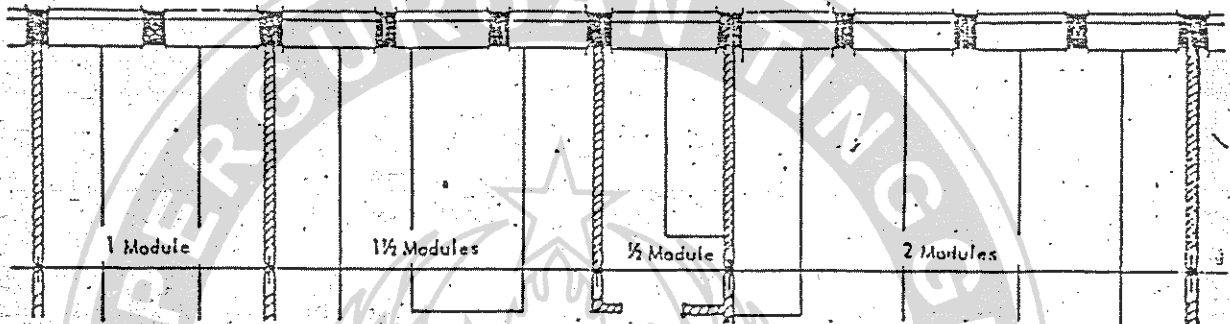


Fig. 17. Half modules.

example (Fig. 18) the width of the window is 1.50 m and equals half a module; by placing the mullions at intervals of 37.5 cm five possible sizes of rooms will be produced for rooms with 1, 2, 3 ... windows.

The fixing of lighting fittings in rooms of different width is governed by fixings at 1.25–1.75–1.25 m. This principle of flexibility is especially suitable for research institutes. In radio-chemical laboratories more space must be allowed between benches than is generally necessary as working with manipulators requires more space.

B. DEPTH OF ROOM

Except in the case of the double sided bench parallel to the window (see Fig. 23) the depth of a room is determined by the furniture, that is by the length of the bench at right angles to the window and the width of the gangway. In the case of the teaching laboratory the depth can only be determined if a fixed length of working bench can be established for the student. In elementary laboratories a working space of 1 m to 1.50 m in length is adequate whilst for an advanced student the minimum length is 1.50 m. Students of inorganic chemistry require less space than a student of organic chemistry in a proportion of 1:1.3.

In industrial, control or research laboratories the depth of a room follows from the area of working surface required and also from the type of work and equipment used. In laboratories with fenestration on

one side only the depth of a room for efficiency should not be less than 8 m. A depth of 7 m may be desirable in order to provide service rooms such as dark rooms, additional rooms or writing rooms (see Figs. 38–41).

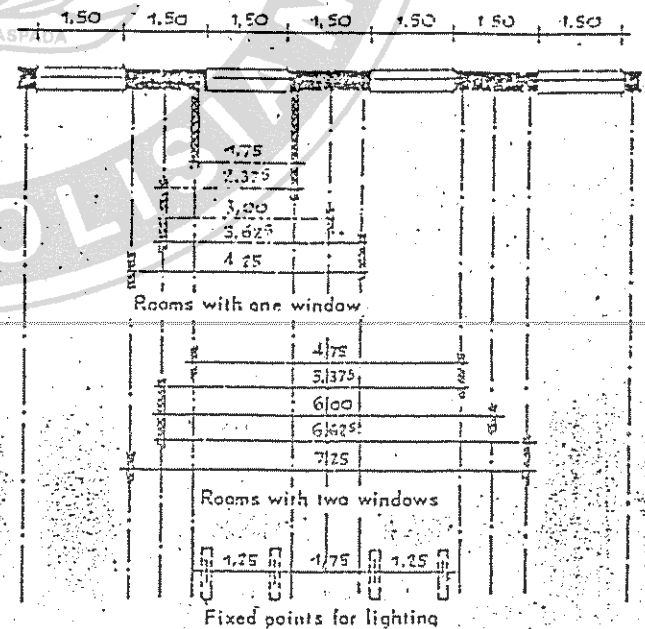
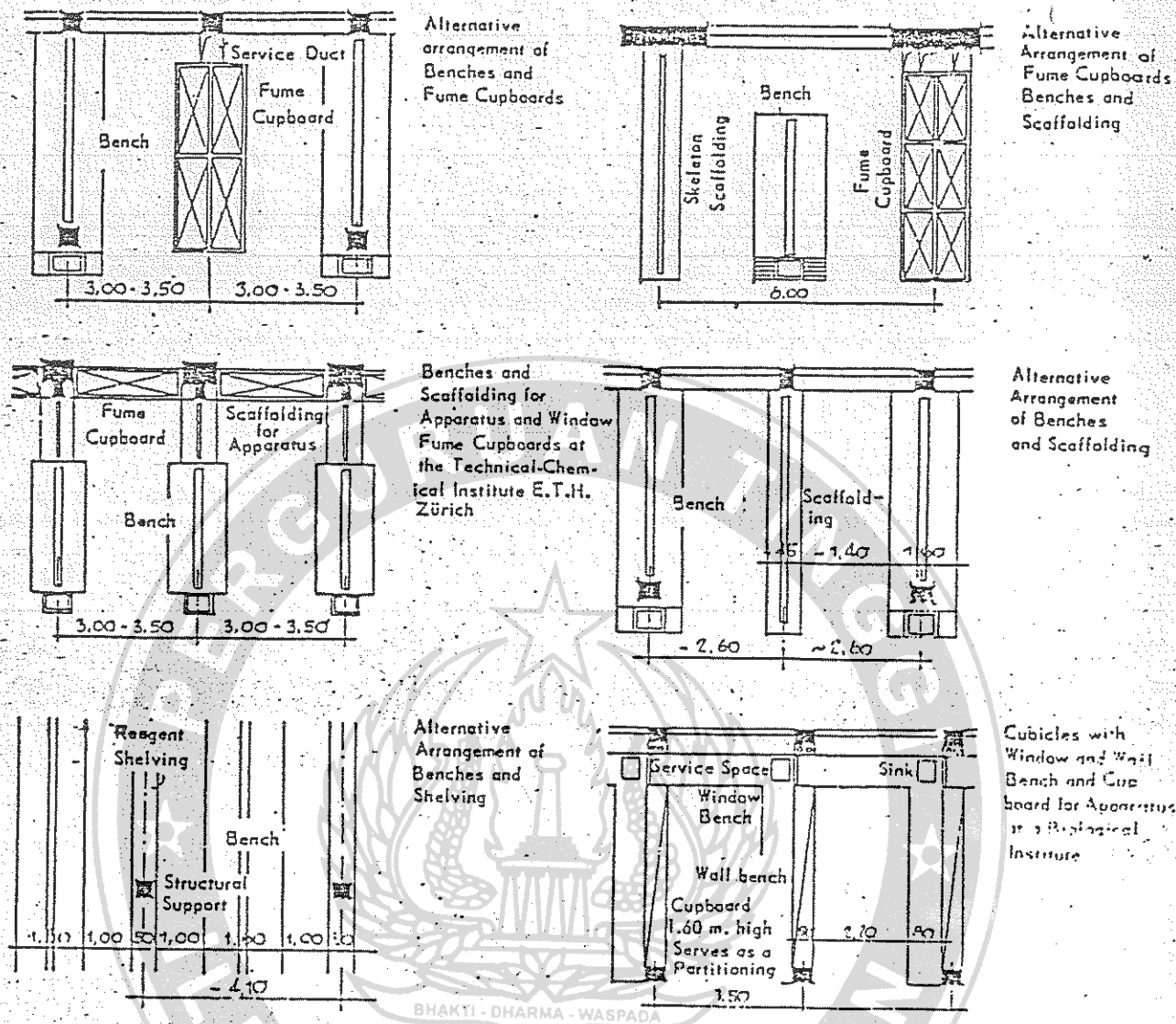


Fig. 18. Possible sizes of rooms with 3 windows.



Figs. 29-34. Modules incorporating fume cupboards, lattice framework and cupboards. Scale 1 : 150.

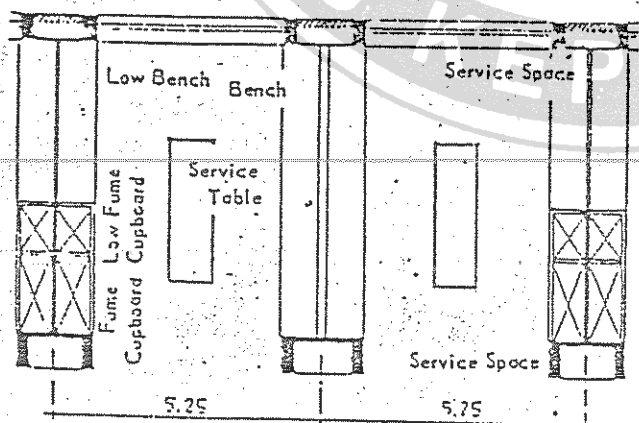


Fig. 35. Cubicles with bench, service table, low bench, fume cupboard and low fume cupboard. Scale 1 : 150.

chemical laboratories, examples are shown (Fig. 34) from biological institutes.

The arrangement of the benches in the analytical laboratories of Merck and Co. at Rahway, New-Jersey (U.S.A.) (Fig. 50) varies from the method, the benches being arranged crosswise with four-way service outlets at the intersection and so providing four work places. The examples quoted show the variety of designs possible and the close tie-up between module, design, construction and service installations. Especially noteworthy is the design of the laboratory of the B.A.S.F., Ludwigshafen (Fig. 51), where the benches and fume cupboards are so arranged as to simplify the connection of the services. Ducts rising from the basement carrying all services including ventilation.

E. WORKING AREA

A guide as to the area required for advanced teaching can be obtained from *Denkschrift ... Chemie* [1.59]:

Chemistry and Biology Laboratories

Fig. 36. Alternative arrangement of fume cupboards, benches and service tables. Scale: 1:150.

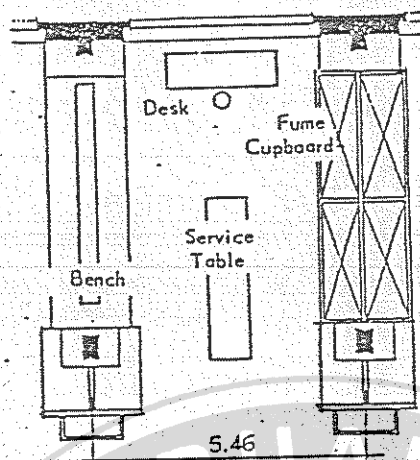


Fig. 37. Cubicle with double island bench, wall benches, fume cupboard and desk. Scale 1:150.

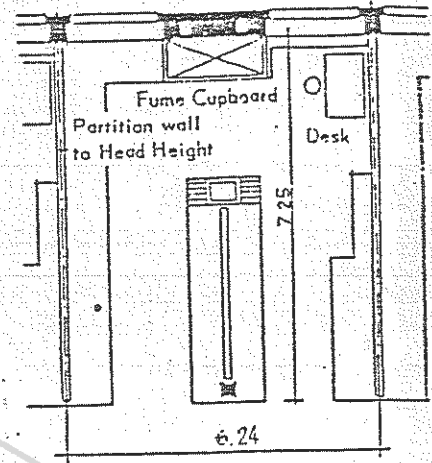


Fig. 38. Laboratories with offices and service rooms. Scale 1:150.

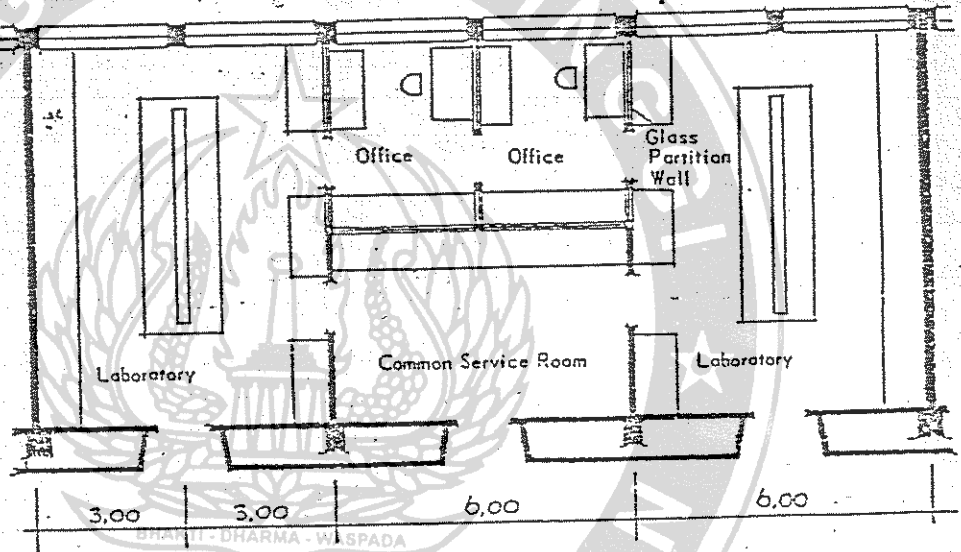
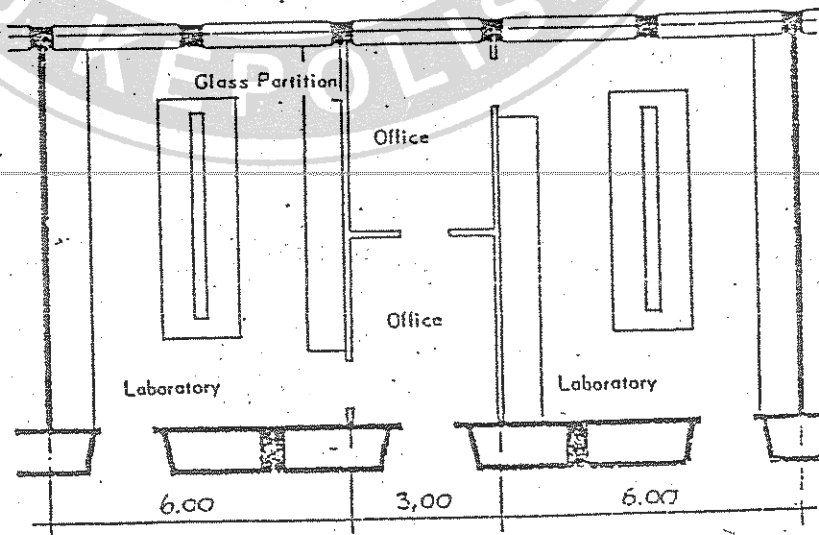
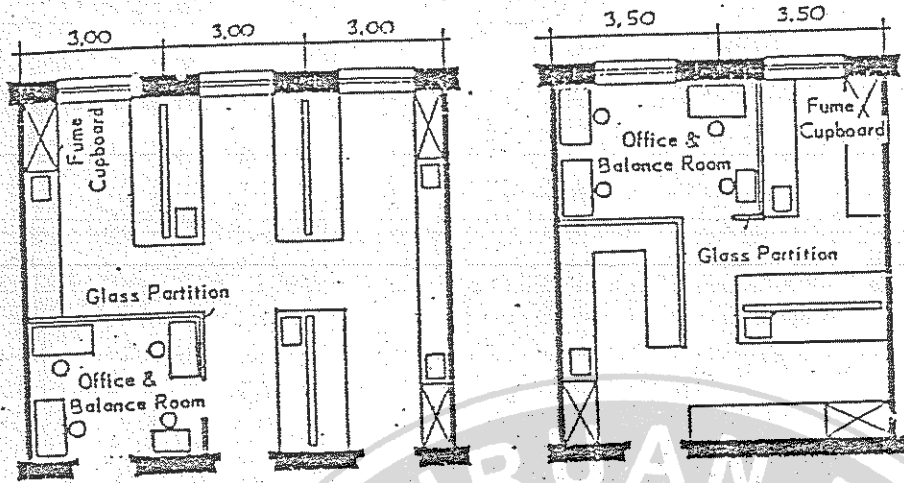
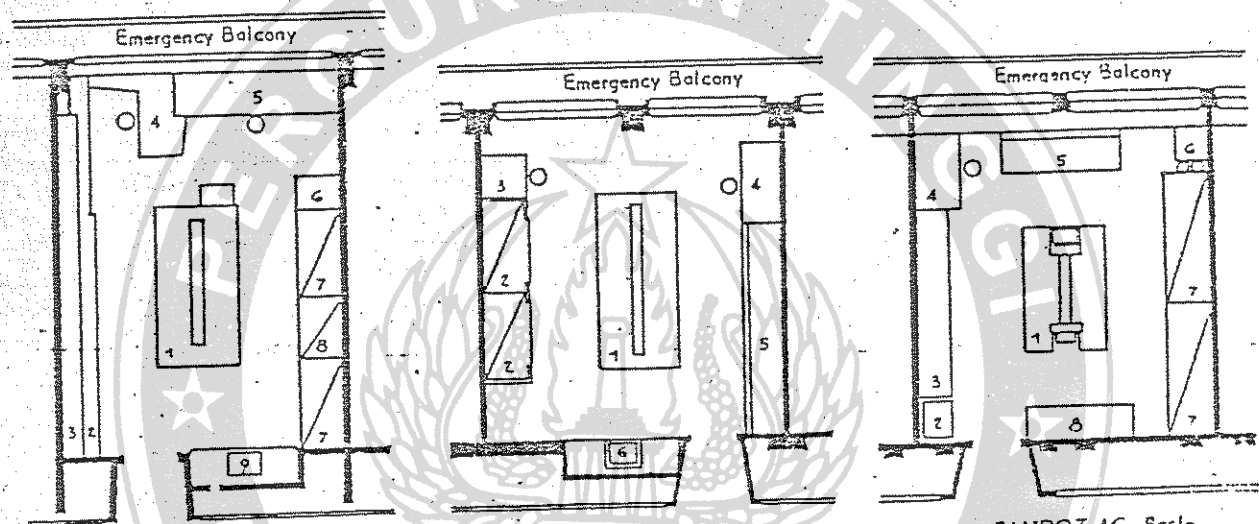


Fig. 39. Laboratories separated by one module of offices. Scale 1:150.





Figs. 40-41. Provision of offices and balance rooms in a multi-modular laboratory. Scale 1:150.



F. Hoffmann-La Roche & Co. AG., Basle

CIBA AG., Basle

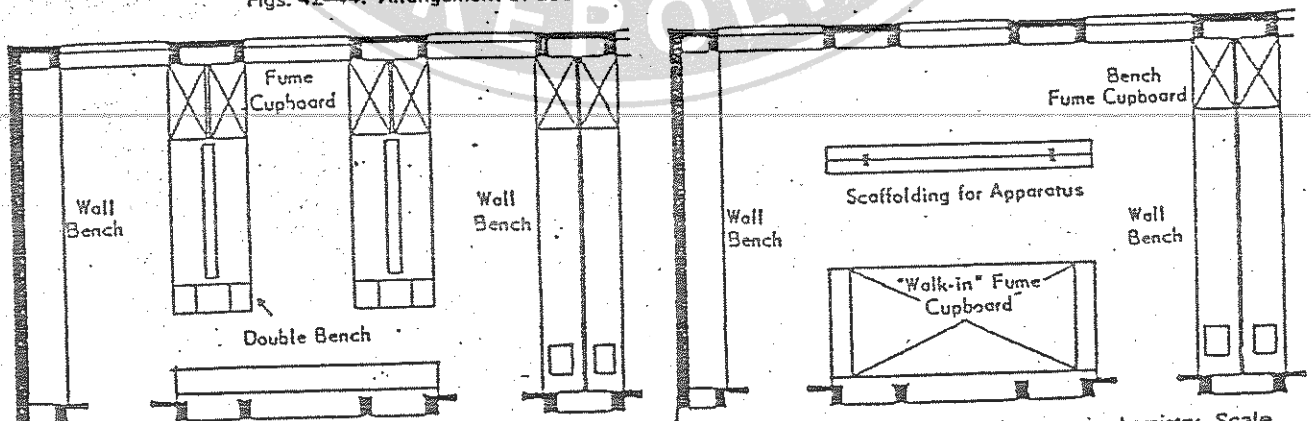
SANDOZ AG., Basle

- 1 Island Bench
- 2 Wall Bench
- 3 Wall Cupboard
- 4 Desk
- 5 Window Bench
- 6 Service Bench
- 7 Fume Cupboard
- 8 Low Fume Cupboard
- 9 Sink

- 1 Island Bench
- 2 Fume Cupboard
- 3 Desk for Assistant
- 4 Desk for Chemist and Wall Cupboard
- 5 Wall Bench
- 6 Sink

- 1 Island Bench
- 2 Refrigerator
- 3 Wall Cupboard
- 4 Desk for Chemist
- 5 Window Bench
- 6 Bench for Glass Blowing
- 7 Fume Cupboard
- 8 Wall Bench for Balances

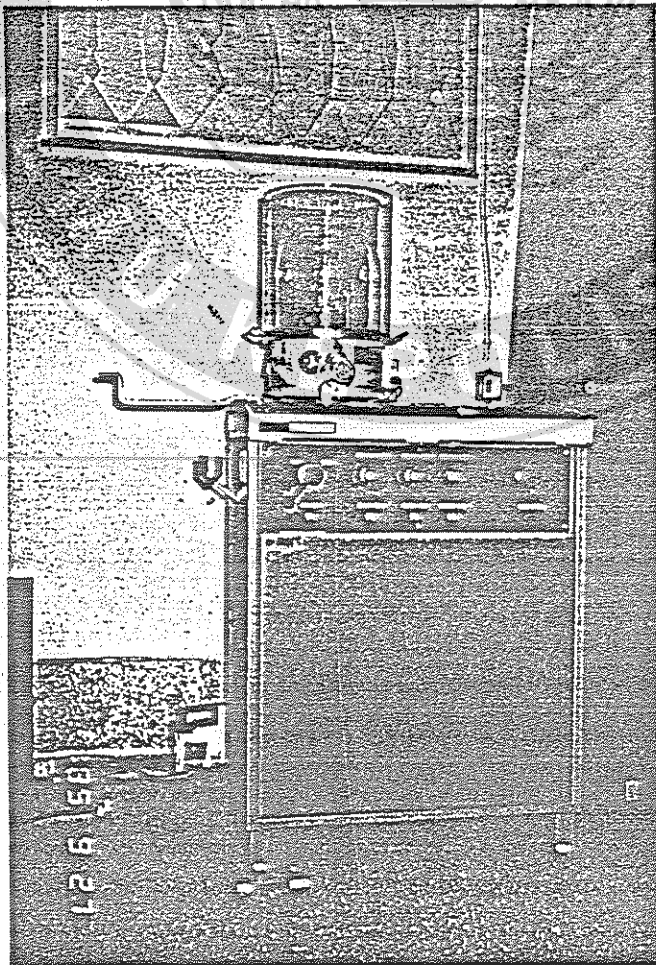
Figs. 42-44. Arrangement of double-module industrial laboratories. Scale 1:150.



Figs. 45-46. Three-module laboratories with the same ground plan on two storeys and equipped for organic chemistry. Scale 1:150.



X-ray



COMPUTER CENTRES

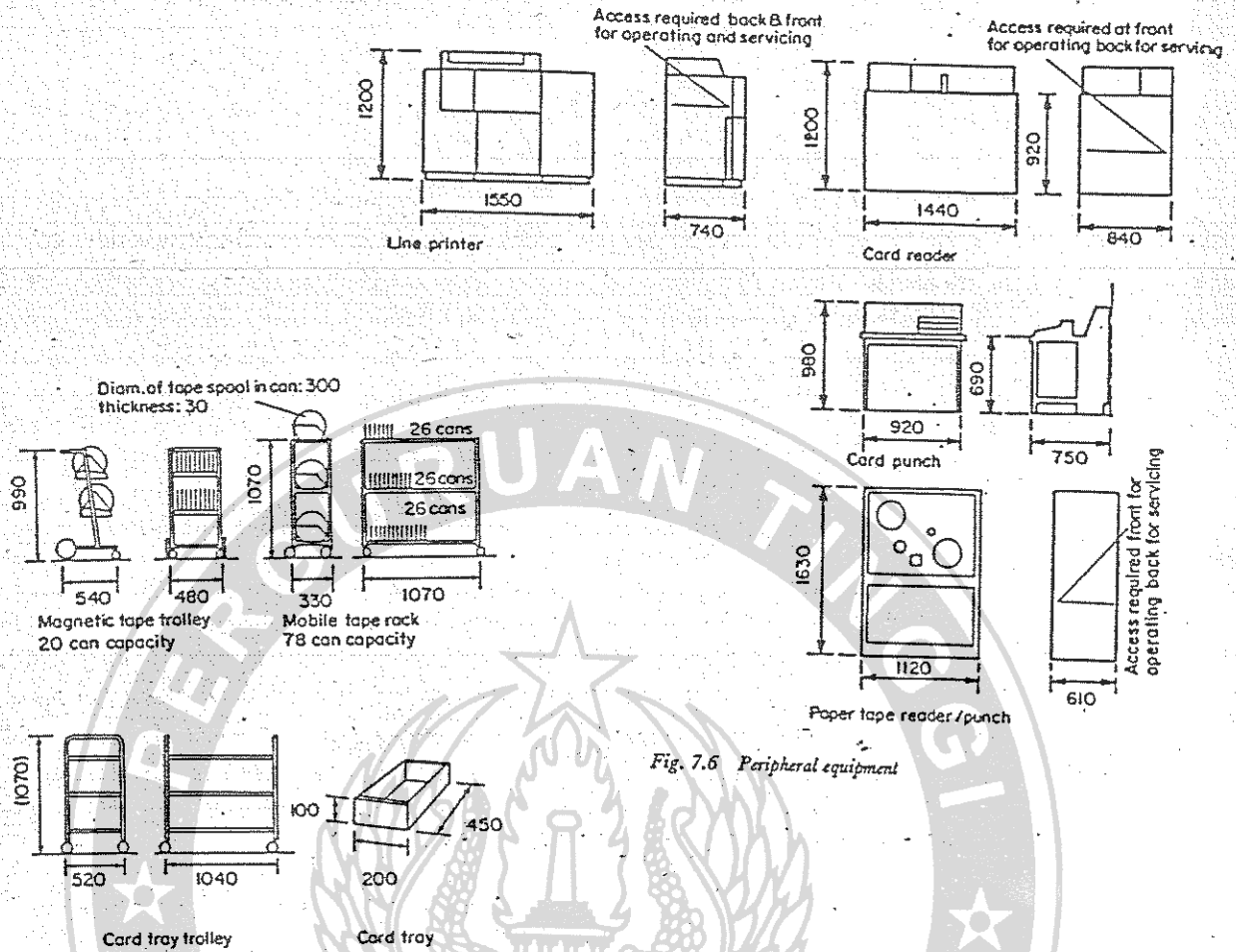


Fig. 7.6 Peripheral equipment

Fig. 7.3 Mobile storage

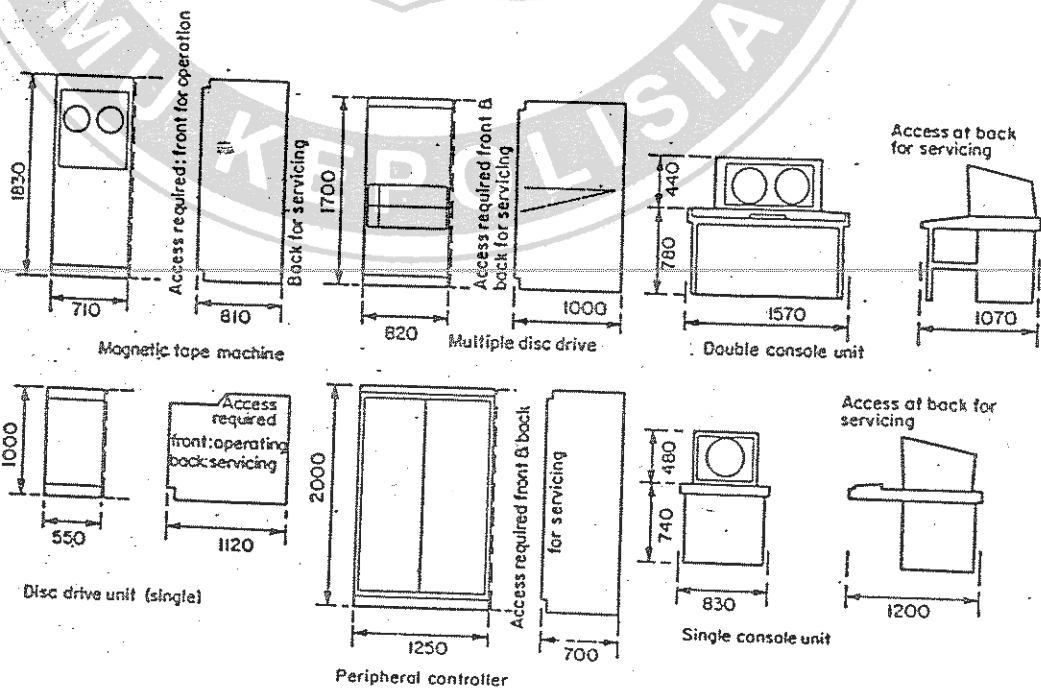


Fig. 7.5 Computer room equipment

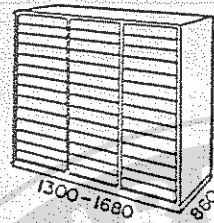
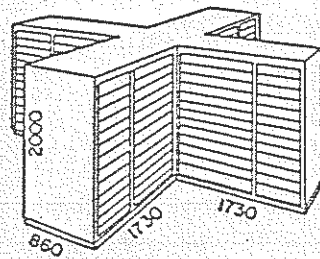
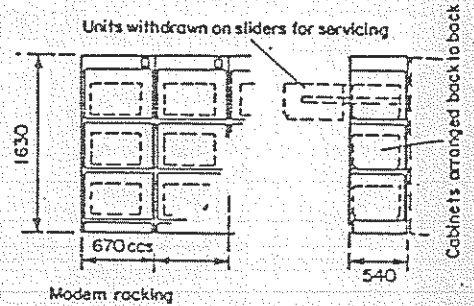
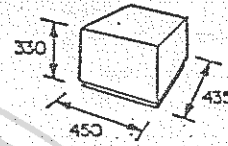


Fig. 7.7 Central processing units. Note that actual sizes may vary considerably



Modem racking

Anchorage required to prevent overturning



Modem unit

Fig. 7.8 Equipment racking

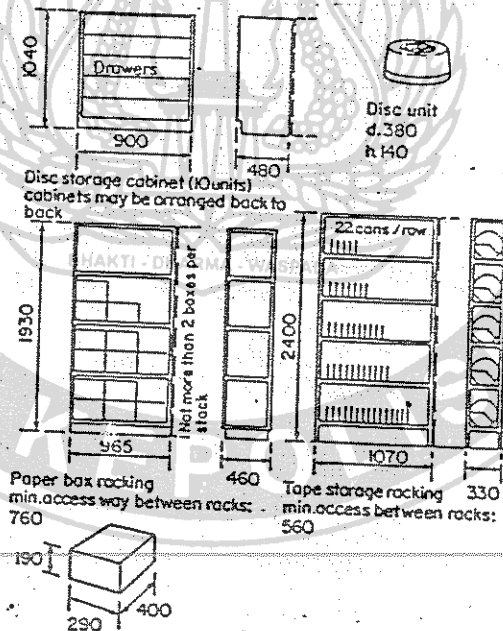
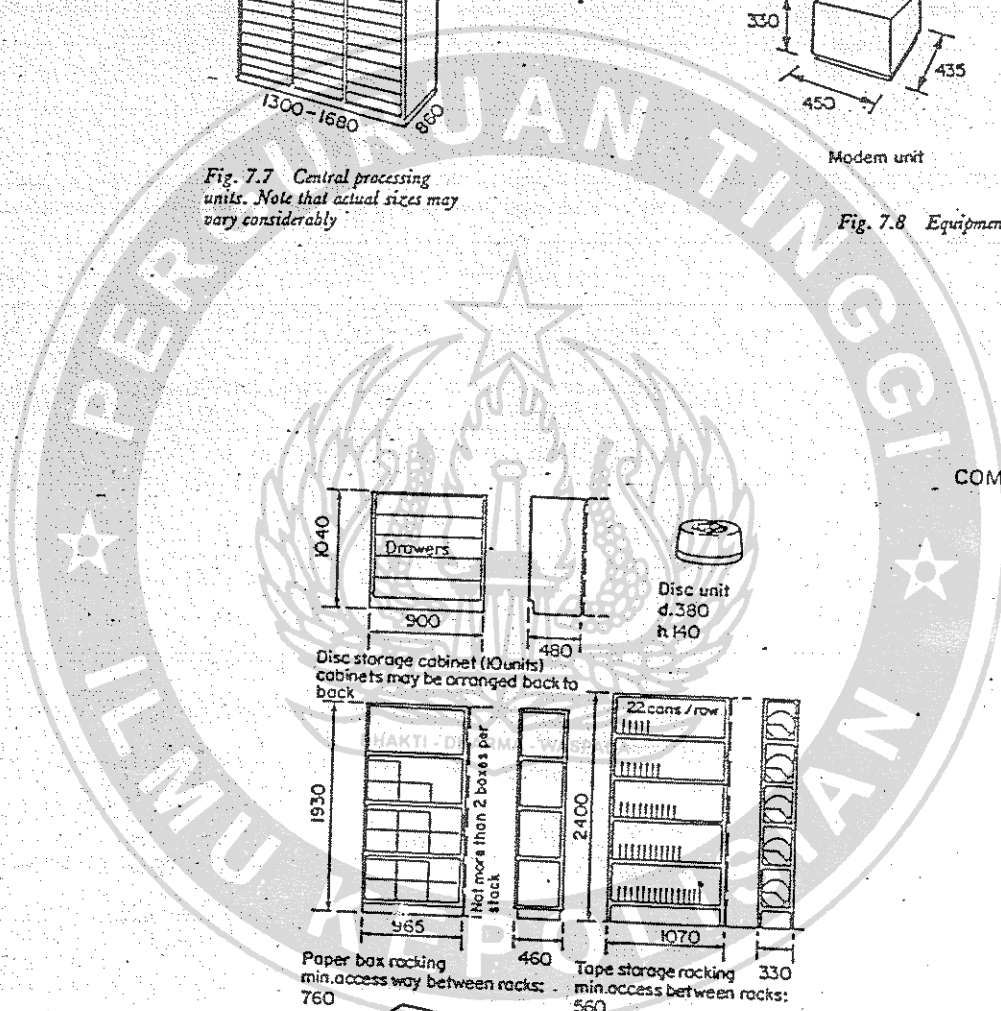


Fig. 7.4 Disc, paper and tape storage



COMPUTER CENTRES

4.2.4. Perhitungan.

4.2.4.1. Luas.

Luas dan jumlah lantai keseluruhan berdasarkan kebutuhan (dengan proyeksi waktu 20 tahun mendatang sejak tahun 1980), dengan memperhatikan gambaran kecenderungan PTIK adalah $\pm 21.000. M^2$. Penentuan jumlah dari pada lantai (ketinggian bangunan), berdasarkan pengelompokan fungsi, kebutuhan ruang, kondisi dan luas tapak, serta penampilan yang ingin di capai.

4.2.4.2. Perincian Dan Luas Ruang.

(lihat tabel pada lampiran).

Mengingat perencanaan suatu kampus PTIK tidak dapat dilepaskan begitu saja dari lingkungan ke-ABRI an maka penulis mengambil standar dari ruang gerak yang dibutuhkan oleh individu kepolisian yang kemudian digabungkan dengan standar-standar dari suatu kebutuhan ruang.

4.2.4.3. Parkir.

Menurut pola jaringan sirkulasi dalam kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), baik untuk kendaraan

maupun pejalan kaki, maka fasilitas parkir dikelompokkan pada beberapa lokasi - lokasi tertentu.



B A B. V. IDEA DAN KONSEP.

5.1. I d e a.

Dalam merencanakan Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini ada beberapa idea/pemikiran dasar yang akan menentukan sikap dalam proses perancangan nantinya yaitu :

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka pada kompleks PTIK ini, massa bangunan yang akan dikembangkan adalah " Gedung Utama ".

2. PTIK (dalam hal ini Gedung Utama) sebagai " Landmark Building " didalam kompleks blok " 0 " dan lingkungan sekitarnya.

Hal ini berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

- Lingkungan sekitarnya merupakan daerah permukiman dan perkantoran, sehingga perlu adanya titik tangkap pandangan sebagai pusat orientasi, yang dapat dijangkau dari segala arah.

- Pentingnya peranan gedung utama ini didalam kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, sehingga diperlukan penampilan yang lebih menonjol daripada bangunan disekitarnya (pada skala mikro).

3. Gedung Utama merupakan sentral kegiatan (administrasi, pengelolaan dan pengembangan) bagi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

5.2. K o n s e p.

Untuk menerapkan/menuangkan idea tersebut

Kedalam wujud perancangan terlebih dahulu harus di uraikan dengan melalui langkah-langkah berupa konsep pemikiran yaitu :

1. Sebagai landmark building akan dicapai dengan :
 - Menampilkan gedung utama dengan kesan yang representatif, kokoh dan berwibawa.
 - Menambah ketinggian bangunan gedung utama, baik pada skala lingkungan didalam site PTIK maupun skala lingkungan diluar site PTIK.
 - Penampilan tampak gedung utama dengan ciri pengenal tersendiri tanpa mengabaikan keselarasan dengan lingkungan disekitarnya.
2. Untuk mendekatkan gedung utama dengan massa-massa bangunan dilingkungan PTIK, dapat dicapai dengan :
 - Kemudahan pencapaian dari segala arah (memberi kesan terbuka dan dapat dipakai bersama).
 - Penataan ruang secara terbuka serta memberikan kenyamanan ruang, baik untuk kerja maupun untuk para tamu/pengunjung.

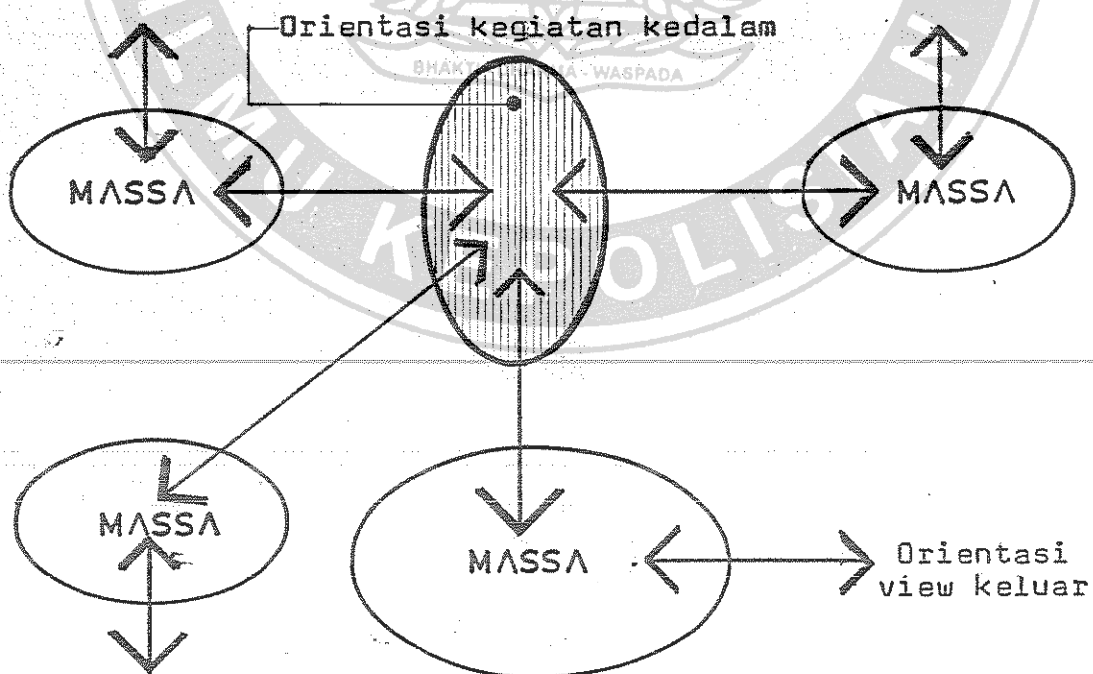
5.2.1. Konsep Lingkungan.

- Hubungan dengan fungsi disekitarnya.

Lokasi tapak yang ada sekarang merupakan lokasi kampus PTIK, yang terletak dipusat kota Jakarta Selatan di mana lokasi tersebut mempunyai potensi yang besar dalam usaha pengembangan pendidikan tinggi kedinasan.

Pandangan (view) disepanjang jalan Tirtayasa VII dapat mengarahkan orientasi pandangan kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian kearah pusat kota, yang merupakan kompleks Institusional.

Orientasi massa bangunan diarahkan kedalam, yaitu mengarah pada plaza dimana kegiatan dari Gedung Utama, perpustakaan, Gedung Serba Guna, Fakultas Ilmu Kepolisian diharapkan akan berorientasi pada plaza tersebut.



- Konsep Dalam Tapak.

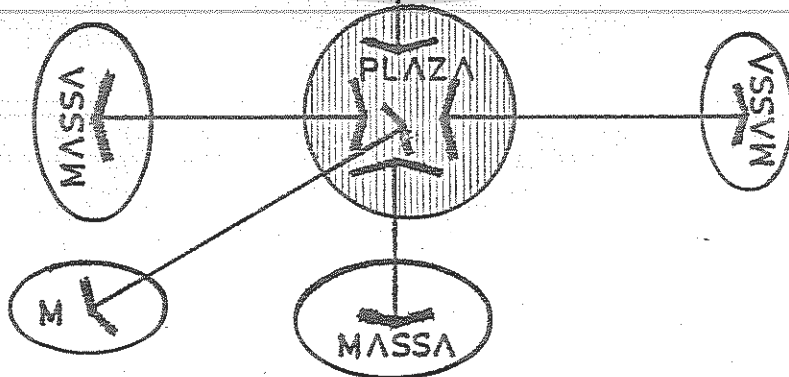
Ada beberapa hal yang akan dibahas disini, yaitu mengenai pencapaian kedalam tapak, hierarki dalam tapak, pengelompokan fungsi dan bentuk massa, serta ciri yang menonjol dalam tapak.

a. P e n c a p a i a n.

Pintu masuk utama kedalam tapak dapat dicapai dari satu arah, yaitu dari jalan Tirtayasa VII, dimana jalan masuk ini terletak disebelah barat laut tapak.

- Para tamu PTIK, masuk kedalam tapak dengan menggunakan kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya disamping Gedung Utama atau langsung menuju tangga menuju masuk didepan Gedung Utama tersebut dan menurunkan penumpang untuk kemudian baru menuju tempat parkir.
- Para tamu yang akan memakai fasilitas perpustakaan dapat langsung memarkir kendaraannya disamping gedung perpustakaan sedangkan para dosen atau karyawan F.I.K (Fakultas Ilmu Kepolisian) dapat memarkir kendaraannya didepan gedung Fakultas Ilmu Kepolisian.
- Staf maupun pengelola PTIK dapat langsung memarkirkan kendaraannya disamping Gedung Utama.

Masuk Utama



b. H i r a r k i.

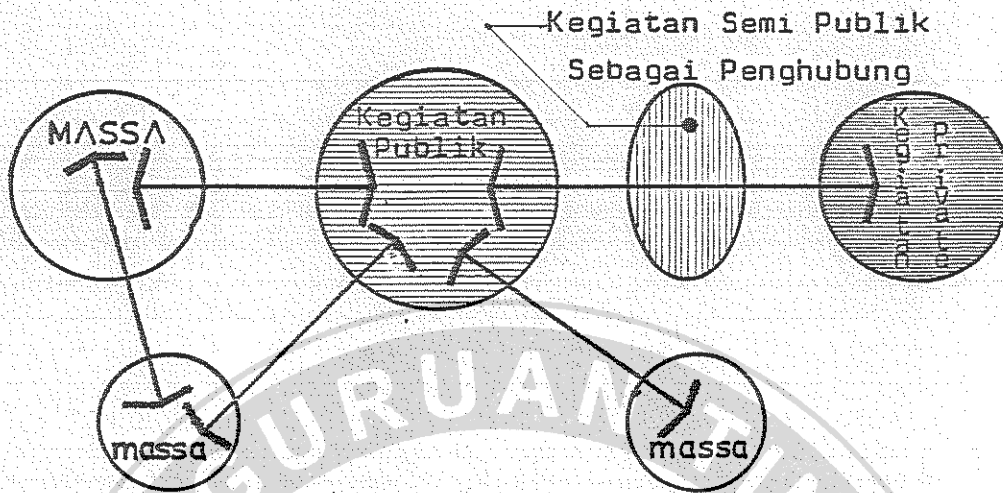
Hirarki yang dimaksud ialah hirarki kegiatan para tamu, staf maupun pengelola PTIK (obyek kegiatan).

- Obyek kegiatan yang datang dari pintu masuk utama di terima oleh plaza (sebagai ruang orientasi), yang mengarahkan obyek menuju massa-massa bangunan yang akan ditujunya.
- Dari plaza tersebut, obyek akan diterima oleh kanopi yang akan menuju hall (Gedung Utama, Fakultas Ilmu Kepolisian, Gedung Serba Guna dan Perpustakaan).

Dari urutan-urutan kegiatan obyek yang dianggap sebagai kegiatan utama di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian maka hirarki massa bangunan disesuaikan dengan kegiatan tersebut, yaitu mulai dari bangunan yang bersifat umum seperti Gedung Utama dan perpustakaan dihubungkan dengan selasar tertutup dan jalan setapak menuju Fakultas Ilmu Kepolisian sedangkan hubungan dengan Flat PTIK melalui media jalan setapak.

Selain hal tersebut diatas, hirarki juga ditentukan oleh sifat kegiatan yang terjadi didalam tiap-tiap massa bangunan yaitu ; kegiatan publik diletakan didaerah publik yang dapat dengan mudah segi pencapaiannya, dan kegiatan (untuk gedung utama), yang bersifat private ditempatkan dibagian timur laut tapak yang relatif tenang sedangkan untuk kegiatan pelayanan diletakan dibagian barat laut dan barat daya tapak, karena harus dapat dicapai langsung dari massa Fakultas Ilmu Kepolisian dan Flat PTIK dan tidak

mengganggu kegiatan private.



c. Pengelompokan Fungsi dan Susunan Massa.

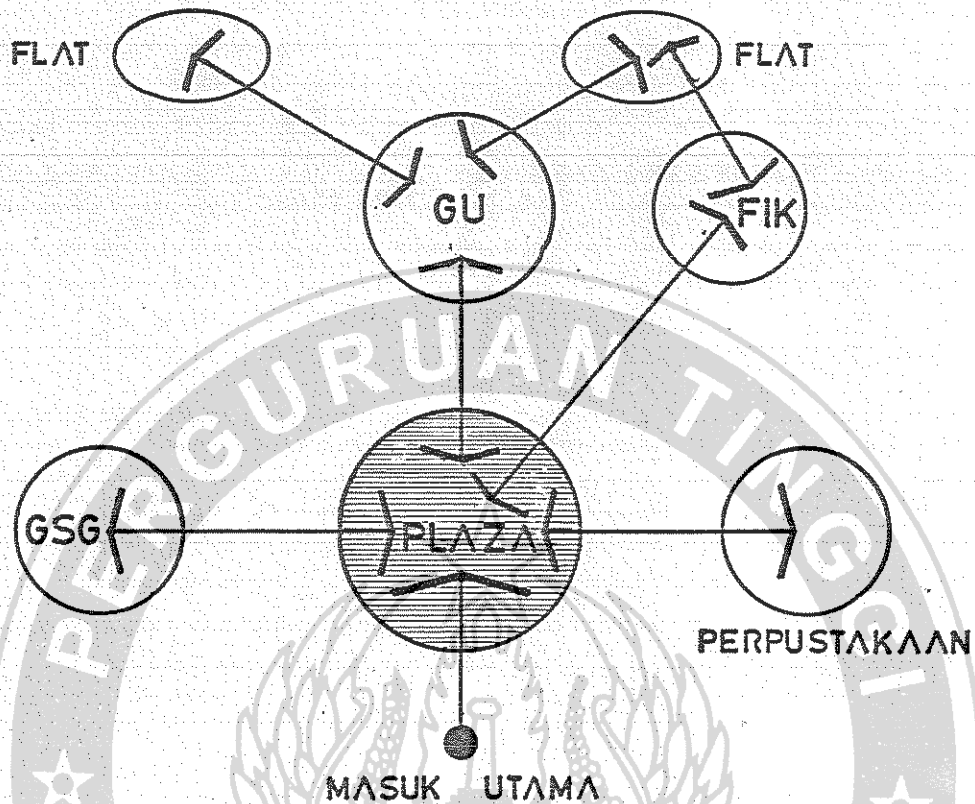
Massa bangunan terbagi - bagi menjadi beberapa massa sesuai dengan fungsinya yaitu :

- Bangunan fasilitas umum (dalam artian intern) yang terdiri dari fungsi administrasi, fungsi pelayanan dan fungsi pengelolaan dijadikan satu massa bangunan, dan diletakan ditempat yang paling mudah dicapai baik oleh kendaraan maupun oleh pejalan kaki.
- Bangunan blok hunian yang terdiri dari fungsi tempat tinggal para perwira mahasiswa dan staf diletakan dibagian belakang (sebelah tenggara tapak), & hanya dapat dicapai secara langsung dari bangunan fasilitas pendidikan.

Tiap-tiap blok hunian ini terdiri dari empat lantai dengan jumlah blok huniannya adalah 16 (enam belas)

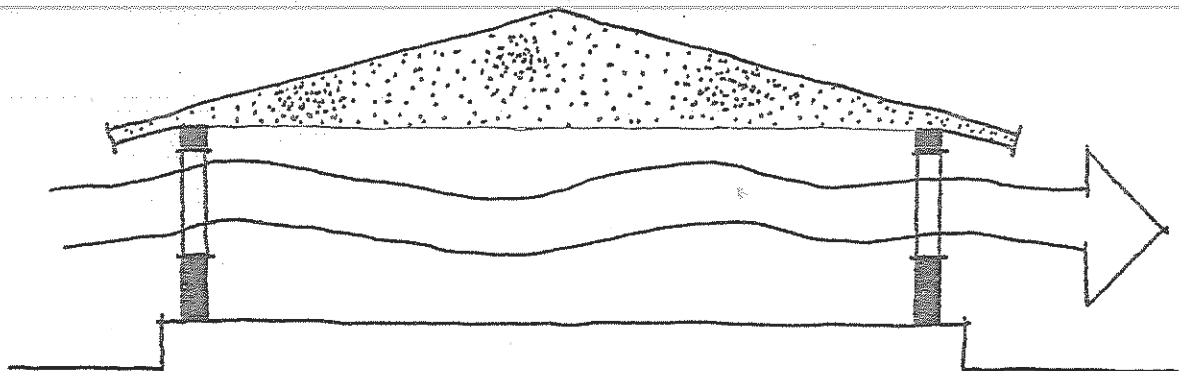
- Fasilitas olah raga yang juga difungsikan sebagai lapangan upacara diletakan dibagian timur laut Gedung

Utama (fasilitas umum).



d. C i r i.

Pada tapak terdapat elemen-elemen yang menonjol, yang sama dengan bentuk massa bangunan yaitu segi empat, dan selain itu massa bangunan yang segi empat tersebut juga akan menonjolkan ciri bangunan didaerah trofis, dengan bukaan-bukaan pada tiap sisinya, ciri lain dari bangunan trofis adalah bangunan yang ditutup dengan atap.



5.2.2. Konsep Perancangan Tapak.

Dalam menyusun konsep perancangan diadakan beberapa pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Kondisi Lingkungan ;

- pandangan (view) yang baik.
- bebas dari pencemaran udara dan suara.
- struktur tanah cukup baik (tidak menyulitkan konstruksi).
- luas lahan cukup tersedia.

b. Sarana dan Prasarana.

- Listrik.
- Air bersih.
- Pembuangan air kotor.
- Jalur transportasi sebagai penghubung.

c. Pencapaian mudah karena tersedianya jalur transportasi yang menghubungkan tapak dengan daerah luar (pusat kota)

d. Memenuhi atau sesuai dengan rencana umum tata ruang kota dan rencana bagian wilayah kota.

Hal tersebut diatas adalah merupakan penentuan tapak yang berdasarkan pertimbangan kepentingan pendidikan dan kemudahan operasional Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Sedangkan untuk Perencanaan Tapak adalah sebagai berikut :

a. Komposisi Massa.

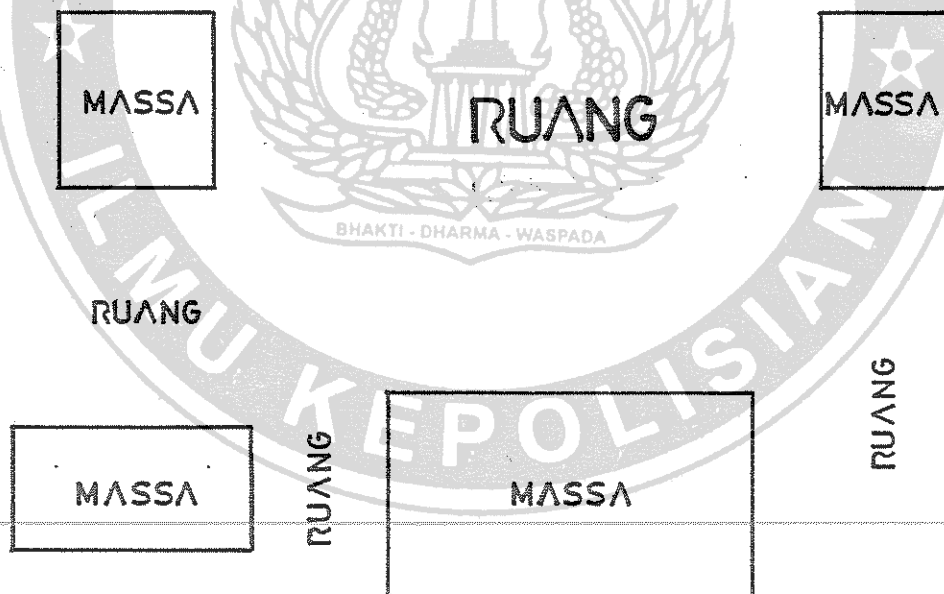
- Zoning untuk bangunan umum, private, pelayanan & parkir.
- Efisiensi penggunaan ruang dan tanah dengan menggabungkan beberapa fungsi dalam satu massa bangunan.
- Pembentukan dan pengolahan ruang luar.

5.2.3. Konsep Bangunan.

Secara terperinci disini akan dijelaskan konsep yang mendasari keluarnya bentuk massa, pencapaian, sirkulasi, pengelompokan fungsi dan fasade.

a. Bentuk Massa.

- Menghindari bentuk - bentuk massa bangunan yang memanjang secara linier dengan memaju-mundurkan massa yang membentuk ruang-ruang mikro dimana akan dapat mengatasi kesan yang monoton, disamping itu bentuk dari massa seperti ini menunjukkan pembangunan bertahap yang disesuaikan dengan occupancy rate (tingkat penghunian) ruang-ruangnya.



- Keinginan untuk mempersatukan massa - massa bangunan yang dibangun secara bertahap ini mengharuskan untuk menghubungkan massa-massa tersebut dengan selasar-

selasar selain untuk kemudahan pelayanan tiap massa bangunan, juga untuk kemudahan sirkulasi pemakai dari satu massa bangunan satu kemassa bangunan yang lain.

b. P e n c a p a i a n .

- Seperti disebutkan diatas, pencapaian kemassa bangunan hanya dapat dicapai melalui pintu masuk utama ketapak selanjutnya sirkulasi diarahkan dengan hirarki dan sifat kegiatan.

c. F u n g s i .

- Perletakan fungsi dalam bangunan dikelompokkan atas kebutuhan pelayanan, hirarki dan hubungan kegiatannya. Daerah umum seperti hall diletakan pada tempat yang paling mudah dicapai baik oleh kendaraan maupun oleh pejalan kaki.

d. S i r k u l a s i .

- Pengunjung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu; tamu dari instansi-instansi/institusi lain dan para pegawai, pengelola maupun perwira mahasiswa.

Dari pintu masuk utama pengunjung akan diterima oleh kanopi untuk kemudian mengarah ke hall, disini para pengunjung selanjutnya akan diarahkan untuk memilih sirkulasi vertikal atau horizontal yang sesuai dengan tujuannya, dimana pada sirkulasi horizontal yang terletak pada hall juga diarahkan menuju plaza, sebagai tempat berkomunikasi dan berorientasi.

Adanya sumbu visual dari hall menuju plaza, akan

mengarahkan sirkulasi, dan menjadi sirkulasi penunjang yang membagi unit PPITK (pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian) disebelah tenggara dan unit Set PTIK disebelah barat laut.

Sirkulasi pelayanan pada ruang-ruang melalui selasar yang juga dilalui oleh para tamu sedangkan untuk keamanan dan pengamanan, dibuat pagar disekeliling tapak PTIK, selain itu hanya dibuat dua pintu masuk dimana main entrance disebelah barat laut sedangkan side entrance diletakan disebelah tenggara.

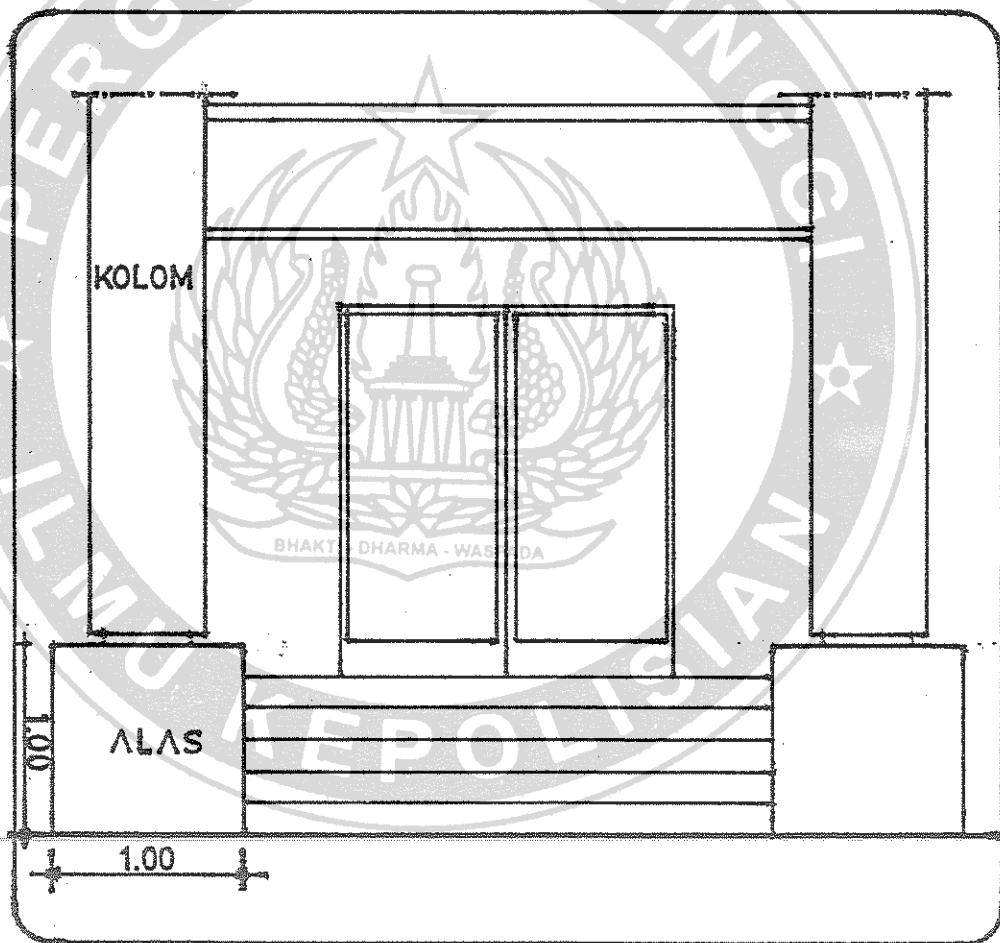
Pos keamanan diletakan didekat pintu masuk utama dan side entrance.

Untuk perawatan dan pemeliharaan taman, dibuat jalan setapak yang juga akan berfungsi sebagai penghubung antara massa bangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai jogging track (terutama pada jalan setapak yang mengelilingi lapangan sepak bola atau tempat upacara).

e. F a s a d e.

- Sebagai standard design digunakan kolom-kolom beton yang mengekspresikan garis-garis vertikal dan untuk menimbulkan kesan yang nyaman (comfort) pada tiap tepi dinding-dindingnya ditempatkan bak bunga dengan dengan kemiringan 45 derajat dan sun - louvers pada beberapa dinding yang menonjol, sehingga akan dapat dicapai suasana teduh dan menyenangkan sebagai bangunan pendidikan.

Sebagai special design pada kolom - kolom yang terletak didekat pintu masuk utama bangunan, akan diperbesar alasnya setinggi satu meter, sehingga akan dapat lebih mempertegas pintu masuk tersebut, sedangkan suasana keseluruhan yang ingin dicapai adalah suasana berwibawa yang juga tidak mengesampingkan kesan terbuka.



5.2.4. Konsep Pengendalian Suara.

Pengendalian bising/suara yang praktis didalam kantor harus mencakup :

- Perlindungan terhadap bising dari berbagai sumber luar.
- Insulasi horizontal dan vertikal yang cukup antara masing-masing ruang untuk menjamin kerahasiaan pembicaraan (speech privacy), artinya, pembicaraan yang berasal dari satu kantor tidak boleh terdengar dengan jelas dalam kantor yang berdampingan, dan
- Reduksi bising yang cukup dalam ruang kantor tertentu.

Sumber-sumber bising/suara yang biasa ada dalam kantor-kantor/lingkungan perguruan tinggi ialah :

- Bising luar yang berasal dari lalu-lintas, lapangan bermain dll.
- Bising mekanik yang disebabkan oleh sistem pemanas, ventilasi dan pengkondisian udara, pipa air ledeng, komputer dan tabung angin.
- Bising kantor yang khas yang ditimbulkan oleh pembicaraan, sirkulasi pada lantai dengan permukaan keras, membuka dan menutup pintu, teleprinter, mesin tik, sistem pemanggilan (call systems) dan telepon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka beberapa ruang-ruang tertentu pada Gedung Utama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian digunakan konsep pengendalian suara sebagai berikut :

- Daerah lantai diberi karpet untuk menyerap suara/ bunyi yang lewat udara dan untuk menghindari bising langkah

kaki. Karpet dipasang dibagian atas lapisan bawah (under lay) yang elastik.

- Langit-langit dilapisi dengan bahan penyerap bunyi yang tinggi, karena koefisien penyerapan bunyi tiap permukaan berkurang bila gelombang bunyi datang dengan sudut miring (grazing incidence), seperti yang terjadi sepanjang langit-langit.
- Luas total dari kaca jendela tidak boleh melebihi 40 % luas tembok luar, dipandang dari ruang kantor bagian dalam. Tirai penyerap bunyi harus digunakan sepanjang seluruh tembok yang difenetrasi.
- Permukaan dinding yang mengelilingi ruang kantor harus dilapisi karpet dengan penyerap bunyi yang tinggi.
- Pembagi ruang (layar), yang mengadakan pemisahan visual antara ruang kerja (work stations) atau daerah kantor tertentu, semua permukaan yang tampak dari layar - layar ini harus dilapisi dengan bahan penyerap bunyi.
- Distribusi peralatan kantor yang cukup bising (telepon, mesin tik) harus merata mungkin dalam semua ruang kantor. Peralatan kantor yang dapat menimbulkan bising harus dikumpulkan dalam daerah tertentu, dan dikelilingi dengan jumlah lapisan penyerap bunyi yang maksimum, serta dipisahkan secara visual dari bagian yang tersisa dari kantor.
- Bising dari sistem pengatur udara harus direduksi dengan baik namun tidak berlebihan (sekitar NC 35 sampai 40).

- Daerah lantai yang diperuntukan bagi eksekutif atau sudut-sudut konperensi dan lain-lain, harus banyak dikelilingi oleh lapisan-lapisan penyerap bunyi dan dipisahkan secara visual dari daerah lantai yang sisa dengan menggunakan layar, pembagi ruang dan lain-lain.



BAB. VI. HASIL PERANCANGAN FISIK.

6.1. Sistem Dalam Bangunan.

6.1.1. Sistem Pemipaan.

Ada dua sistem pemipaan dalam bangunan, yaitu :

- Jaringan air bersih.

- Jaringan air kotor.

untuk saluran vertikal, pemipaan di tempatkan dalam shaft. Pipa-pipa air bersih dan air kotor digabungkan dalam satu shaft.

6.1.2. Sistem Listrik.

- Daya listrik diterima dari distribusi PLN sebagai sumber utama dan menggunakan meteran sebagai pencatat pemakaian.

- Sumber cadangan digunakan generator yang dijalankan oleh automatic switch bila aliran listrik dari PLN mengalami gangguan.

- Pendistribusian daya listrik menggunakan sistem " Local Terminal " , pada tiap lantai yang selanjutnya didistribusikan keseluruh ruang secara merata, sesuai dengan kebutuhan

- Distribusi vertikal melalui saluran yang ada didalam shaft, sedangkan

untuk distribusi horizontal melalui saluran yang ada diantara lantai dan langit-langit (diantara pembalokan lantai). lihat gambar.2.

6.1.3. Sistem Penyediaan Air Bersih.

Sumber air bersih yang utama didapat dari saluran air minum P.A.M. wilayah Jakarta Selatan.

Untuk menjaga kontinuitas suplai air bersih ini, maka dibuat pula sumur pompa sebagai cadangan bila air dari P.A.M. tidak mengalir.

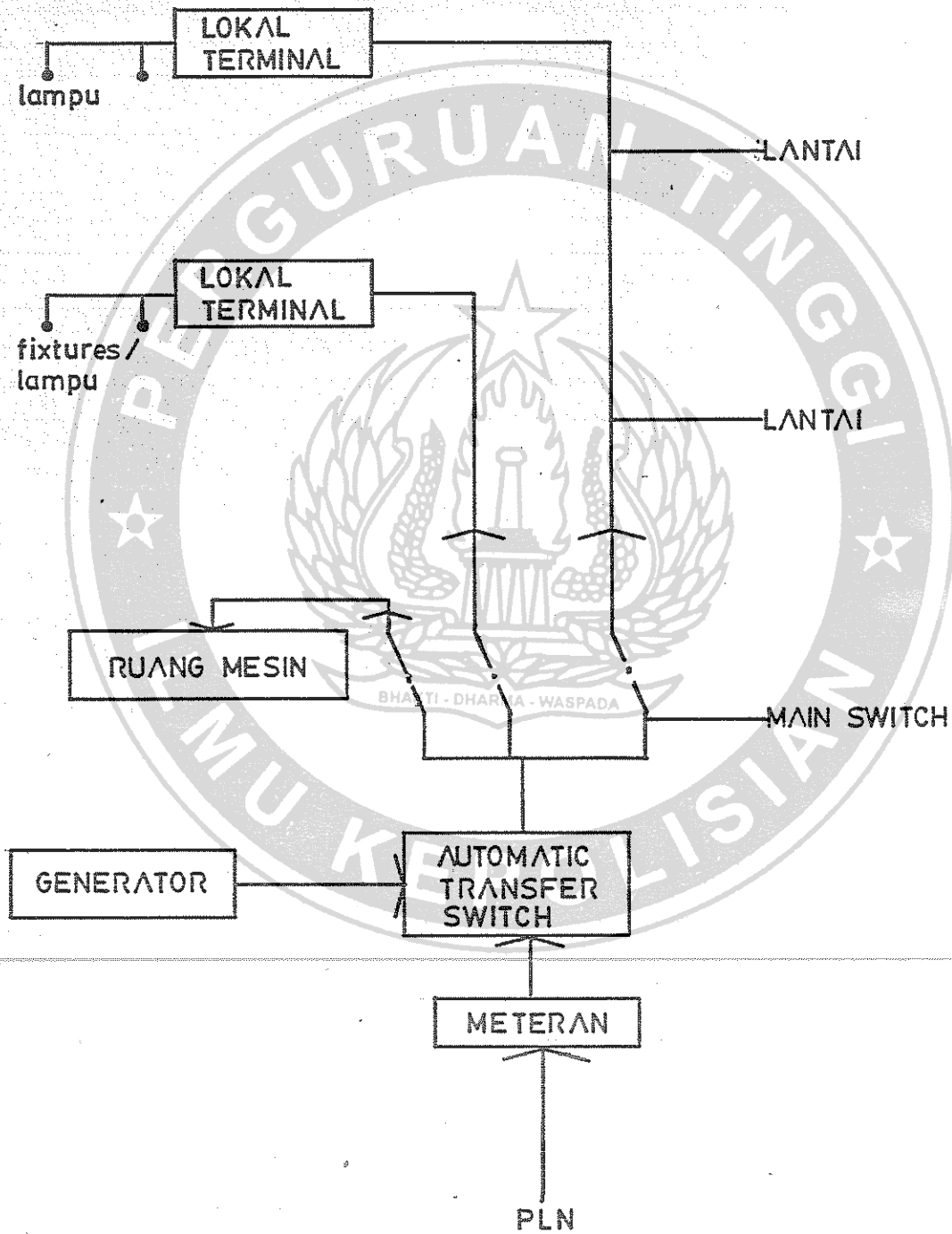
Air bersih diperlukan untuk manusia (Perwira Mahasiswa, Dosen, staf, dll), pemadam kebakaran, bak - bak mandi, menyiram tanaman dan lain sebagainya.

Sistem yang dipakai adalah sistem Down Speed Distribution yaitu air dari PAM atau sumur pompa mula-mula ditampung pada bak penampungan (reservoar bawah) kemudian dipompa ketangki atas (menara air) dari menara air kemudian disalurkan ke fungsi - fungsi yang membutuhkan. Pipa-pipa yang dipakai berdiameter antara 1,875 - 10 centimeter.

(lihat gambar. 3).

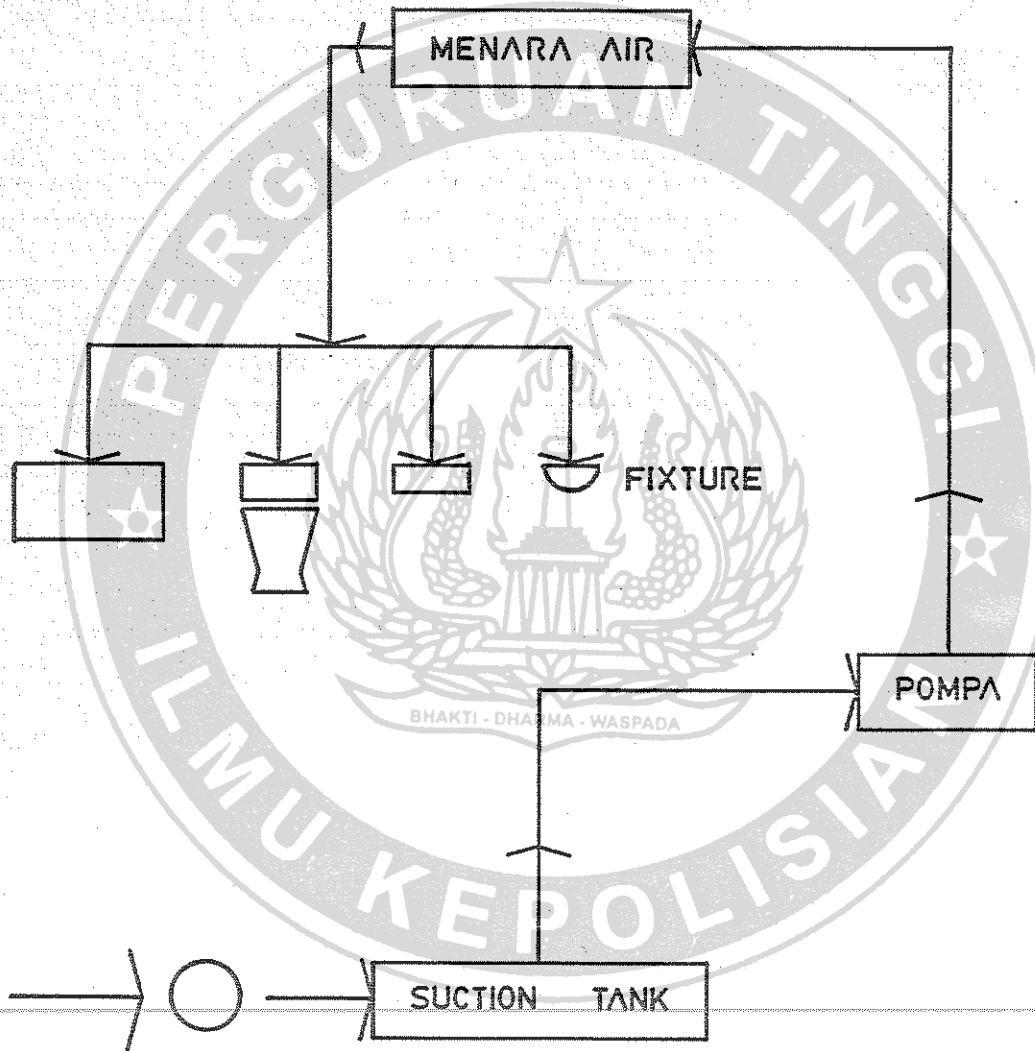
gambar.2

SISTEM LISTRIK



gambar.3

SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH



6.1.4. Sistem Pembuangan Air Kotor.

Kelompok I :

- Air buangan dari toilet (wc, urinoir, wastafel, kamar mandi).

Kelompok II :

- Air buangan dari sink atau pemakaian air bekas percobaan-percobaan di laboratorium yang menggunakan bahan-bahan kimia.

Sistem pengolahan air buangan dari tiap kelompok adalah sebagai berikut :

Kelompok I :

- Air buangan dikumpulkan didalam suatu septic tank, air hasil proses septic tank dirembeskan kedalam bidang rembesan (lihat gambar no.4)

Kelompok II :

- Air buangan dikumpulkan dari alat plambing kelompok ini kemudian dikumpulkan dalam suatu bak pengumpul I yang tahan zat kimia.
- Di bak pengumpul ini, air buangan diperiksa dulu didalam laboratorium kualitasnya dan dapat ditentukan treatment/pengolahannya.
- Dari bak pengumpul air buangan I air buangan dimasukan kedalam waste

treatment plant untuk diolah, dan air hasil olahan dimasukan ke bak pengumpul II.

Apabila menurut hasil pengamatan di laboratorium air hasil olahan tersebut telah aman/tidak akan mencemari lingkungan, maka air buangan tersebut dipompakan kesaluran pembuang/saluran air hujan yang ada.

(lihat gambar no.5).

6.1.5. Sistem Pembuangan Air Hujan.

Arah aliran air hujan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.

(lihat gambar no.6).

6.1.6. Sistem Komunikasi.

- Hubungan keluar.

Digunakan sistem PABX (Private Automatic Branch Exchange) dengan pendistribusian sistem vertikal melalui kabel-kabel dalam shaft.

Sedangkan distribusi horizontal melalui kabel-kabel dibawah lantai.

- Hubungan Dalam Bangunan.

Untuk mempermudah dan memperlancar hubungan antar ruang didalam bangunan, digunakan intercome.

6.1.7. Sistem Penangkal Petir.

Untuk mencegah atau menghindari kerusakan kebakaran akibat petir, ada tiga sistem penangkal petir yang umum dipakai yaitu :

Sistem Franklin

Cara ini menggunakan suatu tongkat dengan kepala kuningan yang dihubungkan pada tanah melalui kawat telanjang yang terbuat dari tembaga.

Alat ini dipasang pada tempat paling atas atau pada ujung-ujung bangunan daerah perlindungannya adalah selubung kerucut 45° dengan kepala kuningan sebagai puncak tersebut, maka untuk bangunan memanjang di butuhkan banyak penangkal petir semacam ini.

Sistem Faraday.

Cara ini mirip dengan sistem Franklin, hanya tidak menggunakan sistem kerucut tetapi memasang banyak konduktor diatas bangunan yang di hubungkan satu sama lain yang ujung-ujungnya ditanahkan.

Cara ini biasanya dipakai untuk permukaan bangunan yang datar.

Sistem Radio Aktif.

Mekanisme kerja sistem radio aktif adalah sebagai berikut :

Udara lembab disekitar kepala logam yang mengandung radio aktif yang diletakan dipuncak bangunan menjadi bermuatan, sehingga bila ada petir maka petir itu akan menyambar logam tersebut, kemudian disalurkan melalui logam telanjang yang terbuat dari tembaga ketanah, dengan demikian bangunan disekitarnya akan terhindar dari sambaran petir.

Daerah perlindungan bisa mencapai radius 250 meter.

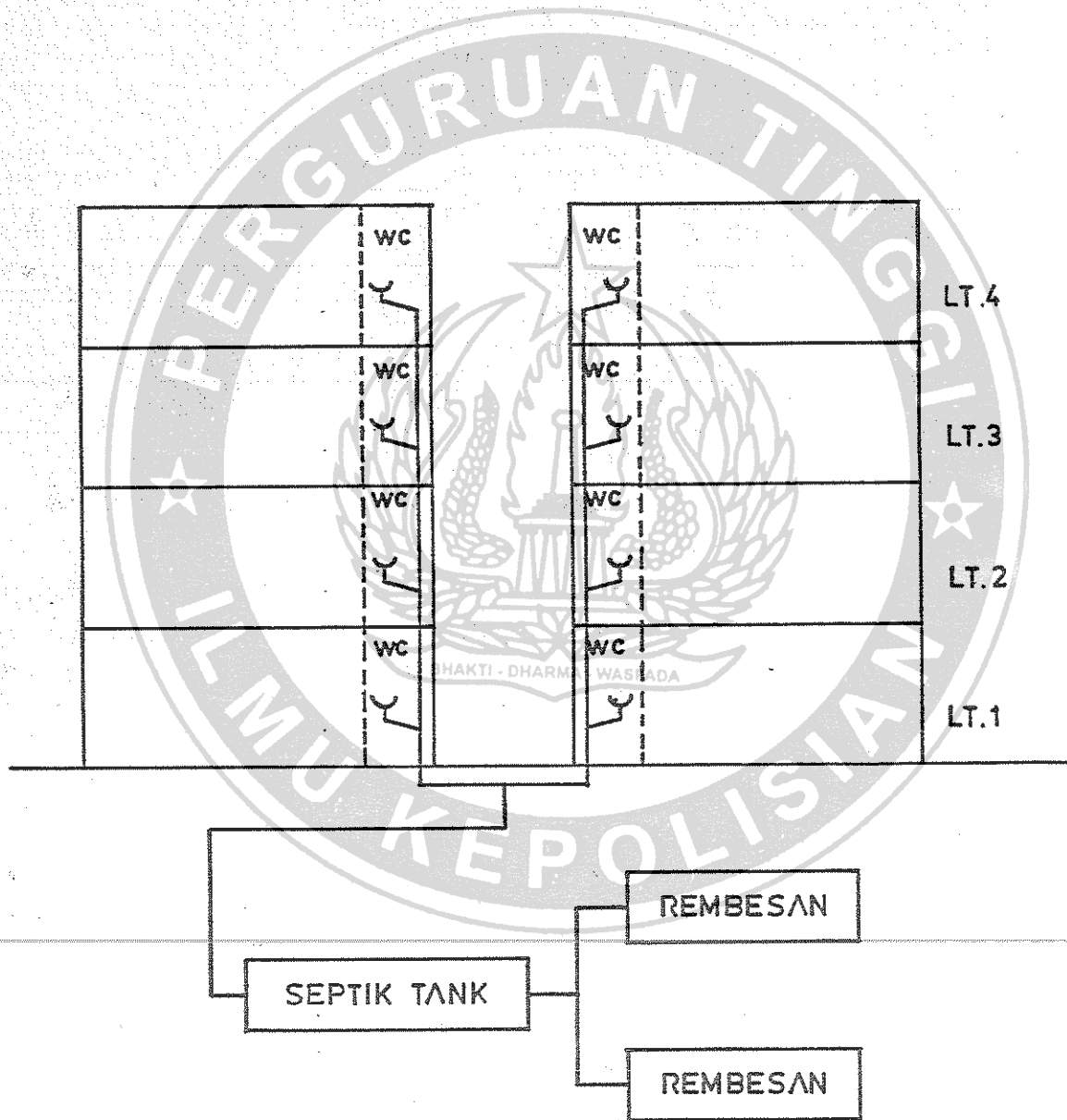
Setelah mengetahui segi kelebihan dari masing - masing segi diatas, maka sistem penangkal petir yang di pilih adalah sistem radio aktif atas dasar pertimbangan estetika dan efektifitas penggunaan.

6.1.8. Sistem Pencegahan Kebakaran.

Untuk kebakaran didalam ruang digunkan gas halon. Untuk itu perlu di sediakan ruang untuk penyimpanan tabung gas dan smoke detector pada tiap lantai dan untuk diluar bangunan dipakai fire hydrant.(lihat gamb.7).

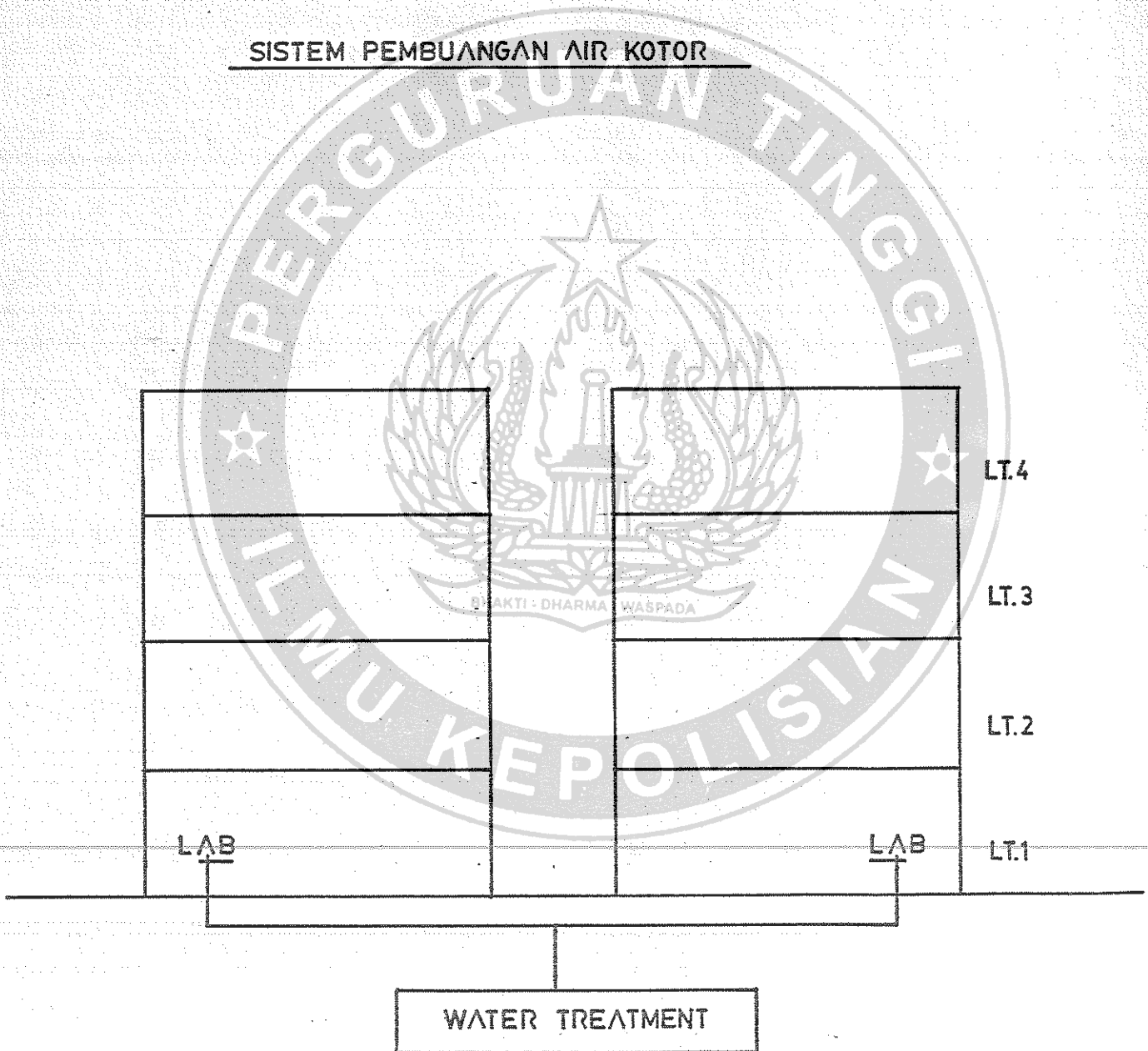
gambar.4

SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR



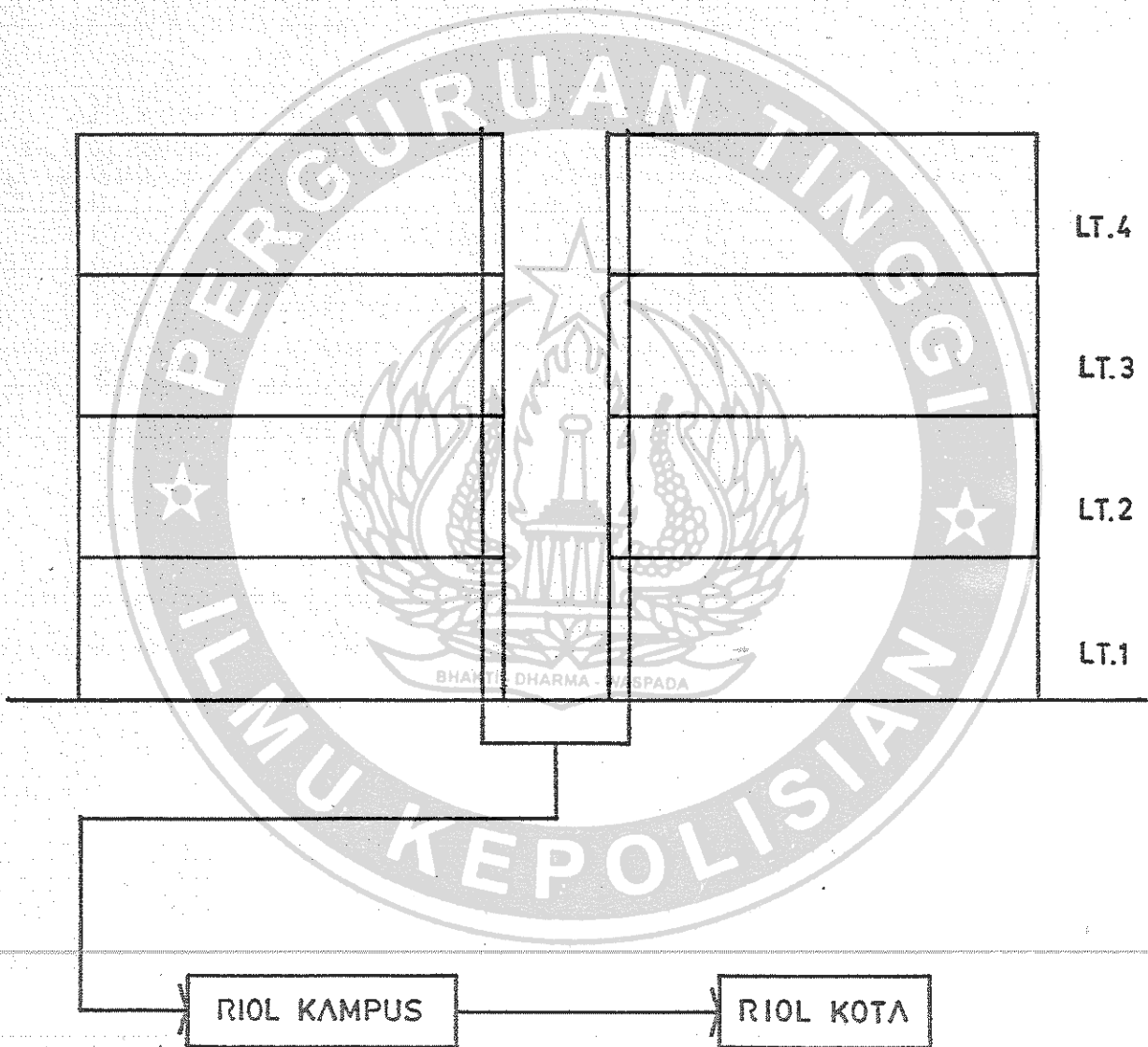
gambar. 5

SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR



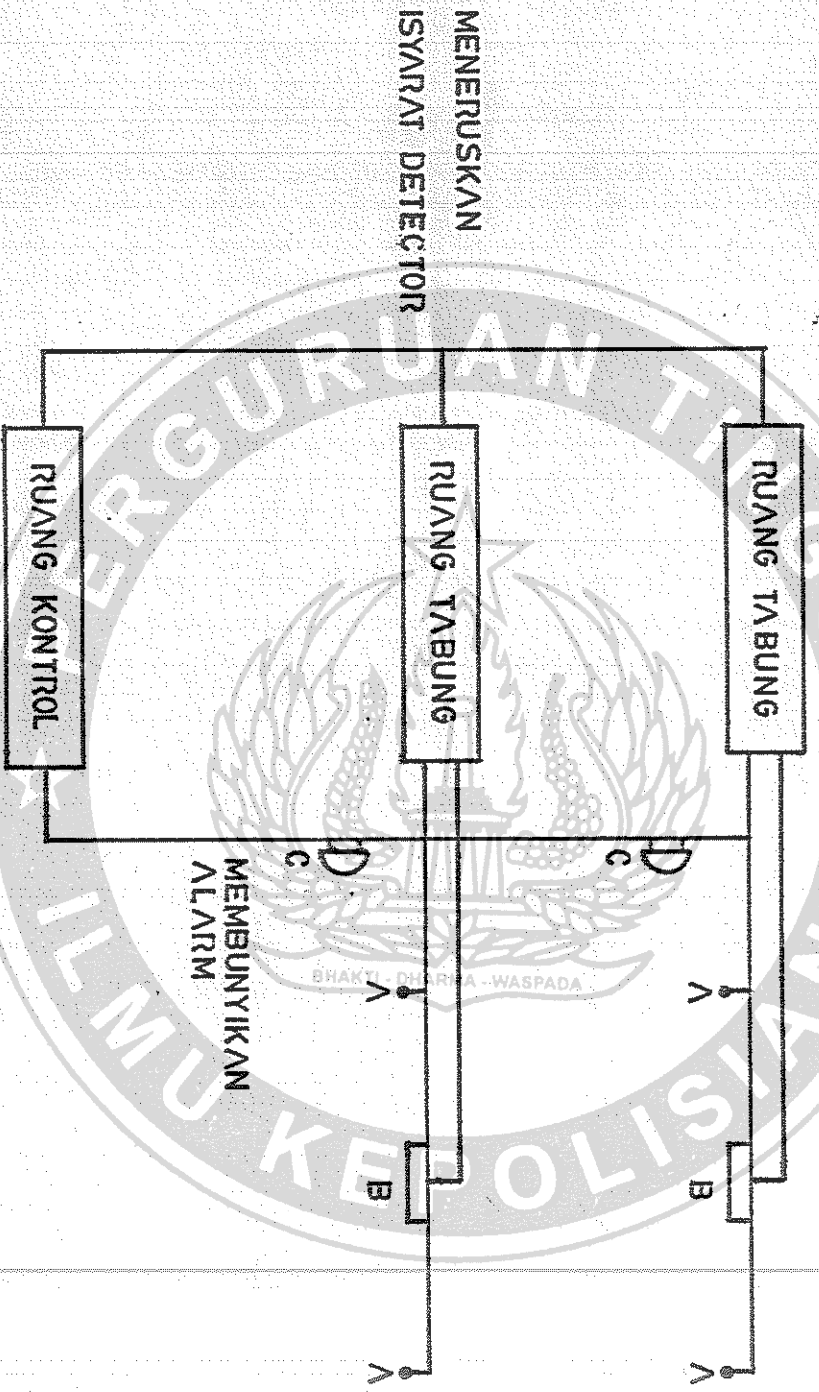
gambar. 6

SISTEM PEMBUANGAN AIR HUJAN



gambar. 7

SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN



6.1.9. Pembuangan Sampah.

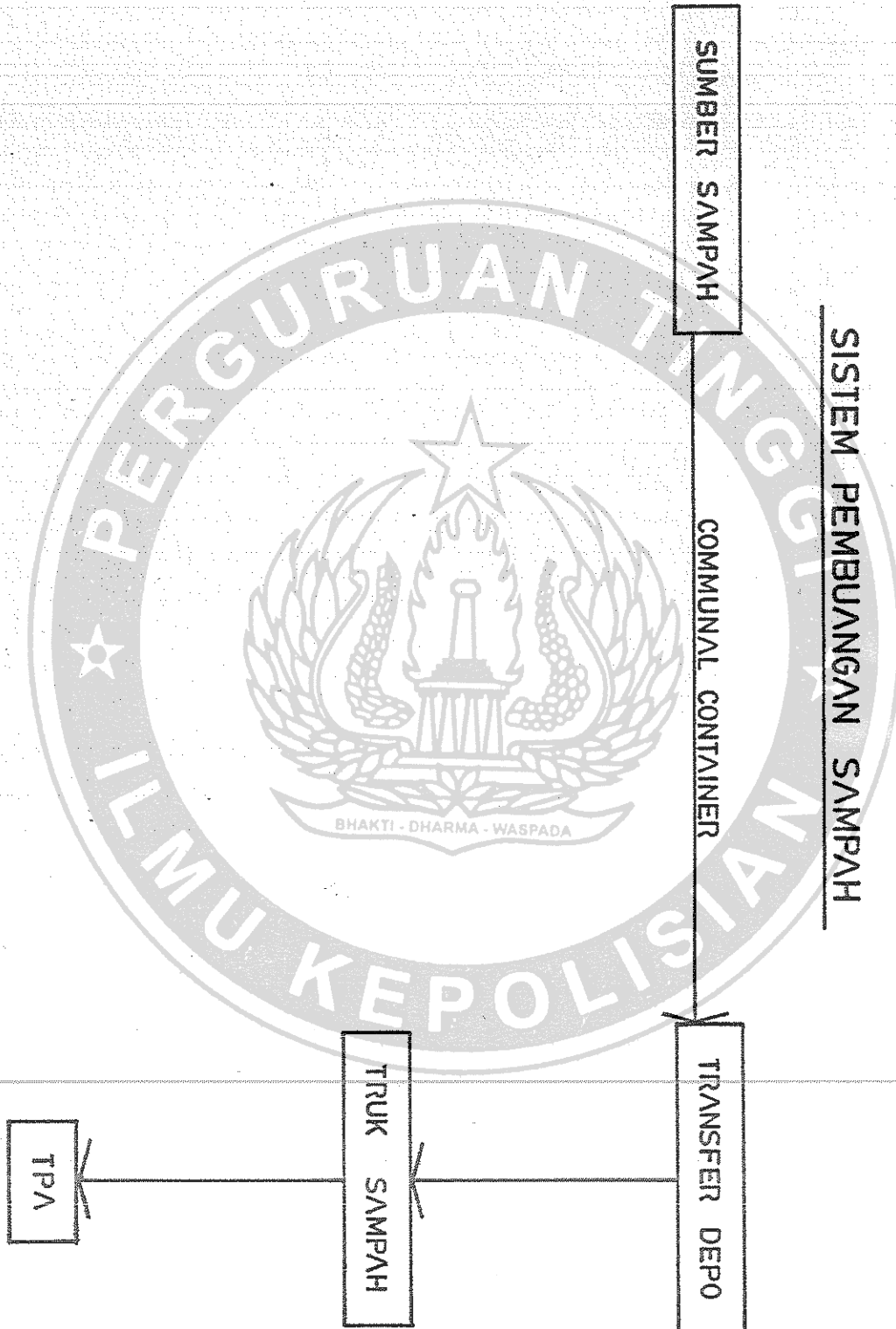
Digunakan sistem " Communal " yaitu suatu sistem pengumpulan dengan perantara bak penampung atau bak pengumpul sementara dan selanjutnya sampah tersebut pada jam-jam atau hari - hari tertentu dipindahkan ke truk sampah dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Proses Pengelolaan.

- Sampah yang terdapat dalam ruangan pada tiap lantai ditampung didalam bin plastik tetap, kemudian dikumpulkan pada communal container dan selanjutnya dimasukan pada shaft sampah dan ditampung oleh transfer depo (tempat pengumpulan sementara) yang akhirnya sampah yang terdapat di transfer depo tersebut akan diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

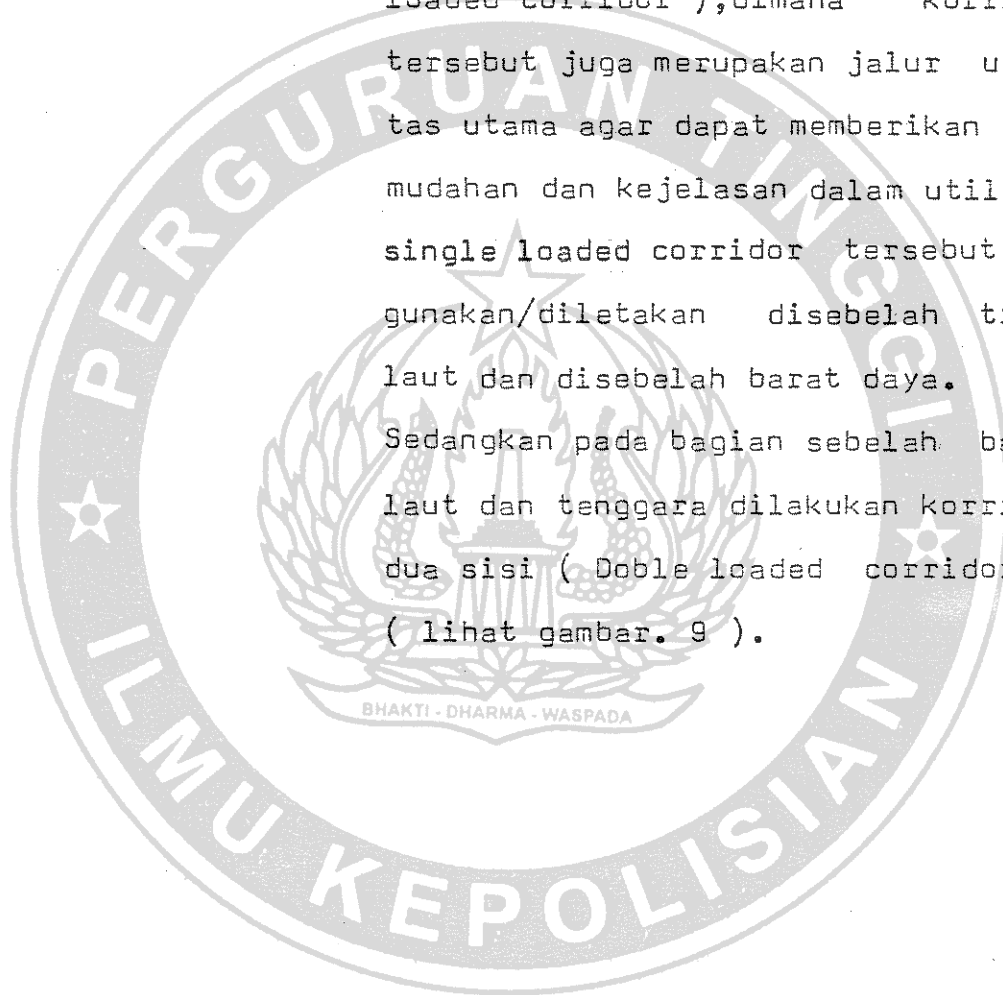
(lihat gambar. 8).

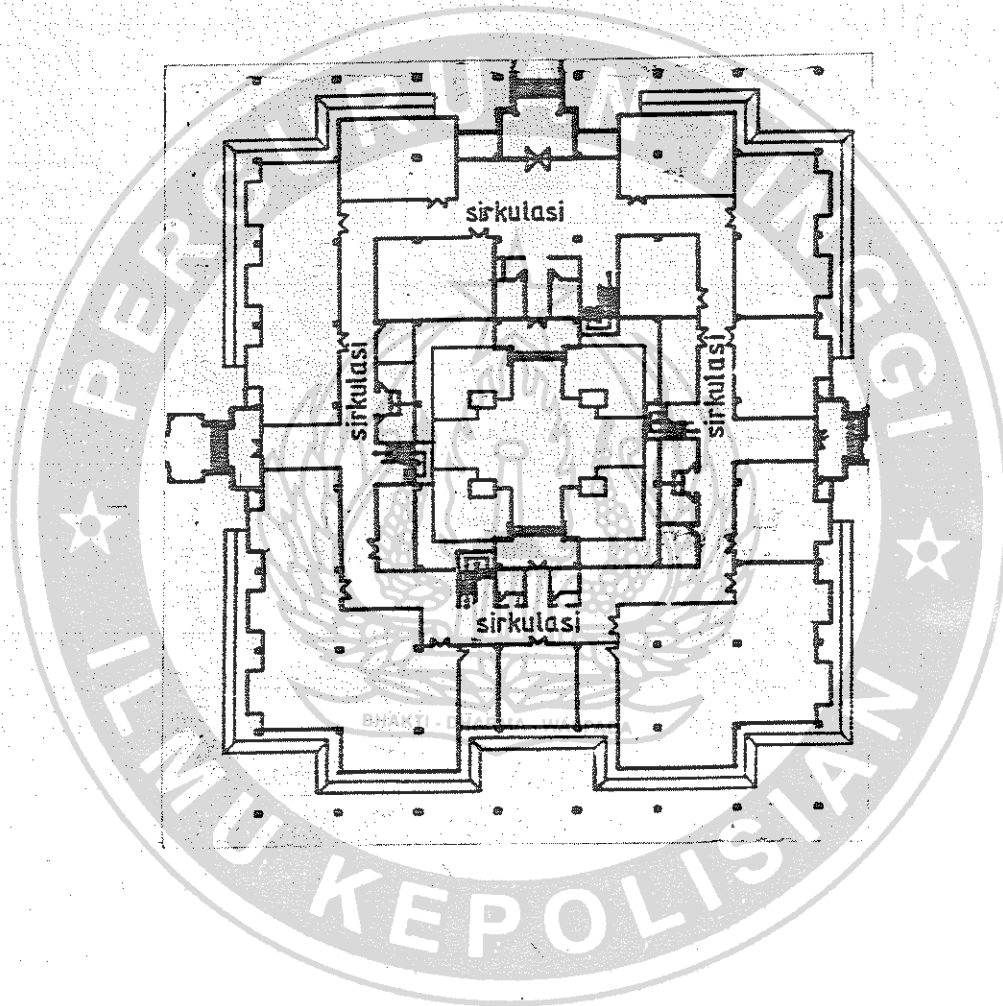
gambar. 8



6.1.10. Sistem Sirkulasi.

Sirkulasi vertikal dalam bangunan digunakan tangga, sedangkan sirkulasi horizontal dalam bangunan dilakukan dengan korridor satu sisi (single loaded corridor), dimana korridor tersebut juga merupakan jalur utilitas utama agar dapat memberikan kemudahan dan kejelasan dalam utilitas single loaded corridor tersebut digunakan/diletakan disebelah timur laut dan disebelah barat daya. Sedangkan pada bagian sebelah barat laut dan tenggara dilakukan korridor dua sisi (Doble loaded corridor). (lihat gambar. 9).





6.2. Sistem Struktur Bangunan.

Untuk menentukan sistem struktur yang akan di gunakan, maka terlebih dahulu akan dibahas beberapa grid mudul dengan melihat keuntungan dan kerugiannya bila grid tersebut diterapkan pada bangunan.

a. Grid Dua Arah :

Keuntungannya : - Pembagian beban merata.
 - Secara keseluruhan dapat terlihat kesatuan massa.

Kerugiannya : - Tidak jelas antara ruang dan utilitas.

b. Grid Satu Arah :

Keuntungannya : - Besar kecil ruangan dapat ditentu kan menurut grid.
 - Kemudahan utilitas dalam struktur.
 - Kemungkinan penempatan beban ter

pusat lebih mudah.

- Kerugiannya :
- Terdapat balok besar yang memikul balok yang kecil, sehingga dapat mengurangi tinggi bersih ruang.
 - Kemungkinan utilitas berbelok-belok sehingga akan mempersulit pemasangan

c. Grid Tartan :

- Keuntungannya :
- Penggunaan Struktur dan ruang dapat terlihat.
 - Jalur utilitas dapat diletakan pada grid yang kecil.
 - Adanya kesatuan dalam sistem bangunan.

- Kerugiannya :
- Biaya lebih mahal.
 - Kesulitan dalam perhitungan beban.

Dengan melihat keuntungan dan kerugiannya dari beberapa sistem struktur diatas maka dipilih sistem struktur dengan grid dua arah. Atau dengan kata lain Sistem konvensional dua arah dengan balok induk dan balok anak.

Berdasarkan study kebutuhan fungsi dan fleksibilitas, modul struktur diambil 7,2 meter X 7,2 meter, sedangkan balok anak diletakan ditiap jarak 2,4 meter.

6.3. Sistem Pelengkap Bangunan

6.3.1. Sistem Pencahayaan.

Sistem pencahayaan dalam bangunan menggunakan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan dengan distribusi yang sesuai dengan intensitas yang dibutuhkan.

Memanfaatkan pencahayaan alami dengan seoptimal mungkin.

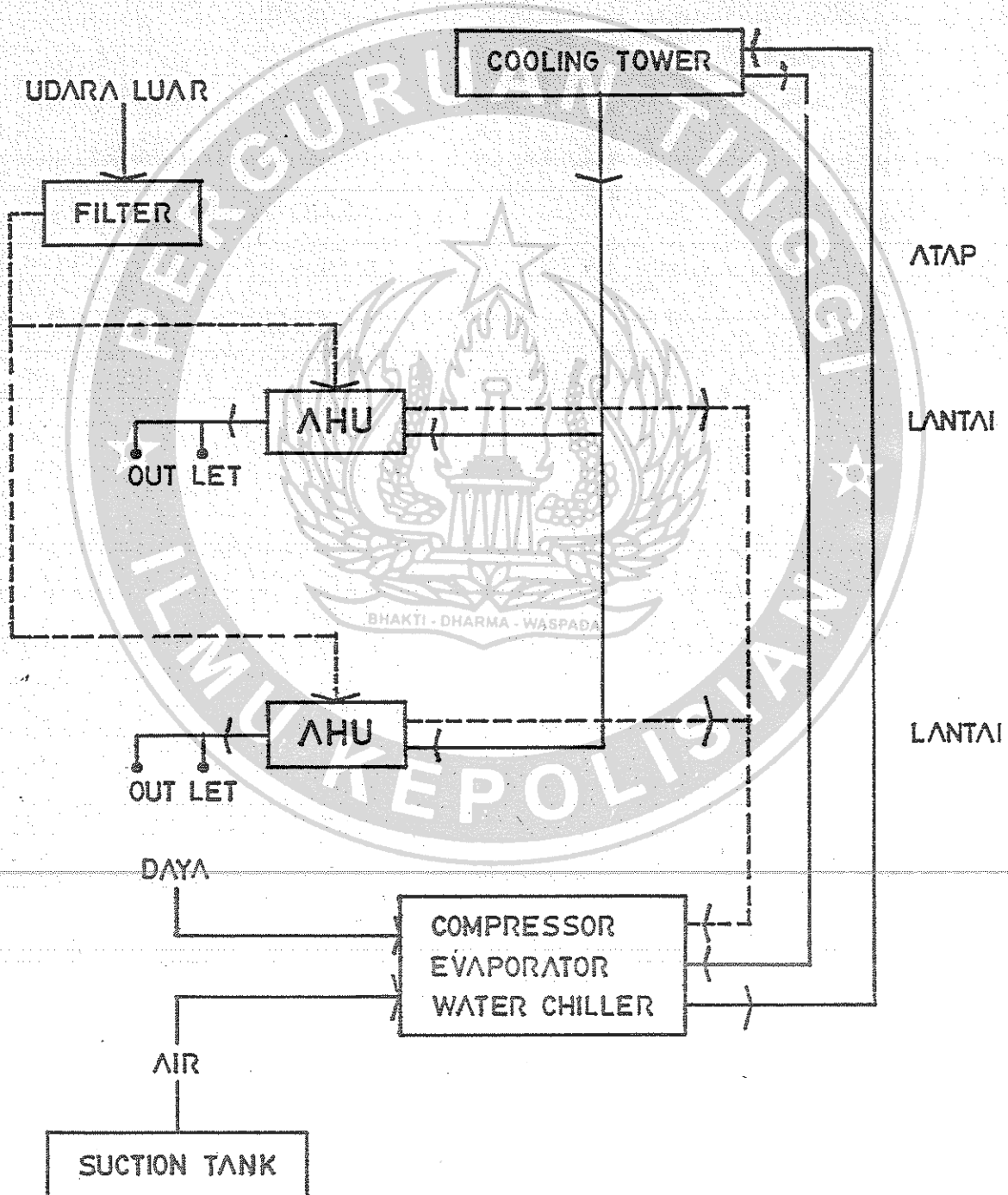
6.3.2. Sistem Penghawaan

Penghawaan untuk beberapa ruangan tertentu dilakukan dengan pengkondisian udara sistem " Water to air System ", yaitu dengan menghemat buskan udara yang telah didinginkan - Temperatur ruang yang dikondisikan bisa diatur secara optimal (dengan thermostat), sehingga kenyamanan dan persyaratan ruang akan dapat dicapai.

- Ruang ducting relatif kecil karena yang dialirkan adalah " Chilled Water ".
- Dapat menghemat biaya operasional karena mesin penggerak lebih kecil. (lihat gambar no.10).

gambar.10

SISTEM PENGHAWAAN

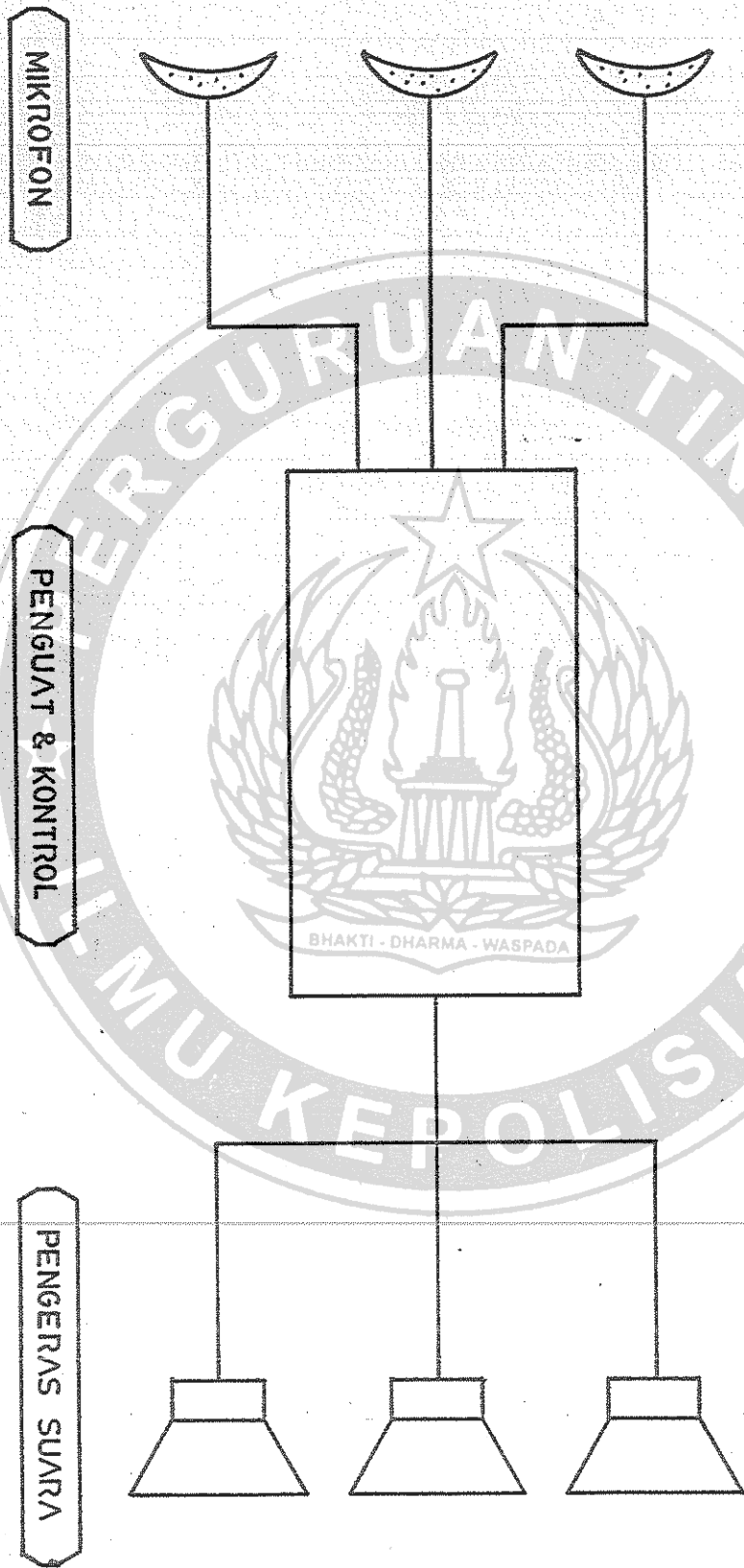


6.3.3. Sistem Tata Suara.

Pada ruang-ruang tertentu digunakan " Sistem Penguat Bunyi Saluran Tunggal ", yang terdiri dari 3 komponen pokok : mikrofon, penguat (Amplifier), dan penguas suara (loud speaker).

Cara kerja :

Mikrofon yang ditempatkan dekat sumber bunyi, akan menangkap energi bunyi yang diradiasi oleh sumber dan mengubahnya menjadi energi listrik, dan meneruskannya kepada penguat suara. Penguat suara akan memperbesar sinyal listrik dan meneruskannya kepada penguas suara, yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi diudara untuk didistribusikan kepada pendengaran dengan suatu tingkat yang dibutuhkan. (lihat gambar.11).



KOMPONEN DASAR SISTEM PENGUAT BUNYI SALURAN TUNGGAL

gambar . 11

DAFTAR PUSTAKA.

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, - Empat Puluh Tahun. 1946 - 1986.
2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia., Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) - Lampiran " Z " Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol. : Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984.
3. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar. Pokok - pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara (POLRI). Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/11/P/III/1984. tanggal 31 Maret 1984.
4. M.Dudang, "Perkembangan Kepolisian di Indonesia",. Maha barata, tanpa tahun.
5. R.Seno Soeharjo., " Serba - serbi Tentang Polisi ",. Pe nerbit R.Schenkhuizen, Bogor, tanpa tahun.
6. MC Guinness, Stein, Reynolds, " Mechanical And Electri cal Equipment For Buildings (sixth edition) ",. John Willey And Song Inc, New York, 1981.
7. Ernis Neufert, " Architect Data ", Collins, London 1980
8. Leslie L.Doelle.Eng.,M.Arch, Dra.Lea Prasetio MSc,"Akus tik Lingkungan ", Erlangga, Jakarta 10420, 1986.
9. Mildred F.Schmertz,AIA,. " Campus Planning And Design An Architectural Record Book ", Mc Graw - Hill Book Com pany.

10. An Architectural Record Book, " Building For The Art ",
Mc Graw - Hill Company.
11. Mickey A Palmer, " The Architect's Guide To Facility
Programming ", AIA.



TABEL PERINCIAN DAN LUAS RUANG (*).

• Lantai Satu meliputi :

JENIS RUANG	LUAS (M ²)
H a l l	103,68.
R.Gubernur PTIK	77,76.
R.Wagub PTIK	51,84.
R.SES PTIK	77,76.
R.Bag Minu	181,44.
R.J u a n g	77,76.
R.Ka PPITK	69,12.
R.Waka PPITK	24,48.
R.Kabid	69,12.
R.Kalablitistek	51,84.
R.Laboratorium Kriminal	267,84.
R.Laboratorium Teknologi	324.
R.R a p a t	112,32.
R.P a s b i d	24,48

• Lantai Dua meliputi :

JENIS RUANG	LUAS (M ²)
R.Ka Denma	77,76.
R.Yanum	129,6.
R.Kanit Prov	84,24.
R.Wal Prot	84,24.
R.Juru Bayar	25,92.
R.T u n g g u	25,92.
R.Kabag Log	51,84.

R.Konsbang	155,52.
R.Palangkel	56,16.
R.Bekum	25,92.
R.Bidlam	56,16.
R.Bidkum	56,16.
R.Bidbud	56,16.
R.Bidsos	56,16.
R.Bidtepol	25,92.
R.Kelompok Ahli	358,56.
R.Team Ahli	453,6.
R.R a p a t	51,84.

• Lantai Tiga meliputi :

JENIS RUANG	LUAS (M ²)
R.Kabag Pers	77,76.
R.Ks.Minpers	155,52.
R.Ks.Kesehatan	84,24.
R.Ks.Jasmani	84,24.
R.Ks.Bintal	51,84.
R.Kabag Ren	51,84.
R.Ks.Progar	77,76.
R.Ks.Sismet	77,76.
R.Ks.Wasdal	84,24.
R.Ks.Dastik	84,24.
R.Kabid	51,84.
R.Pasbid	51,84.
R.Mushola	108.

R.Teknologi	132,84.
R.Listik	103,68.
R.Minlab	112,32.
R.Minbang	233,28.
R.Pujama	168,48.

• Lantai Empat meliputi :

JENIS RUANG	LUAS (M ²)
R.Ka Korwa	77,76.
R.Kabag Minwa	155,52.
R.Ks.Tatuwa	84,24.
R.Ks.Keswa	77,76.
R.Kabag Binjuang	56,16.
R.Ks.Dianmas	56,16.
R.Ks.Bangpim	51,84.
R.Kabag Lakjarlat	56,16.
R.Ks.Opsjarlat	56,16.
R.Ks.Uji	51,84.
R.Kabag Minjarlat	51,84.
R.Ks.Kul	51,84.
R.Ks.Raps	51,84.
R.Ks.Alins	51,84.
R.Ks.Yantu	25,92.
R.Ketua Senat PMIK	155,52.
R.Senat Akademik	51,84.
R.Patun	108.
R.R a p a t	112,32.

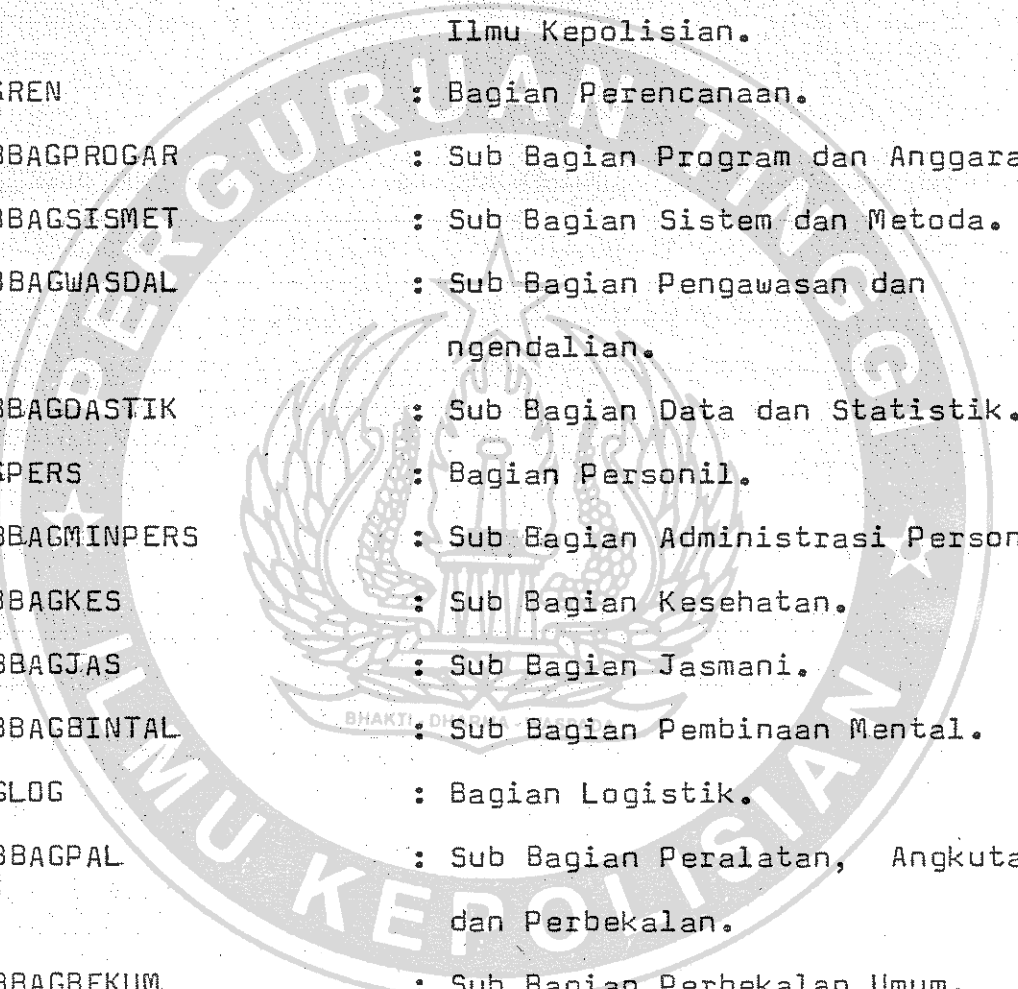
R.Pasbid	51,84.
R.Pengurus Bhayangkara	108.
Boxing Hall	448,2.
R.Ganti	56,16.

Keterangan :

(*). Tabel Perincian dan Luas Ruang pada Massa Bangunan
GEDUNG UTAMA.



DAFTAR SINGKATAN :



PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
SET PTIK	: Sekretariat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
SES PTIK	: Sekretaris Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
BAGREN	: Bagian Perencanaan.
SUBBAGPROGAR	: Sub Bagian Program dan Anggaran.
SUBBAGSISMET	: Sub Bagian Sistem dan Metoda.
SUBBAGWASDAL	: Sub Bagian Pengawasan dan <u>Pe</u> ngendalian.
SUBBAGDASTIK	: Sub Bagian Data dan Statistik.
BAGPERS	: Bagian Personil.
SUBBAGMINPERS	: Sub Bagian Administrasi Personil
SUBBAGKES	: Sub Bagian Kesehatan.
SUBBAGJAS	: Sub Bagian Jasmani.
SUBBAGBINTAL	: Sub Bagian Pembinaan Mental.
BAGLOG	: Bagian Logistik.
SUBBAGPAL	: Sub Bagian Peralatan, Angkutan dan Perbekalan.
SUBBAGBEKUM	: Sub Bagian Perbekalan Umum.
SUBBAGKONBANG	: Sub Bagian Konstruksi Bangunan.
BAGMINU	: Bagian Administrasi Umum.
SUBBAGTU	: Sub Bagian Tata Usaha.
SUBBAGREPROD	: Sub Bagian Redaksi dan Produksi.
SUBBAGSUS	: Sub Bagian Khusus.

DENMA : Detasemen Markas.

UNIT PROV : Unit Provost.

UNIT WALPROT : Unit Pengawasan dan Protokol.

UNIT YANUM : Unit Pelayanan Umum.

FIK : Fakultas Ilmu Kepolisian.

SET FIK : Sekretariat Fakultas Ilmu Ke-
polisian.

BAGRENDALDIK : Bagian Perencanaan dan Pengenda-
lian Pendidikan.

SUBBAGKUR : Sub Bagian Kurikulum.

SUBBAGRENJARLAT : Sub Bagian Rencana Pengajaran &
latihan.

BAGMINDIK : Bagian Administrasi Pendidikan.

SUBBAGMINTRANDOK : Sub Bagian Administrasi, Trans -
kripsi dan Dokumentasi.

SUBBAGGADIK : Sub Bagian Tenaga Pendidik.

BAGEVADASI : Bagian Evaluasi dan Validasi.

SUBBAGNILEV : Sub Bagian Penilaian dan Evalua-
si.

SUBBAGVALUM : Sub Bagian Validasi dan Alumni.

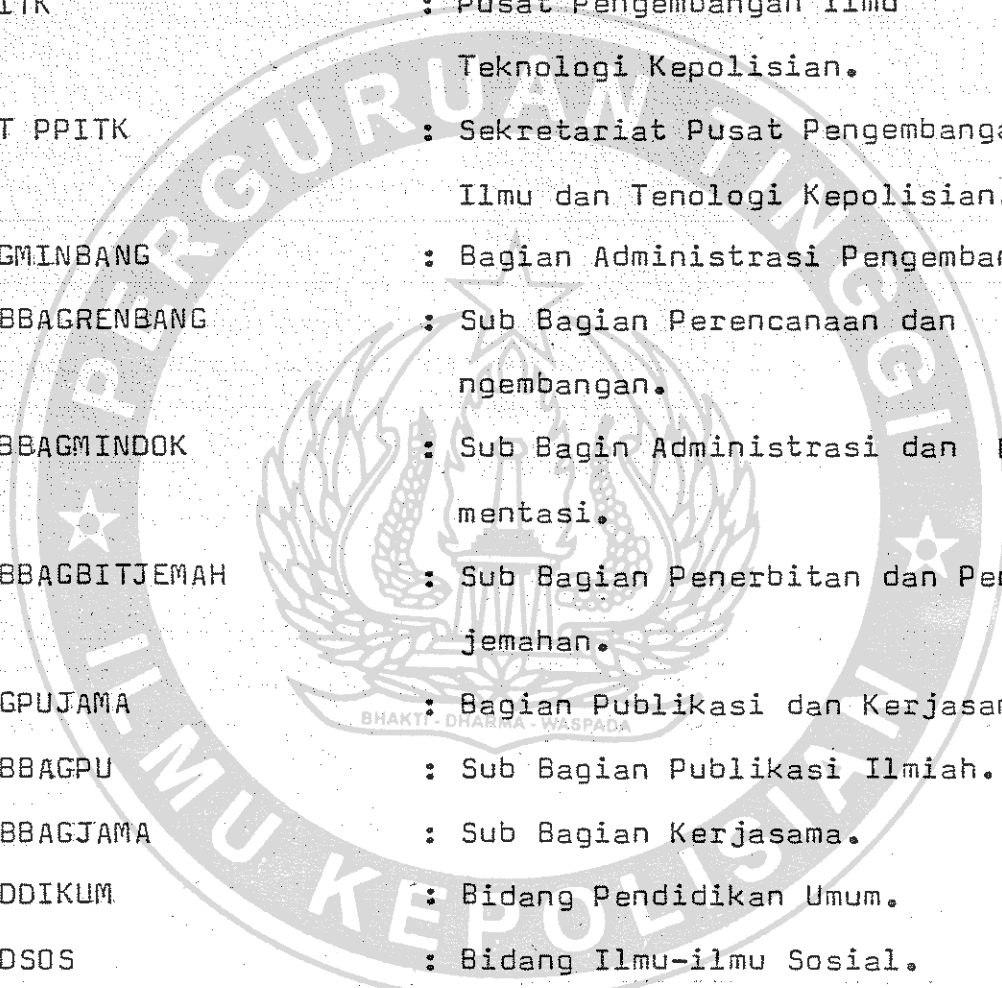
BAGPUSTAKA : Bagian Perpustakaan.

SUBBAGTAK : Sub Bagian Perpustakaan.


SUBBAGSEM : Sub Bagian Sejarah dan Museum.

DEPFALJUANG : Departemen Falsafah dan Kejuang-
an.

DEPKUMMAS : Departemen Hukum dan Kemasyara-
katan.



DEPJEMEN : Departemen Manajemen.
 DEPFORENSIK : Departemen Forensik.
 DEPOPS : Departemen Operasi.
 LEMJARSA : Lembaga pengajaran Bahasa.
 GADIK : Tenaga Pendidik.
 PPITK : Pusat Pengembangan Ilmu dan
 Teknologi Kepolisian.
 SET PPITK : Sekretariat Pusat Pengembangan -
 Ilmu dan Tenologi Kepolisian.
 BAGMINBANG : Bagian Administrasi Pengembangan
 SUBBAGRENBANG : Sub Bagian Perencanaan dan Pe
 ngembangan.
 SUBBAGMINDOK : Sub Bagin Administrasi dan Doku
 mentasi.
 SUBBAGBITJEMAH : Sub Bagian Penerbitan dan Penter
 jemahan.
 BAGPUJAMA : Bagian Publikasi dan Kerjasama.
 SUBBAGPU : Sub Bagian Publikasi Ilmiah.
 SUBBAGJAMA : Sub Bagian Kerjasama.
 BIDDIKUM : Bidang Pendidikan Umum.
 BIDSOS : Bidang Ilmu-ilmu Sosial.
 BIDLAM : Bidang Ilmu-ilmu Alamiah.
 BIDBUD : Bidang Pengetahuan Budaya.
 BIDTEKPOL : Bidang Teknologi Kepolisian.
 LABLITISTEK : Laboratorium Penelitian Krimina-
 listik dan Teknologi.
 BAGMINLAB : Bagian Administrasi Laboratirium



BAGLISTEK : Bagian Kriminalistik.

BAGTEK : Bagian Teknologi.

POK AHLI : Kelompok Ahli.

OPSIARLAT : Operasi Pengajaran dan Latihan.

BAGMINJARLAT : Bagian Administrasi Pengajaran -
dan Latihan.

SUBBAGYANTU : Sub Bagian Pelayanan Dosen dan
Tata Usaha.

SUBBAGLIN : Sub Bagian Alins/Alongis.

BAGLAKJARLAT : Bagian Pelaksana Pengajaran dan
Latihan.

SUBBAGKUL : Sub Bagian Perkuliahan.

SUBBAGRAP : Sub Bagian Penerapan.

SUBBAGUJI : Sub Bagian Ujian.

KORWA : Korps Mahasiswa.

BAGMINWA : Bagian Administrasi Kemahasiswa-
an.

SUBBAGTATUWA : Sub Bagian Data dan Tata Usaha
Kemahasiswaan.

SUBBAGKESWA : Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa
wa.

BAGBINJUANG : Bagian Pembinaan Kejuangan.

SUBBAGBANGPIM : Sub Bagian Pengembangan Kepemim-
pinan.

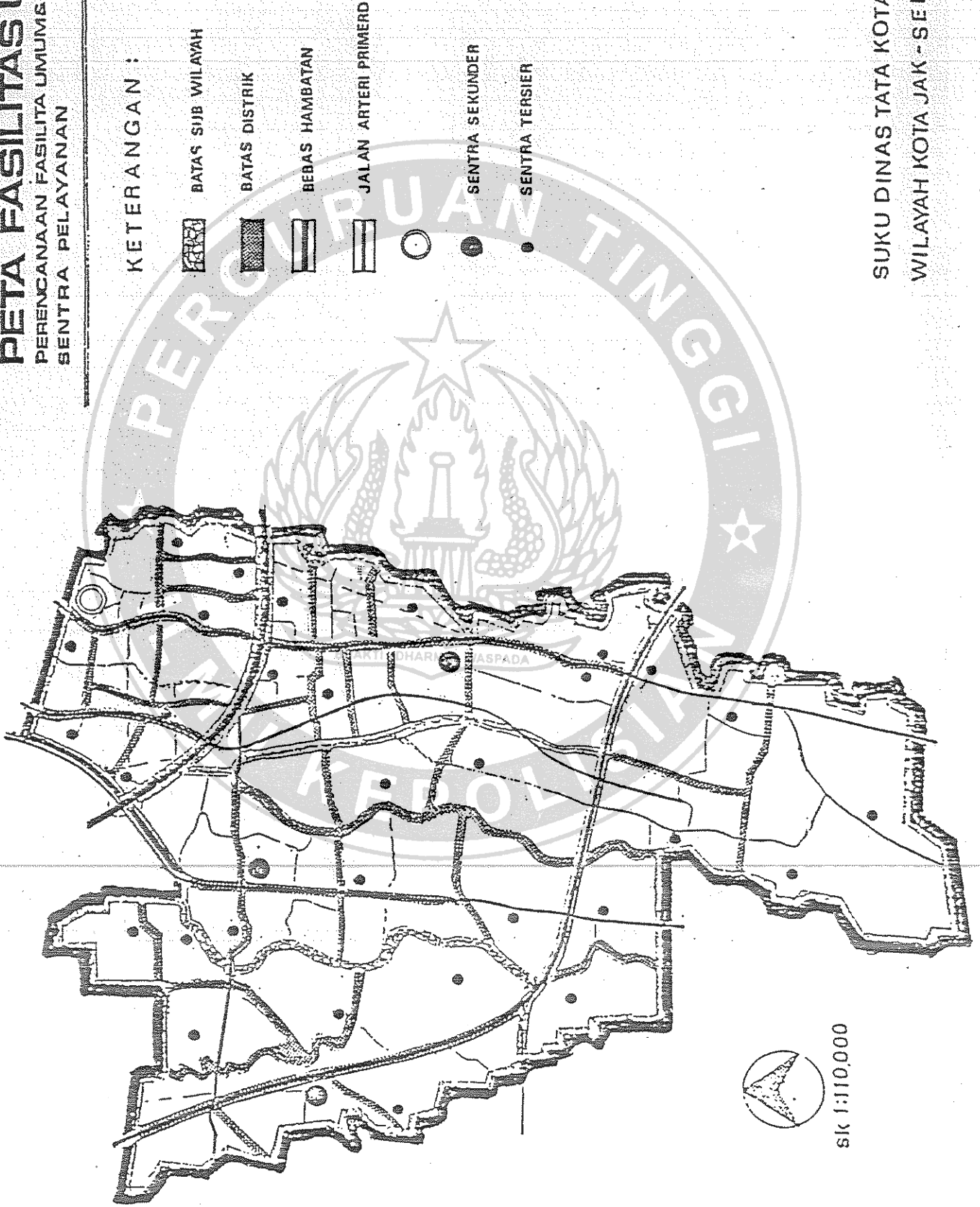
SUBBAGDIANMAS : Sub Bagian Pengabdian Masyarakat

POK PATUN : Kelompok Perwira Penuntun.







C 14 D

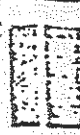
PETA FASILITAS UMUM


PERENCANAAN FASILITA UMUM & PENYEBARAN SENTRA PELAYANAN



KETERANGAN :

-  BATAS SUB WILAYAH
-  BATAS DISTRIK
-  BEBAS HAMBATAN
-  JALAN ARTERI PRIMER
-  SENTRA SEKUNDER
-  SENTRA TERSIER

SUKU DINAS TATA KOTA 

WILAYAH KOTA JAK - SEL 










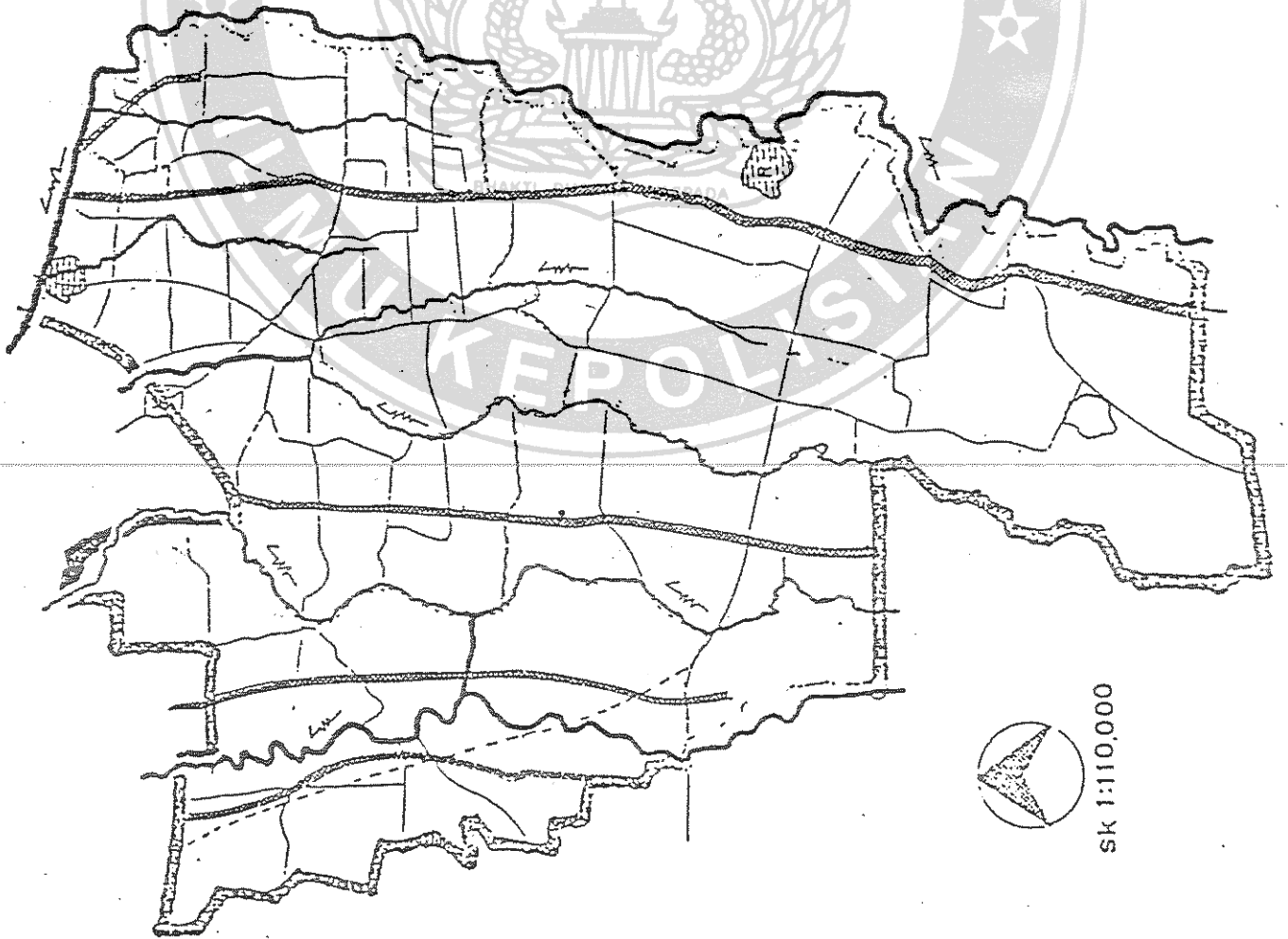
sk 1:110.000

(13)

PETA DRAINASE & SANITASI

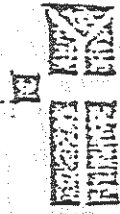
KETERANGAN :

-  SALURAN MAKRO PRIMER
-  SALURAN MAKRO SEKUNDER
-  POLDER AREA
-  WADUK RENCANA
-  WADUK EXISTING
-  MMN SEWER
-  BATAS DAS



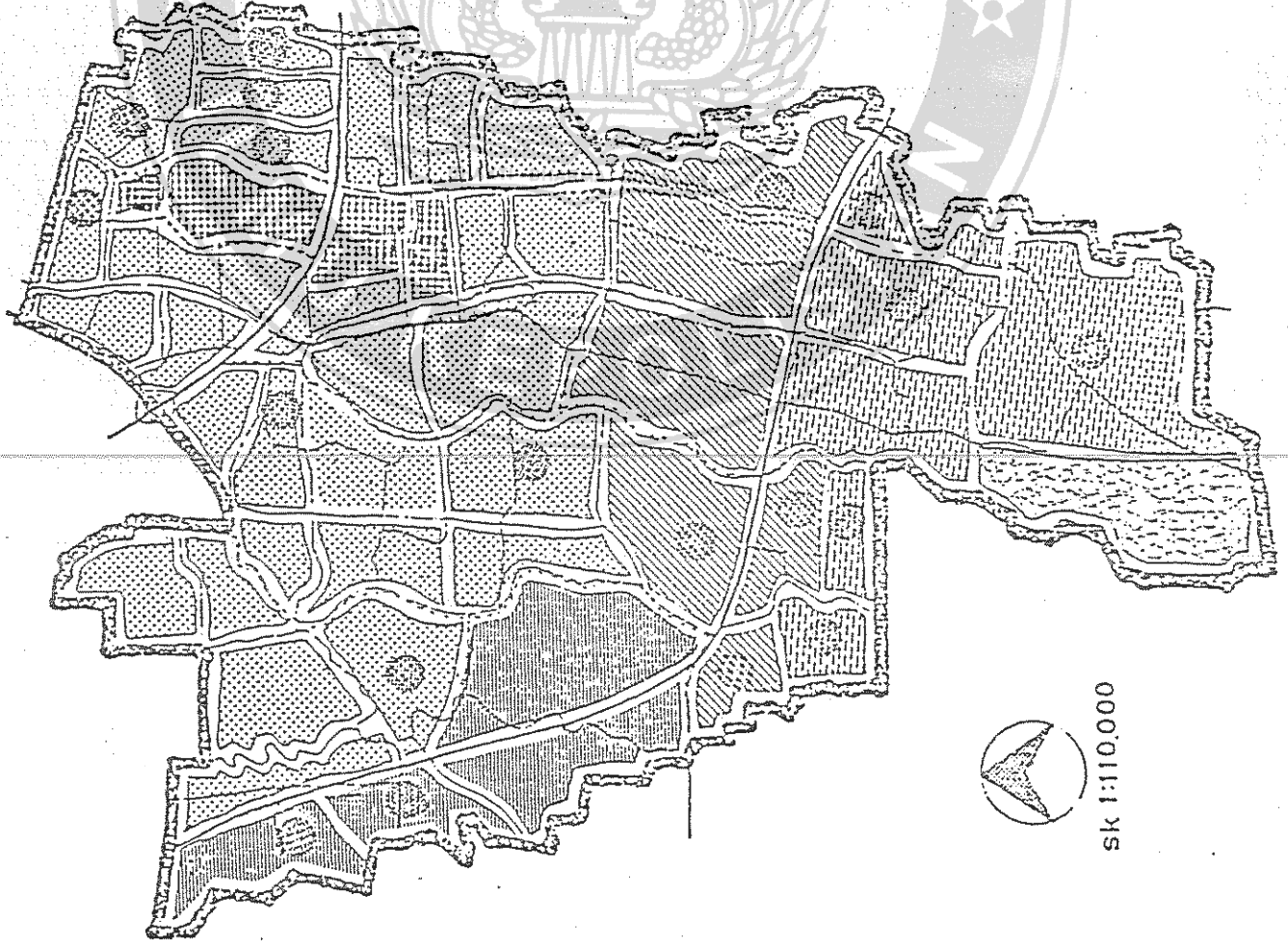
Sk 1:110.000

SUKU DINAS TATA KOTA
 WILAYAH KOTA JAK - SEL



PETA FASILITAS UMUM

KEBIJAKSANAAN POKOK & APLIKASI RUANG

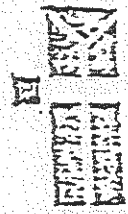


KETERANGAN :

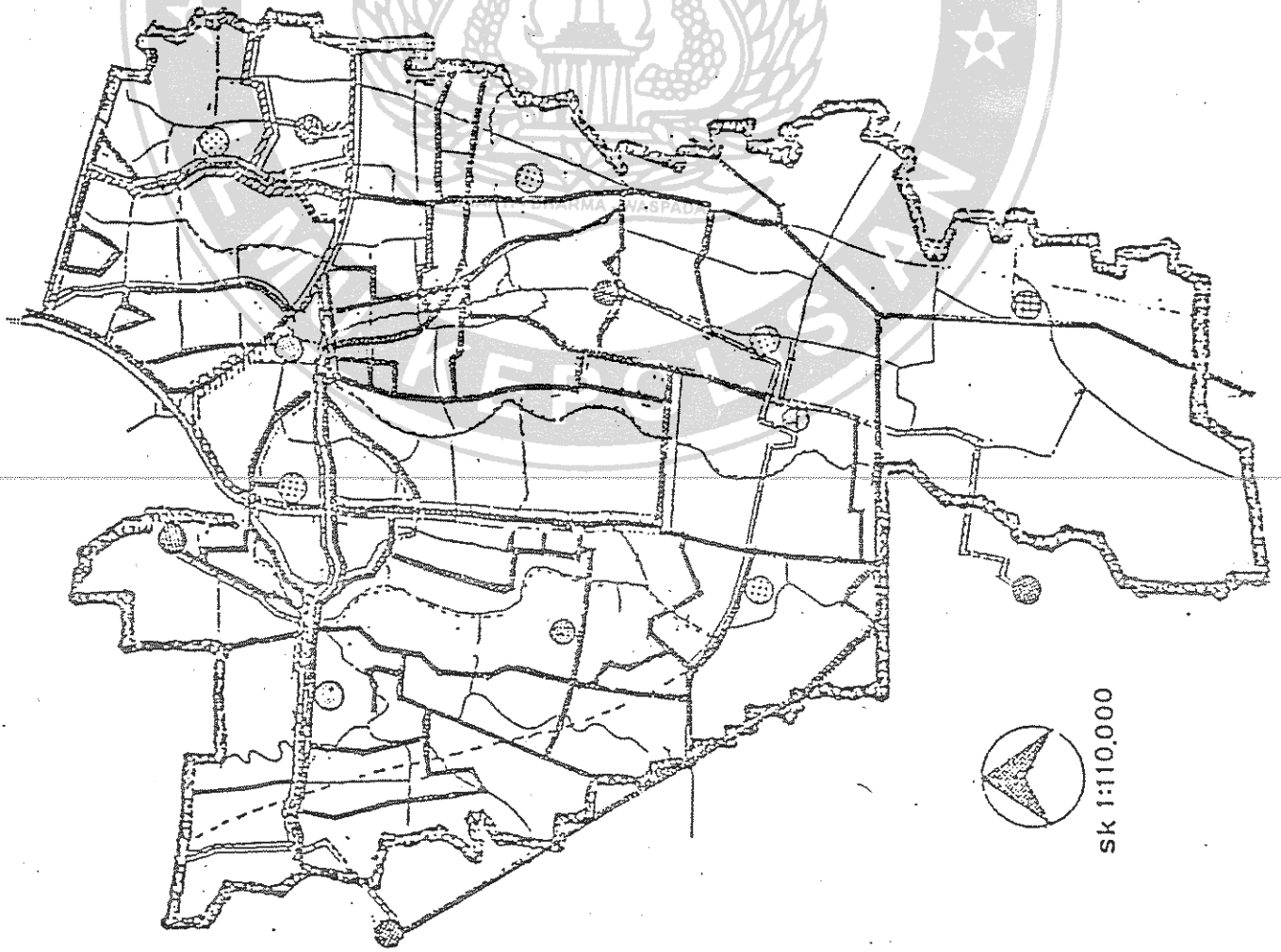
- [Empty Box] --- RENCANA DAERAH SANGAT PADAT PENGGUNAAN PERUMAHAN
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM SANGAT TINGGI PENYEDIAAN LOKASI TERBATAS
PENGGUNAAN STANDARD DIPERKENANKAN MINIMUM 60% (UKURAN STANDARD-
YANG DITETAPKAN
- [Grid Pattern] --- MULTI PURPOSE & BERTINGKAT 3 - 4 LANTAI
- [Vertical Lines] --- RENCANA DAERAH SANGAT PADAT
PENGGUNAAN TANAH CAMPURAN PERUMAHAN & PERKANTORAN
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM SANGAT TINGGI PENYEDIAAN LOKASI TERBATAS
PENGGUNAAN STANDARD YANG DIPERKENANKAN MINIMUM 60 % UKURAN
STANDARD YANG DITETAPKAN
- [Diagonal Lines] --- RENCANA DAERAH PADAT PENGGUNAAN TANAH PERUMAHAN
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM TINGGI PENYEDIAAN LOKASI BARU DAN
PEREMAJAAN
- [Dotted Pattern] --- PENGGUNAAN STANDARD DIPERKENANKAN MINIMUM 75 % UKURAN YANG
DITETAPKAN
- [Horizontal Lines] --- RENCANA DAERAH KEPADATAN SEDANG & RENDAH
PENGGUNAAN TANAH CAMPURAN PERUMAHAN & FASILITASNYA
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM SEDANG MELAYANI PEMUKIHAN SETEMPAT
- [Cross-hatch] --- PENGGUNAAN UKURAN STANDARD YANG DITETAPKAN
- [Vertical Lines] --- RENCANA DAERAH PADAT PENGGUNAAN TANAH PERUMAHAN
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM TINGGI PENYEDIAAN LOKASI BARU BESAR
PENGGUNAAN STANDARD IDEAL
- [Cross-hatch] --- RENCANA DAERAH KHUSUS (MIX FARMING)
PENGGUNAAN STANDARD KHUSUS DENGAN PERSYARATAN KHUSUS YANG
DISESUAKAN DENGAN KONDISI LINGKUNGAN LEBIH ALAMIAH SETEMPAT
DIPRIORITASKAN FASILITAS PENDIDIKAN KEJUJURAN (PERTANAHAN) DAN
FASILITAS SOSIAL-BUDAYA
- [Horizontal Lines] --- RENCANA KEPADATAN RENDAH
KEBUTUHAN FASILITAS UMUM SEDANG PENYEDIAAN LOKASI BARU BESAR
- [Grid Pattern] --- PENGGUNAAN STANDARD IDEAL DENGAN JALUR TERBUKA DARI BUKITAN

SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL
















Sk 1:110.000



PETA : JARINGAN UTILITAS (11)

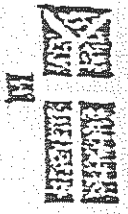


KETERANGAN :

-  TELEKOM EXISTING
-  KTO EXISTING
-  PAM/PDAM EXISTING
-  MINI PLAN EXISTING
-  GAS EXISTING
-  RUMAH POMPA GAS
-  PLN SALURAN UDARA
-  PLN GROUND CABLE
-  GI EXISTING
-  TELEKOM RENCANA
-  KTO RENCANA
-  PAM/PDAM RENCANA
-  MINI PLAN RENCANA
-  GAS RENCANA
-  GI RENCANA (PLN)









SK 1:110,000

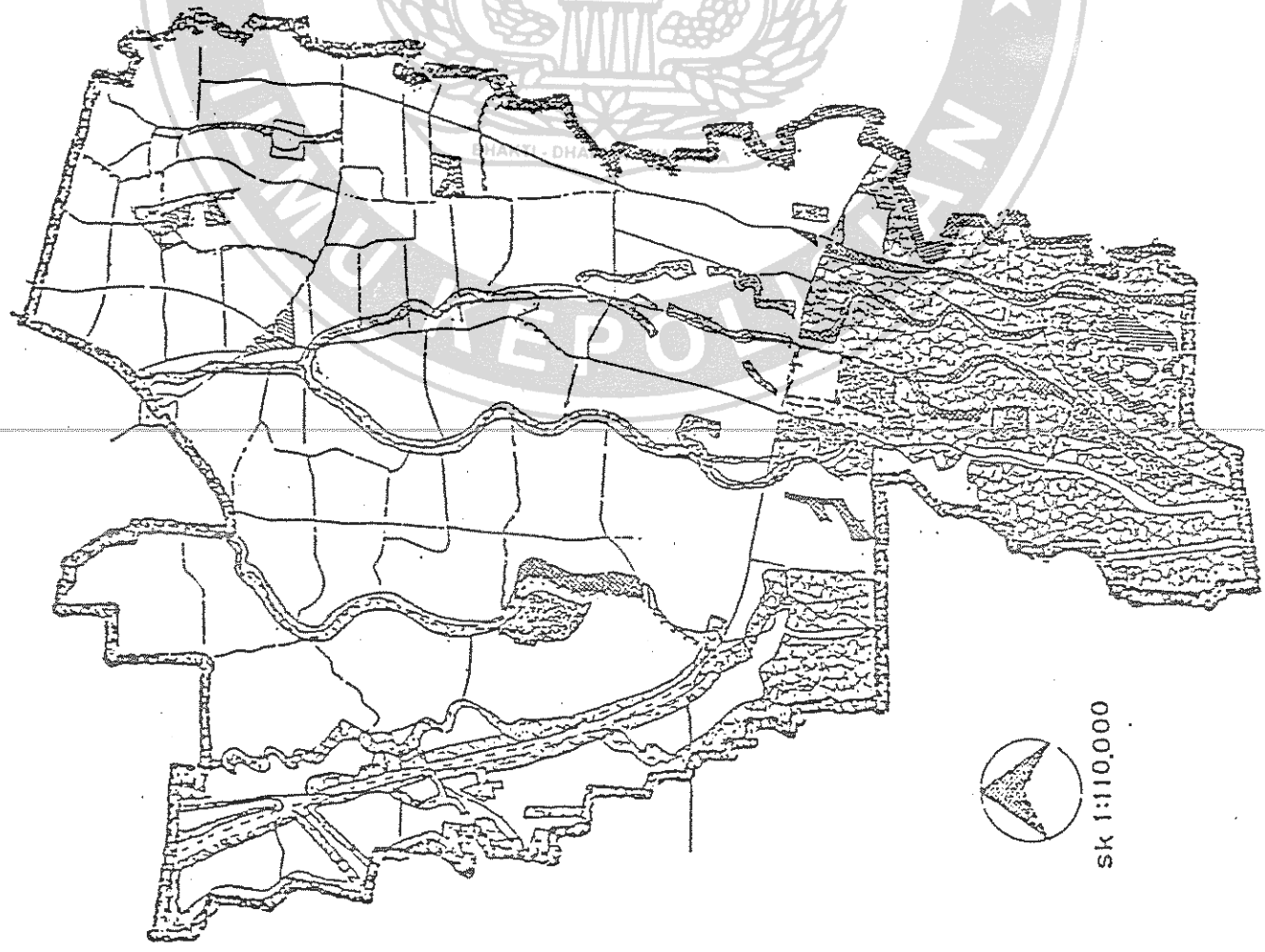


SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL

PETA : (10) RUANG TERBUKA HIJAU

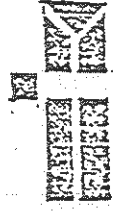
KETERANGAN :

-  HIJAU PENGAMAN
-  HIJAU RENDAH
-  HIJAU REKREASI/OLAH RAGA/PEMAKAN/TAMAN
-  BATAS DAERAH KHUSUS
-  PHB
-  PHB



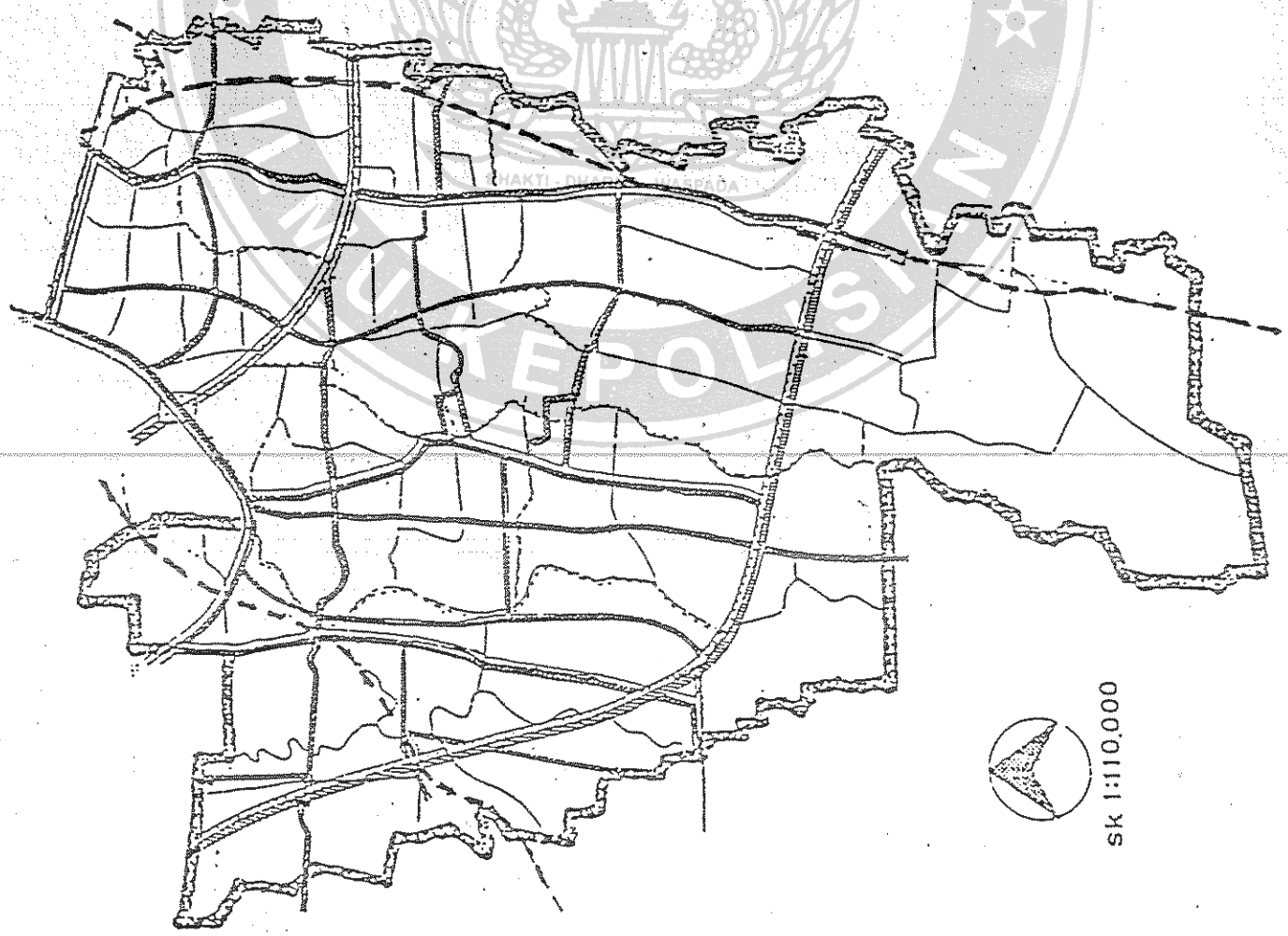
sk 1:110.000

SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL















{B}

PETA JARINGAN LINTASAN ANGKUTAN BARANG



KETERANGAN :

-  LINTASAN KA
-  LINTASAN TRUK BESAR/PETI KEMAS
-  LINTASAN TRUK GANDENGAN
-  LINTASAN TRUK SEDANG
-  LINTASAN TRUK KECIL
-  STASIUN KA PRIMER
-  RENCANA PASAR INDUK SAYUR
- 
- 
- 
- 
- 

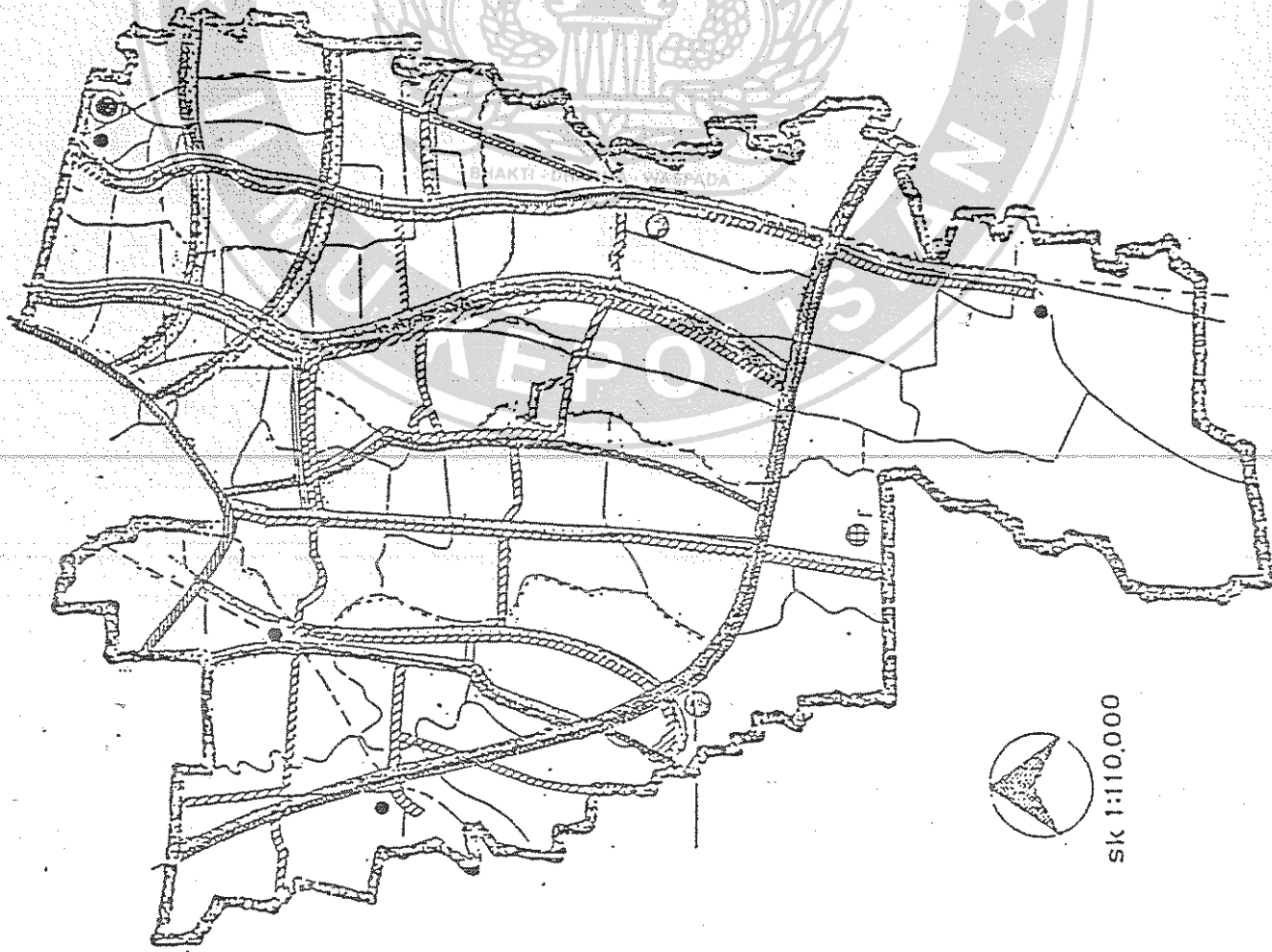


Sk 1:110.000



















SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL

PETA : (7) POLA ANGGKUTAN UMUM



KETERANGAN :

-  LINTASAN REL KA
-  LINTASAN BIS ANTAR KOTA
-  LINTASAN BIS TINGKAT
-  LINTASAN BIS BESAR
-  LINTASAN BIS SEDANG
-  LINTASAN MIKROBIS
-  BATAS WILAYAH
-  STASIUN BIS ANTAR KOTA
-  STASIUN BIS PRIMER
-  STASIUN BIS SEKUNDER
-  STASIUN BIS TERSIER
-  STASIUN BIS LOKAL
-  STASIUN BIS PANGKALAN
-  STASIUN KA PRIMER
-  STASIUN KA SEKUNDER
-  STASIUN KA TERSIER



Sk 1:110.000



SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL

JAK - PUSAT






(2)

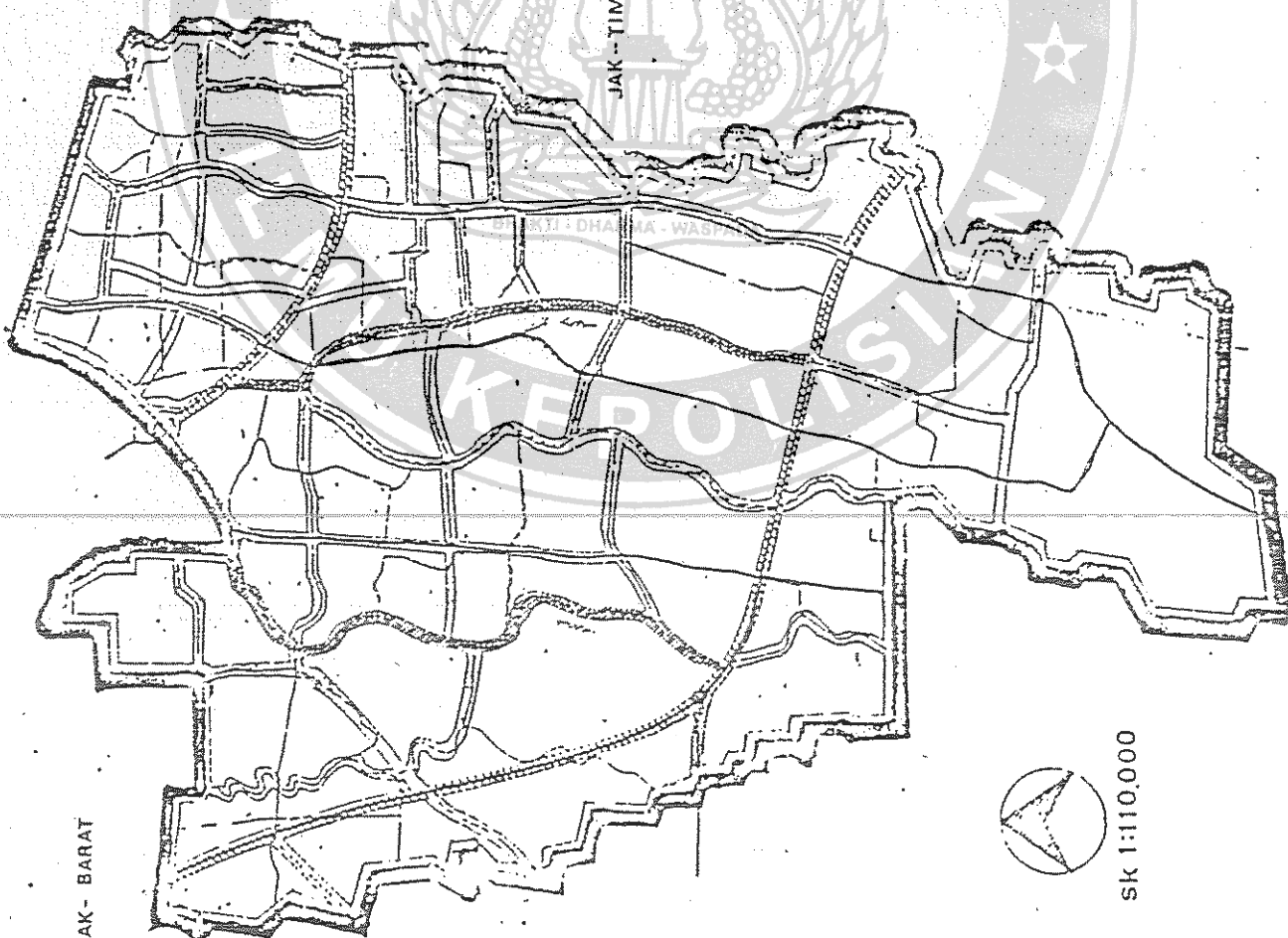
PETA STRUKTUR KOTA

JAK - BARAT

JABAR

KETERANGAN :

-  JALAN BEBAS HAMBATAN
-  BATAS WILAYAH
-  UNIT PLANNING SUB WILAYAH
-  UNIT PLANNING DISTRIK
-  KALI



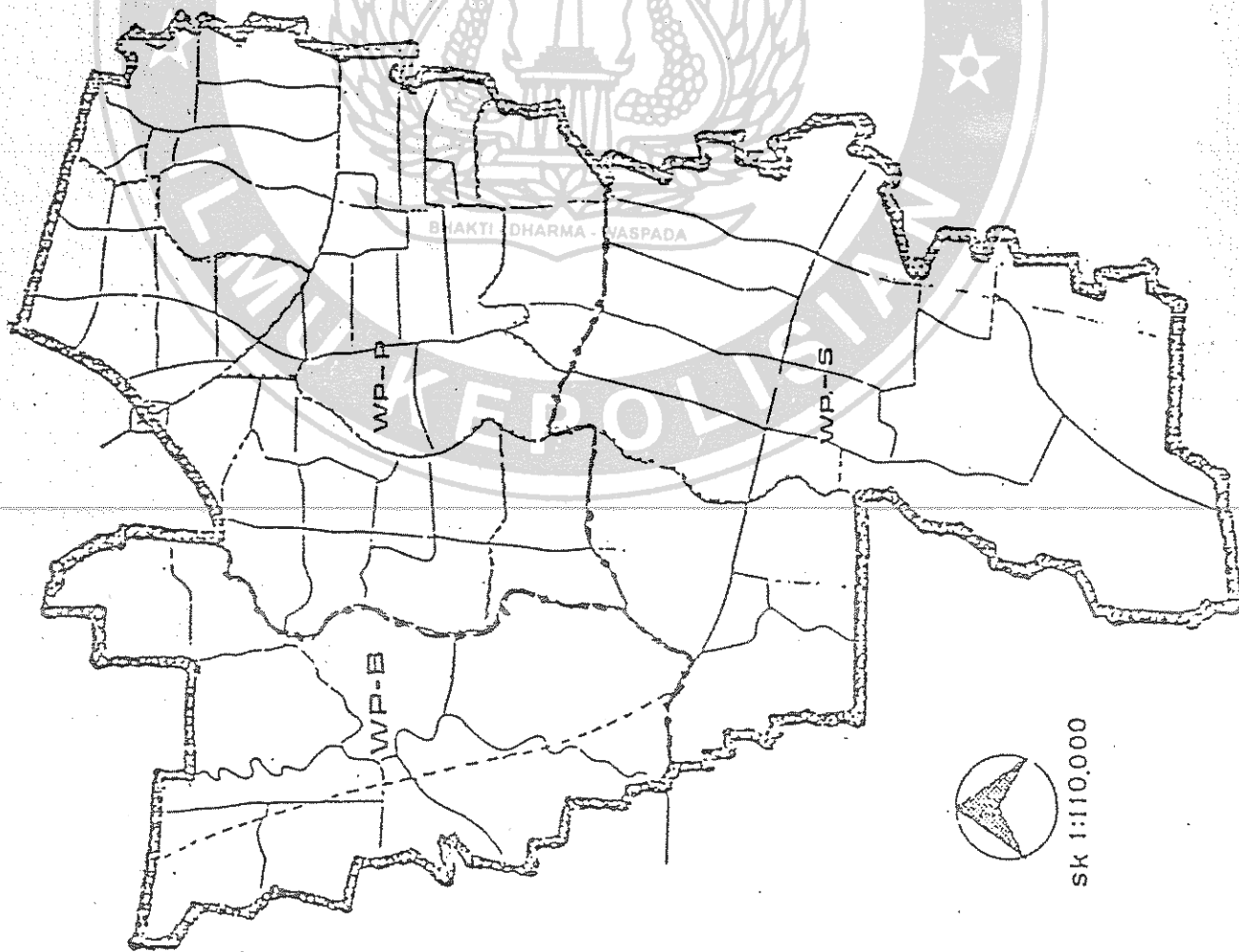
Sk 1:110.000

SUKU DINAS TATA KOTA 

WILAYAH KOTA JAK - SEL 

(1)

PETA PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN



KETERANGAN :

WP-B WILAYAH PENGEMBANGAN BARAT (3.290 Ha)

WP-P WILAYAH PENGEMBANGAN PUSAT (5.574)

WP-S WILAYAH PENGEMBANGAN SELATAN (5.633 Ha)



SK 1:110.000

SUKU DINAS TATA KOTA
WILAYAH KOTA JAK - SEL



**RENCANA BAGIAN
WILAYAH KOTA
TAHUN 2005**

**RUANG TERBUKA HIJAU
TAHUN 1985**

JADUAL

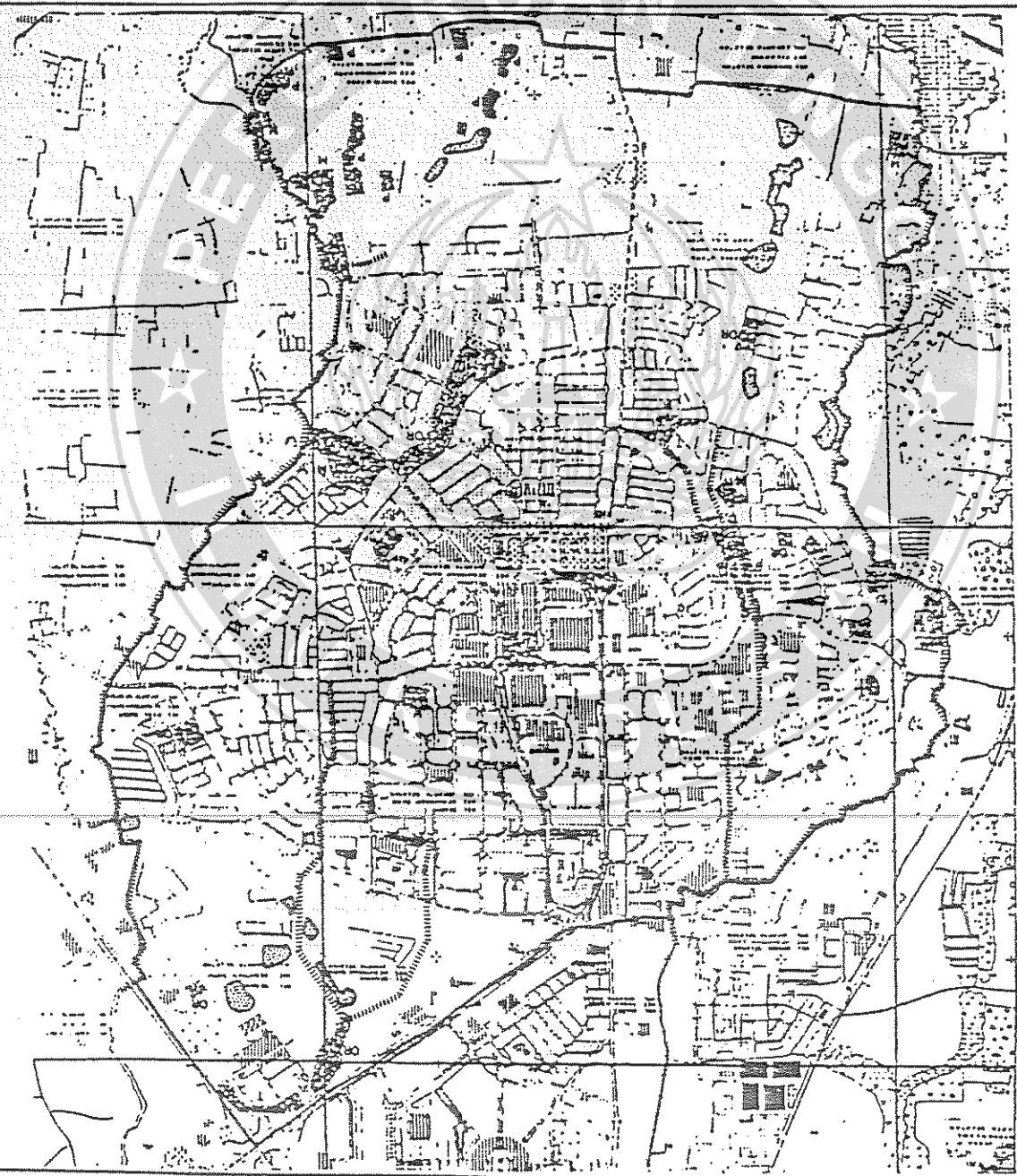
LEGENDA :

- TAHAN LINGRUHOAN
- LAPANGAN OLAH RAGA
- LAHAN PERTANIAN
- TANAH PEHAKAMAN
- TANAH ROSONG
- KALI / WADIK

- Batas pemukiman
- Batas pemerintahan
- Batas kawasan
- Batas jalan
- Batas sungai

NO	PETERANGAN	REVISI	TAHUN

SKALA







KECAMATAN KEBAYORAN BARU

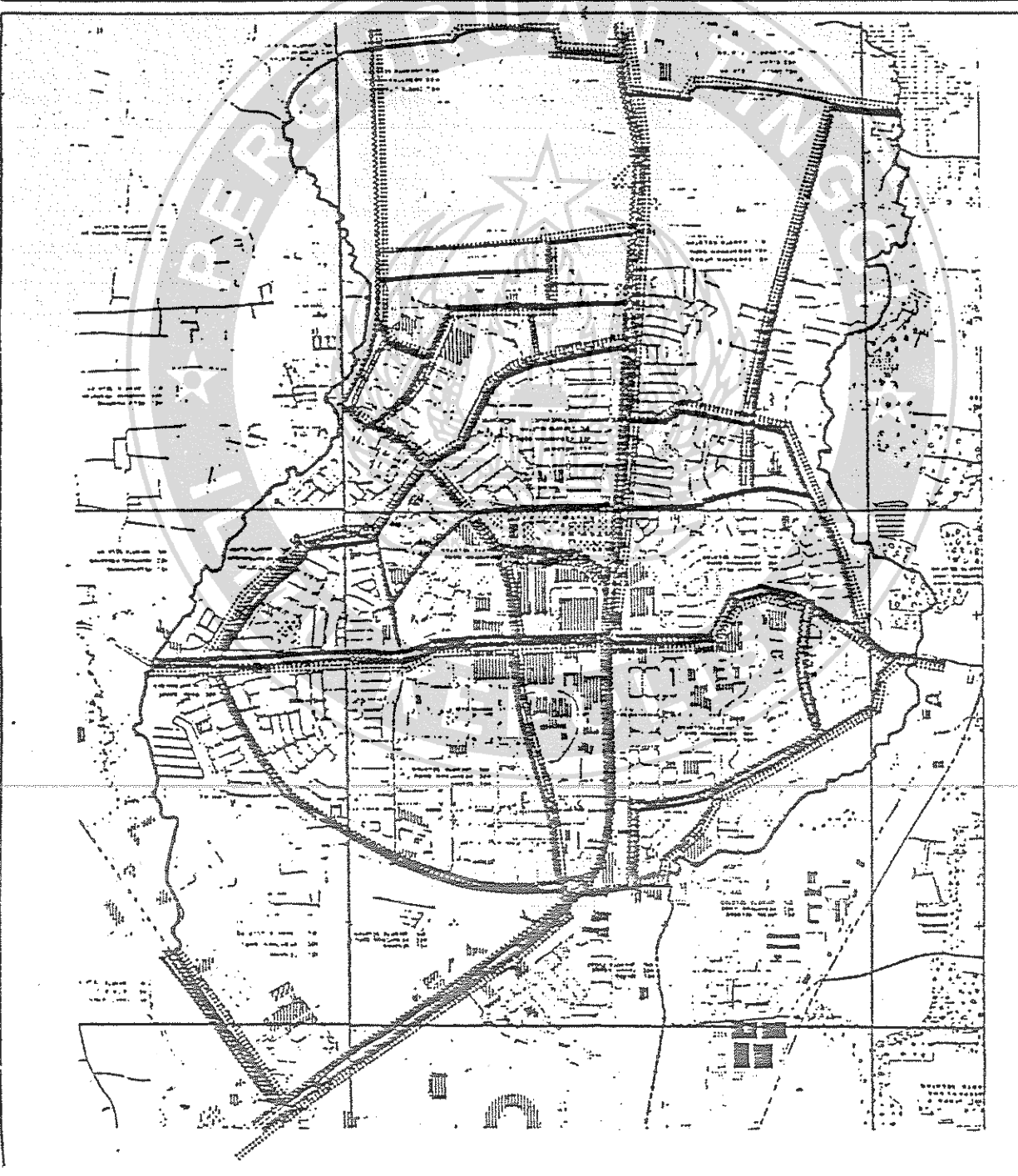
RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA TAHUN 2005

JUDUL :
LINTASAN ANGKUTAN UMUM
DAN SARANA KELENGKAPANNYA
TAHUN 2005

LEGENDA:

-  LINTASAN BIS TINGKAT
-  LINTASAN BIS BESAR
-  LINTASAN MIKROBUS
-  STASIUN BIS DALAM KOTA

-  Garis perbatasan
-  Jalan
-  Saluran drainase
-  Garis air
-  Garis listrik
-  Garis telekomunikasi



REVISI		KETERANGAN	
NO	REVISI	NO	REVISI

DIVISI	NO PROJEK	
DIREKTORAT		A1423
DIVISI		
TANGGAL		
NO LEGENDA		
SHEET 1 : 1		



KECAMATAN KEBAYORAN BARU






**RENCANA BAGIAN
WILAYAH KOTA
TAHUN 2005**

JUDUL :

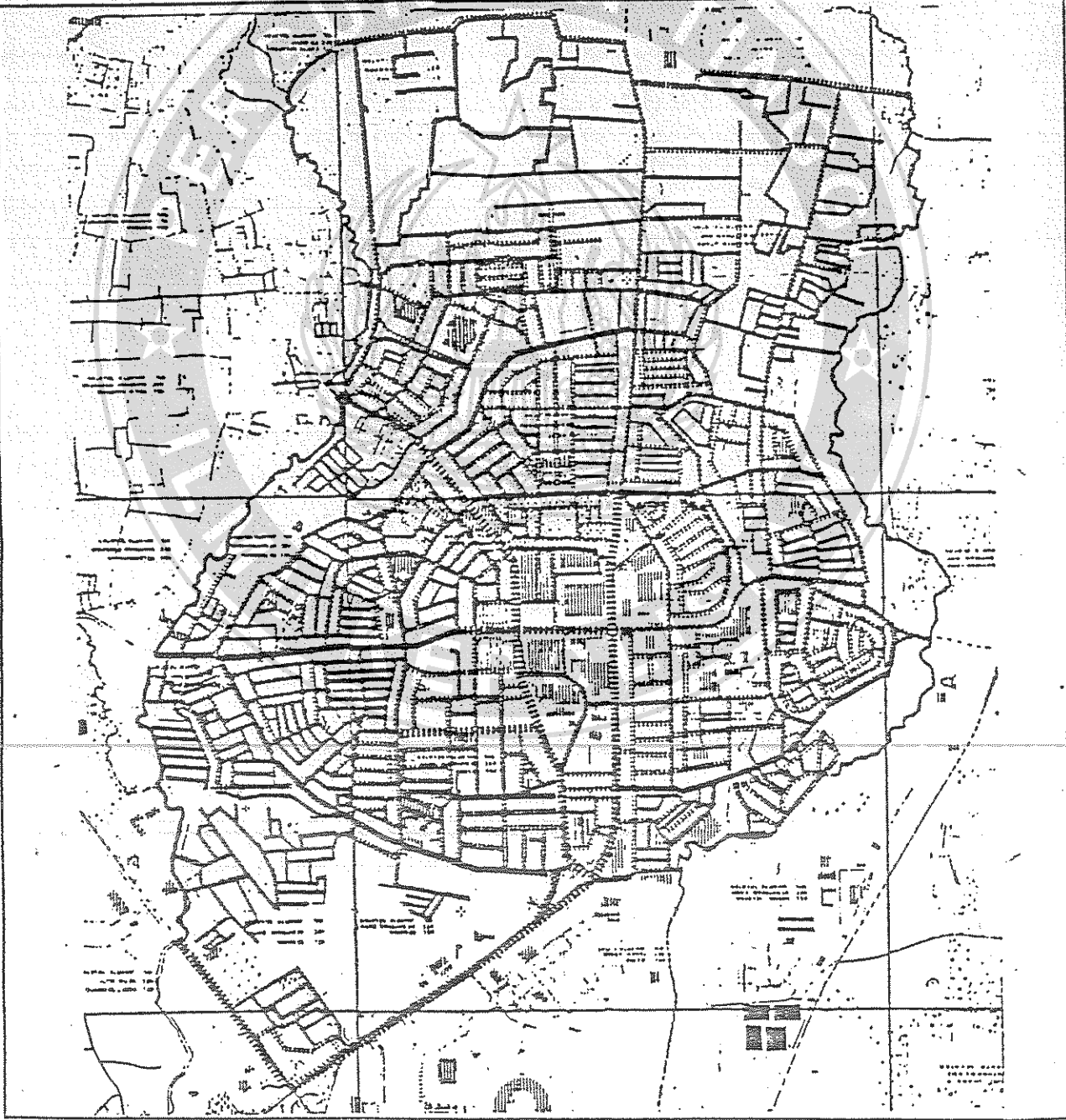
JARINGAN JALAN TAHUN 1985

LEGENDA :

-  JALAN LEBAR > 30 M
-  JALAN LEBAR 15 - 30 M
-  JALAN LEBAR 8 - 15 M
-  JALAN LEBAR, 5 - 8 M

-  Saluran Perumahan
-  Saluran Industri
-  Saluran Pertanian
-  Saluran Air
-  Saluran Drainase

NO	REPERUBAHAN	REVISI	PARAF
1			
REPERUBAHAN			
NO	REPERUBAHAN	REVISI	PARAF
1			
REVISI			
NO	REVISI	REVISI	PARAF
1			
REVISI			
NO	REVISI	REVISI	PARAF
1			
REVISI			



KECAMATAN KEBAYORAN BARU

RENCANA BAGIAN
WILAYAH KOTA
TAHUN 2005

JUDUL

PENGGUNAAN TANAH
TAHUN 1985

LEGENDA :

- PERUMAHAN
- FASILITAS UMUM
- JASA / KOMERSIL / PERKANTORAN
- PEMERINTAHAN
- INDUSTRI
- HIJAU DENGAN BANGUNAN
- HIJAU TANPA BANGUNAN
- WADUK / HALI
- JALAN
- Daerah pemukiman
- Daerah komersial
- Daerah industri
- Daerah hijau
- Daerah lain
- Daerah perairan

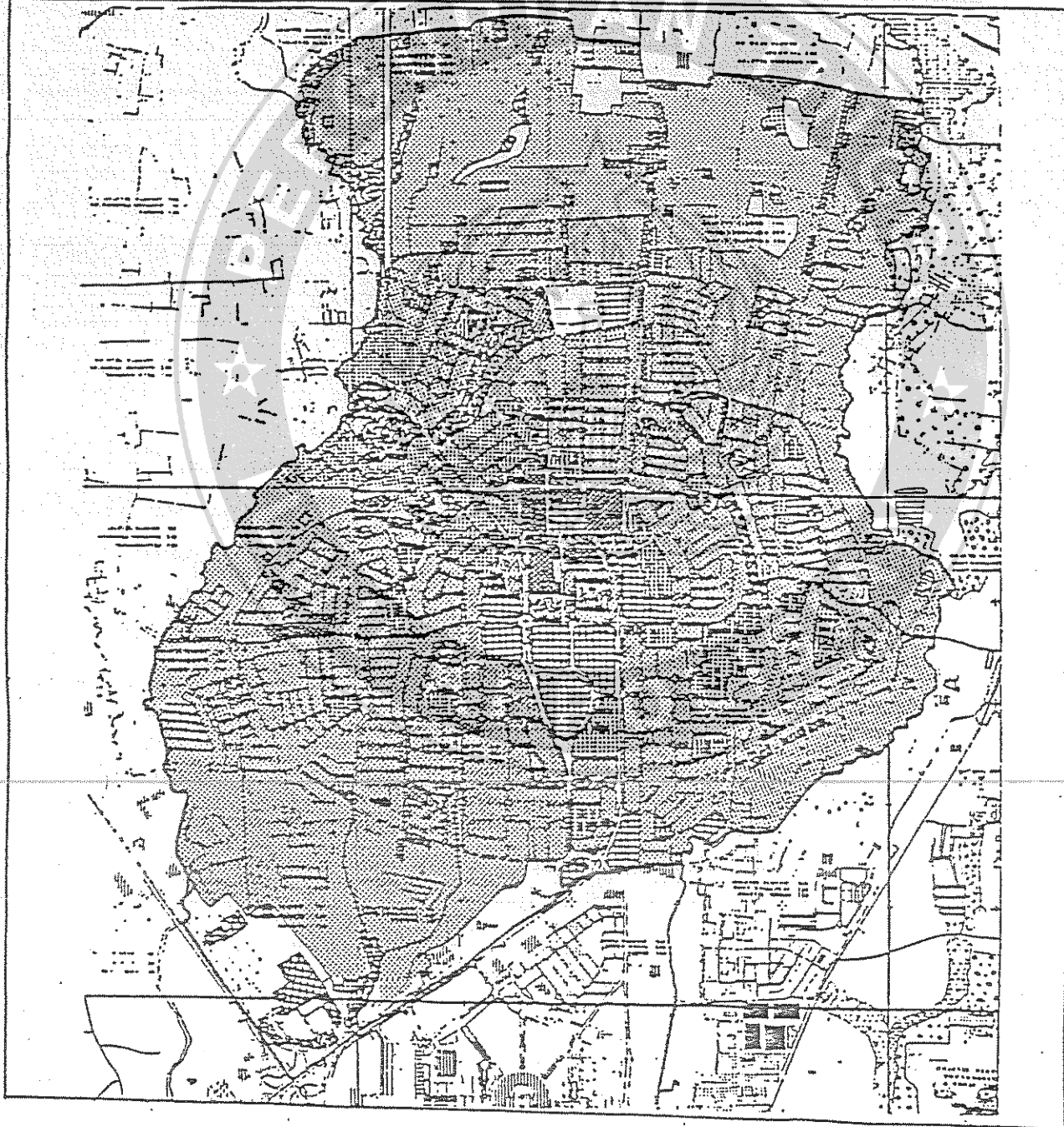
KELEMBAGAN		REVISI	NO.

Desain	

A.11.2



KEJANTHAN DAERAH KHUSUS JAKARTA
DINAS TATA KOTA



KECAMATAN KEBAYORAN BARU

RENCANA BAGIAN
WILAYAH KOTA
TAHUN 2005

JUDUL :
BATAS ADMINISTRASI

- LEGENDA :
- BATAS KECAMATAN
 - BATAS KELURAHAN

- Batas perkebunan
- Batas pemukiman
- Batas perkotaan
- Batas kawasan
- Batas air
- Batas laut
- Batas sungai

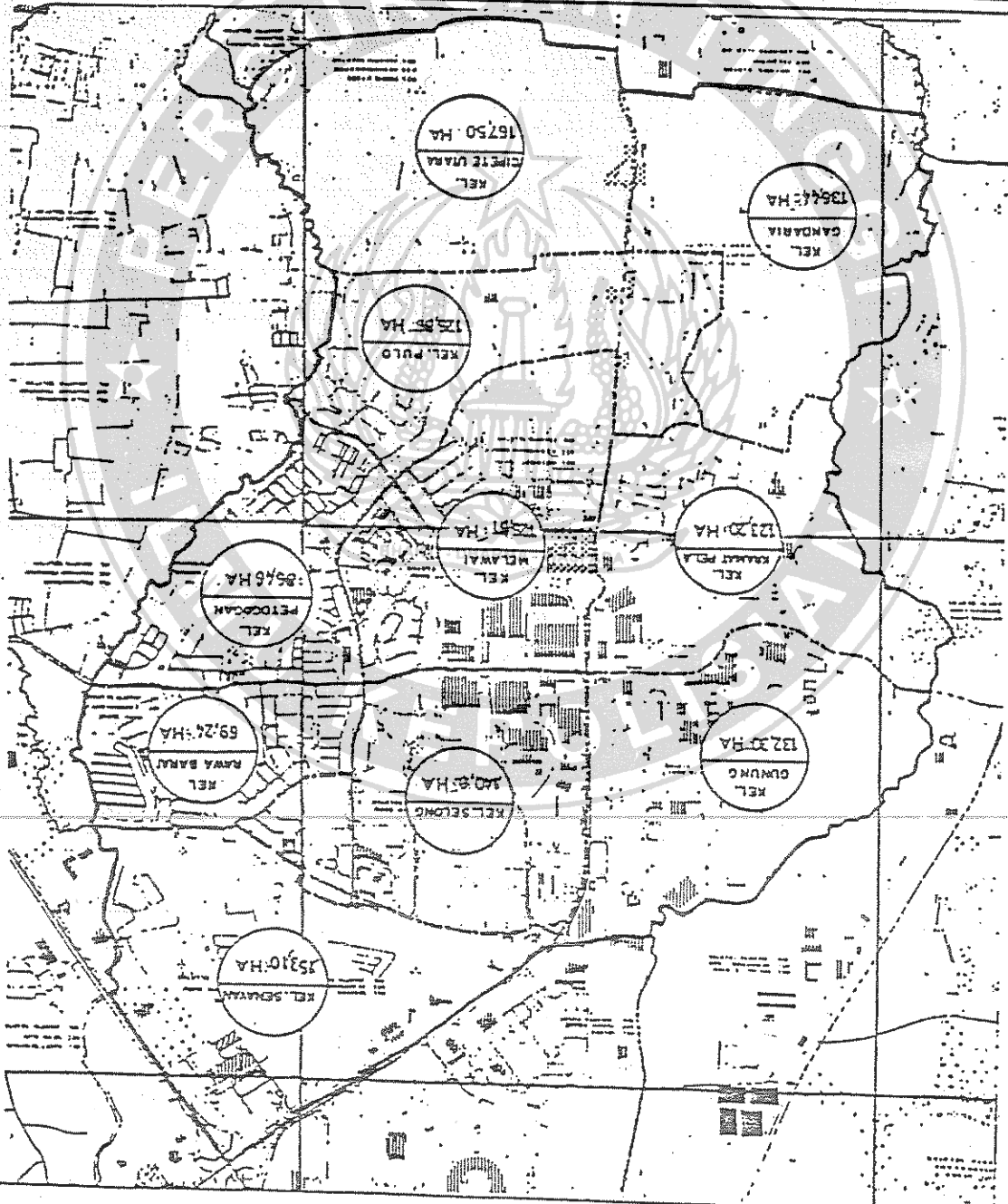
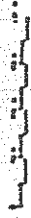
REVISI		NO.	TGL
NO.	REVISI		

RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT	
NO.	RUMAH SAKIT	NO.	RUMAH SAKIT

PERUSAHAAN		PERUSAHAAN	
NO.	PERUSAHAAN	NO.	PERUSAHAAN

KAWASAN PERUSAHAAN		KAWASAN PERUSAHAAN	
NO.	KAWASAN PERUSAHAAN	NO.	KAWASAN PERUSAHAAN

KAWASAN PERUSAHAAN		KAWASAN PERUSAHAAN	
NO.	KAWASAN PERUSAHAAN	NO.	KAWASAN PERUSAHAAN



KECAMATAN KEBAYORAN BARU

**“PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN”
DI JAKARTA**



SINOPSIS

**TA - 501 TAHUN 1988 - 1989
DIAJUKAN SEBAGAI JUDUL PROYEK AKHIR**

OLEH :

NAMA : MASNUR

N R P : E.83026

**FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA - BANDUNG
1988**

" PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN "

di JAKARTA.



SINOPSIS

Diajukan sebagai Judul Proyek Akhir

TA - 501 Semester I tahun 1988/1989

Nama : M A S N U R.

N r p : E. 83026.

FAKULTAS TEKNIK - JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

1 9 8 8.

" PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN ".

1. Latar Belakang.

Tujuan khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian & kemerdekaan dalam masyarakat. Syarat mutlak untuk mencapai hal-hal tersebut ialah adanya ketertiban dan keamanan umum. Oleh karena itu ketertiban dan keamanan umum tergantung kepada tingkah laku manusia, maka Pemerintah bersama - sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat meletakkan keharusan-keharusan dan larangan-larangan dalam peraturan-peraturan hukum kepada setiap orang yang ada diwilayah Negara Republik Indonesia.

Segala peraturan hukum negara mempunyai sifat paksaan (dwang) dan oleh karenanya negara menyediakan kekuasaannya untuk menjamin supaya penduduk patuh kepada peraturan-peraturan hukum. Maka dari itu diadakan suatu alat negara, suatu bangun hukum tata-negara yaitu Polisi. Sebagai bangun tata-negara polisi tidak timbul dengan sendirinya, akan tetapi tumbuh atas kehendak hukum untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka dari itu polisi memang bukan ciptaan pemerintah semata-mata melainkan ciptaan hukum yang merupakan alat, suatu " Staatsmachine " yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.

Seiring dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi dan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) didalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan bertambah pula jenis-jenis penyelewengan hukum yang

dapat menghambat pembangunan nasional disegala bidang maka sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat senantiasa dihadapkan kepada berbagai masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan kemampuan problem solving yang bermutu tinggi, dimana kemampuan tersebut mungkin hanya dapat dilakukan pada tahapan akademis, dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang pengawasan maupun pengelolaannya ditangani langsung oleh Djawatan Kepolisian Negara, dimana tujuan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini adalah untuk mendidik para pemangku jabatan pimpinan kepolisian yang memang membutuhkan pendidikan tinggi.

Pembentukan PTIK ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Djawatan Kepolisian Negara tertanggal 4 mei 1947 No. Pol 20/2/47, mula-mula dengan sebutan " Akademi Polisi ". Pada permulaan kuliah-kuliah dilangsungkan pada sekolah polisi (bagian tinggi) di Metrojudan; mulai 1 pebruari 1947 Perguruan Tinggi ini dipindahkan ke Yogyakarta. Terhitung tanggal 17 Agustus 1950 perguruan tinggi ini di lanjutkan drngan resmi di Jakarta dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 20 september 1950 No. 15/2/10/Pol. Pemindahan ini dilaksanakan berhubung dengan letter n dari lampiran fatsal 51 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang menyatakan bahwa pendidikan pegawai tinggi kepolisian akan diselengga

rakan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam menyongsong era tinggal landas, tentunya banyak hambatan yang akan dialami oleh pimpinan kepolisian sedangkan tahapan pendidikan tinggi untuk kepolisian pada saat ini hanya ada satu yaitu di Jakarta dengan daya tampung mahasiswa yang terbatas, sehingga untuk mencapai stabilitas nasional yang pada pokoknya dapat dan harus ditangani oleh lingkup kerja kepolisian yang makin luas, maka dengan adanya tendensi tersebut diperlukan daya tampung yang besar lagi dengan jalan pengembangan PTIK yang sudah ada maupun pembangunan gedung PTIK disalah satu kota-kota besar di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Perencanaan.

Merancang Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk menampung kegiatan/peningkatan dibidang pendidikan tinggi bagi pemangku-pemangku jabatan pimpinan kepolisian di Indonesia, dalam suatu blok wilayah kota Jakarta Selatan.

3. Deskripsi Proyek.

Nama Proyek : " Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian"

L o k a s i : Blok " 0 ", Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
dengan batas :

- Barat Daya : Jalan Iskandarsyah I.
- Barat Laut : Jalan Tirtayasa Raya.
- Timur Laut : Jalan Tirtayasa VII.
- T i m u r : Jalan Prof. Joko Soetono SH.
- Tenggara : Jalan Wijaya I.

Sifat Proyek : F i k t i f.

Pemilik : MABES POLRI.

Pendanaan : MABES POLRI.

Luas Bangunan : $\pm 6000 \text{ M}^2$.

Luas Tapak : $\pm 7,7 \text{ Ha}$.

Fasilitas Yang Direncanakan :

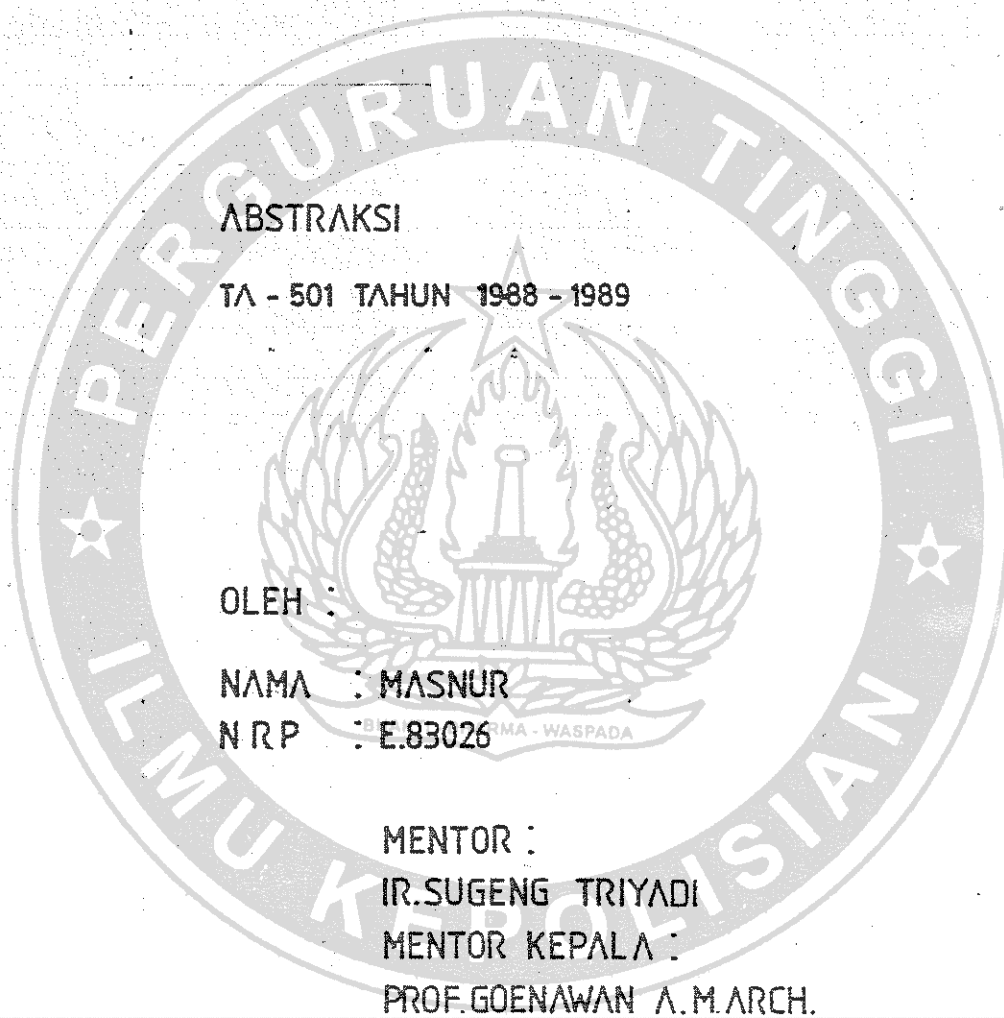
- Ruang kerja Gubernur, ruang kerja wakil Gubernur, ruang kerja staf, ruang kerja pegawai, serta ruang penunjang lainnya.
- Ruang Kuliah.
- K a n t i n.
- Ruang Koperasi.
- M u s h o l a.
- Ruang Perpustakaan.
- Laboratorium.
- Ruang Lembaga - Lembaga Fungsionalisasi Kemahasiswaan.
- Ruang Rapat.
- Gedung Serba Guna.
- Ruang Parkir Khusus : Pimpinan.
- Ruang Parkir Pegawai : Staf dan Tamu.

4. Rumusan Permasalahan.

- Masalah perkotaan mencakup :
 - o Segi keselarasan dan efisiensi penataan massa - massa bangunan pada tapak.
 - o Segi penataan sirkulasi dan penyediaan lokasi parkir pada tapak.

- Perancangan yang memperhitungkan/menitik beratkan pada segi citra wajah kota Jakarta yang terungkap dari lingkungan lokasi dan ciri utama dari karakter bangunan-bangunan kepolisian.
 - Segi pengendalian bising lingkungan pada ruang- ruang tertentu.
- Masalah Perancangan Bangunan.
- Segi penampilan yang representatif,berwibawa, terbuka dan kesan rasa aman/kokoh.
 - S i r k u l a s i .
 - Pencapaian antara massa-massa bangunan.
 - Faktor efisiensi dan efektif bangunan.
 - Masalah struktur bangunan bertingkat dan integrasinya dengan sistem mekanikal,elektrikal,utilitas bangunan dan segi-segi kecepatan serta kemudahan dalam sistem pembangunannya.
5. Rumusan Pemecahan Masalah (Problem Solving).
- Study mengenai karakteristik urban pusat kota Jakarta sebagai dasar perancangan yang pokok.
 - Study mengenai pola kegiatan dibidang pendidikan pada sekolah-sekolah kepolisian,maupun perguruan tinggi - perguruan tinggi lain.

“PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN”
DI JAKARTA



FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA - BANDUNG
1988

" PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN "

di JAKARTA.



FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA - BANDUNG.

1 9 8 8.

TA - 501 SEM. I TAHUN 1988 - 1989.
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA - BANDUNG.

A B S T R A K S I

" PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN - di JAKARTA ".

N a m a : M A S N U R.
N.R.P. : E. 83026.
M e n t o r : IR.SUGENG TRIYADI.
Mentor Kepala : Prof.IR.GOENAWAN.A.MARCH.

A. DESKRIPSI PROYEK.

Judul Proyek : PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN.
L o k a s i : Blok " 0 " Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.
Sifat Proyek : Fiktif.
Pemberi Tugas : MABES POLRI.
Pemilik : MABES POLRI.
Lingkup Pekerjaan : 1. Perancangan bangunan komplek - PTIK - Jakarta.
2. Penataan ruang luar.
Luas Lahan : + 7,7 HA.
Luas Bangunan : + 20.349,84 m².

B. LATAR BELAKANG.

- Kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat.
- Ketertiban dan keamanan umum.
- Perkembangan penduduk yang cukup tinggi.

- Semakin pesatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Meningkatnya jenis-jenis penyelewengan hukum.
- Diperlukannya calon-calon pimpinan Polri yang bermutu tinggi/mampu berpikir secara sistematis, methodis dan cakap disegala bidang.

C. TUJUAN.

- Menyediakan wadah untuk menampung kegiatan pendidikan, administrasi dan tempat bagi berlangsungnya proses sosialisasi Polri.
- Memberikan bekal berbagai disiplin ilmu bagi para perwira mahasiswa sebelum memasuki jabatan yang lebih tinggi.

D. PERMASALAHAN DAN PENDEKATAN.

- Masalah dalam bangunan.
 - Bagaimana menggabungkan fungsi-fungsi yang ada (Gedung Utama, Kampus, Flat, Perpustakaan Polri dan GSG.) sehingga mencerminkan kesatuan kompleks PTIK.
 - Perlu pengkondisian bagi seluruh Perwira Mahasiswa untuk berkonsentrasi dalam berbagai kegiatan disiplin Ilmu Kepolisian.
- Masalah kontekstual dengan lingkungan perkantoran , perpustakaan Polri (mendukung kompleks besifat terbuka), sementara fungsi lain (pendidikan, hunian) memiliki sifat lebih privat.
- Keberadaan proyek dalam skala kota mengakibatkan perancangan dengan kendala-kendala lingkungan seperti, sirkulasi, orientasi, pencapaian.

E. KONSEP PERANCANGAN.

- Pengelompokan Fungsi.

- Tapak dibedakan berdasarkan pengelompokan fungsi - yaitu : kelompok fungsi pendidikan, administrasi & hunian.

- Lingkungan.

- Karakter tapak terbuka, sehingga dapat dicapai dari segala arah.

• Pemintakatan/zoning.

Tapak dibedakan menjadi daerah buffer, pendidikan, perkantoran, hunian.

• Hirarki.

Pembagian tapak berdasarkan daerah yang bersifat ; publik, semi publik dan privat.

• Orientasi.

Sesuai dengan jalan masuk utama (main entrance).

• Sekuens.

Dari daerah main entrance, seseorang akan ditampung pada daerah/ruang orientasi (plaza) yang secara-frontal dihadapkan pada bangunan administrasi (sebagai sentral kegiatan) kemudian disebar ke daerah atau massa-massa bangunan yang akan dituju ; Fakultas Ilmu Kepolisian, G.S.G., Perpustakaan Polri dan Flat.

• Pencapaian.

Pencapaian kelokasi dapat ditempuh dari beberapa arah/jalan yaitu jalan utama dan jalan sekunder,

namun dipilih pencapaian melalui jalan sekunder karena dua alasan yaitu beban pemakaian di jalan sekunder lebih ringan dibanding jalan utama, dan pemanfaatan jalan masuk yang memutar agar pengunjung dapat menikmati suasana lokasi.

Pencapaian utama langsung pada bangunan (Gedung Utama) yang memberikan kesan bangunan pendidikan.

- Sirkulasi.

Disesuaikan dengan bangunan dan fungsi-fungsi lain seperti ; Gedung Utama, Fakultas Ilmu Kepolisian , G.S.G., Perpustakaan Polri dan Flat yang letaknya - terpecah, maka diperlukan satu pengikat yang kemudian menyebar keseluruhan fungsi.

- Tata Ruang.

Ruang-ruang dominan yang terjadi pada tapak yaitu pada daerah persimpangan-persimpangan dimana daerah tersebut akan ditangkap oleh massa bangunan. Daerah entrance dibuat lebih terbuka untuk suatu kesan yang mengundang.

- Bentuk Massa.

Massa bangunan yang dipilih disesuaikan dengan massa bangunan untuk daerah tropis, misalnya atap bangunan yang miring, memiliki overstek sebagai pelindung sinar matahari langsung, memiliki cross ventilation dan lain sebagainya.

F. SISTEM BANGUNAN

- Struktur.

Rangka beton, dengan bentangan 7,20 m berdasarkan modul kelas, mengoptimalkan penggunaan pencahayaan dan penghawaan alami.

- Bahan Bangunan.

Penyelesaian dinding sebagian besar dengan marmer & keramik, berdasarkan masalah perawatan.

- Listrik.

PLN ---- Gardu ---- Bangunan.

- Air Bersih.

PAM ---- Menara Air ---- Bangunan.

- Air Kotor/limbah.

Pembuangan padat dari sumber ---- septik tank ---- rembesan.

Pembuangan air limbah melalui proses penetralan lalu ke riool kota.

- Air Hujan.

Talang horizontal ---- Talang vertikal ---- saluran dalam tapak ---- ke riool kota.

- Sistem Komunikasi.

Ekstern menggunakan telepon dan intern menggunakan intercom.

- Pencegahan Kebakaran.

Air dan Sprinkel.

- Sistem Sirkulasi.

Horizontal dengan selasar dan Vertikal dengan tangga.

- Sistem penerangan dan pencahayaan.

Penerangan buatan dan pencahayaan alami (maksimum).

- Sistem Penghawaan.

Sebagian besar menggunakan penghawaan alami, untuk ruang-ruang tertentu menggunakan pengkondisian udara.

- Sistem Tata Suara.

Ruang-ruang tertentu menggunakan bahan akustik.

- Sistem Pembuangan Sampah.

Sumber Sampah ---- Pengumpulan secara manual ----

Bak sampah ---- Diangkut oleh Dinas Kebersihan Kota

---- TPA (tempat pembuangan akhir).

G. HAL - HAL KHUSUS.

Pada perencanaan Komplek " PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN ", massa bangunan yang di blow up adalah Gedung Utama, dengan luas bangunan 10.304,64 m².

